

PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG
WILAYAH PESISIR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM PASCA TSUNAMI

SEMINAR SEHARI

Banda Aceh, 14 Maret 2007



PT. Sumaplan Adicipta Persada
consulting and training services

LATAR BELAKANG

- Provinsi NAD memiliki potensi bahari cukup prospektif untuk dikembangkan sebagai kawasan sentra industri perikanan dan kelautan di kawasan Indonesia Bagian Barat, terlebih dibukanya kawasan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di ujung barat Indonesia.
- Potensi wilayah pesisir belum dimanfaatkan dengan baik, karena belum tersedianya sebuah kerangka kebijakan yang mengatur pemanfaatan di wilayah pesisir dan laut.
- Kedekatan lokasi Prov. NAD dengan negara lain seperti Malaysia dan India, membuat persoalan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah lautnya tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan internal, melainkan juga dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan eksternal, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

- Akibat adanya Gempa disertai Tsunami 26 Desember 2004 dan Gempa 28 Maret 2005 telah semakin memperparah kerusakan lingkungan baik secara ekologis dan biogeofisik maupun sosial ekonomi.
- Tata Ruang Laut, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu dimensi perencanaan yang harus ada, menurut Undang-undang No : 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang.
- Dengan pertimbangan tersebut, perlu kiranya disusun suatu kerangka kebijakan pemerintah untuk pemanfaatan ruang yang tertuang dalam RUTRW Pesisir dan Laut, guna mengakomodasi aspirasi stakeholder dan mengantisipasi perkembangan yang terjadi di masa mendatang.

TUJUAN

- Menyusun RUTRW Pesisir Prov. NAD Pasca Tsunami sebagai pedoman Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang di Laut dan Pesisir;
- Menganalisis potensi, kendala, peluang dan tantangan pengembangan wilayah pesisir Provinsi NAD;
- Merumuskan zonasi kawasan pesisir;
- Merumuskan kebijakan penataan ruang pesisir dan laut yang mencakup, arahan zona ruang, arahan pemanfaatan dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang pesisir, sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang dan dasar pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terintegrasi;
- Merumuskan kerangka integrasi RUTRW Pesisir dan RUTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, baik secara substansial maupun legal-institusional.

SASARAN

- Tersusunnya RUTRW Pesisir dan Laut yang terintegrasi untuk mengkoordinasikan perencanaan kegiatan antar/inter Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
- Tersusunnya arahan zonasi pemanfaatan ruang bagi kegiatan sumberdaya pesisir dan laut yang merupakan arahan dari penyusunan pengembangan prasarana dan sarana kelautan.
- Adanya arahan rencana pengembangan sistem daya dukung lingkungan dan sumberdaya lokal.
- Terumuskannya kebijakan penataan ruang wilayah pesisir dan laut yang mencakup arahan : rencana zonasi, rencana pemanfaatan dan pengelolaan, serta rencana pengendalian pemanfaatan ruang secara holistik dan terintegrasi.

LINGKUP KEGIATAN

1. Melakukan inventarisasi berbagai data yang ada dan relevan atau berkaitan dengan penelitian sumberdaya pesisir dan kelautan.
2. Identifikasi rona awal pesisir dan laut secara bio-fisik, ekonomi dan sosial budaya mengenai sumberdaya pesisir dan kelautan di Prov. NAD.
3. Analisis regional terhadap kemampuan potensi dan daya dukung ekosistem, serta kajian masalah sosial ekonomi dalam lingkup lokal/regional.
4. Penyusunan rencana struktur ruang pesisir dan laut, yang mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 34/KepMen/2002.
5. Penyusunan rencana penataan dan pengembangan kawasan-kawasan yang layak usaha, serta sektor unggulan yang dapat dikembangkan.
6. Penyusunan prioritas pengembangan wilayah pesisir, baik dalam pengembangan kawasan investasi infrastruktur, industri maritim, maupun penanganan masalah sosial.

PEMAHAMAN TERHADAP HIRARKI PENATAAN RUANG

□
.....
:.. —

TUGAS PEMERINTAH .

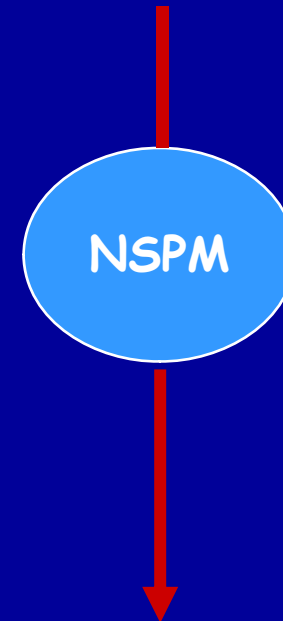
□
.....
:.. —



□
.....
:.. —

□
.....
:.. —

□
.....
:.. —



TUGAS PEMERINTAH .\.

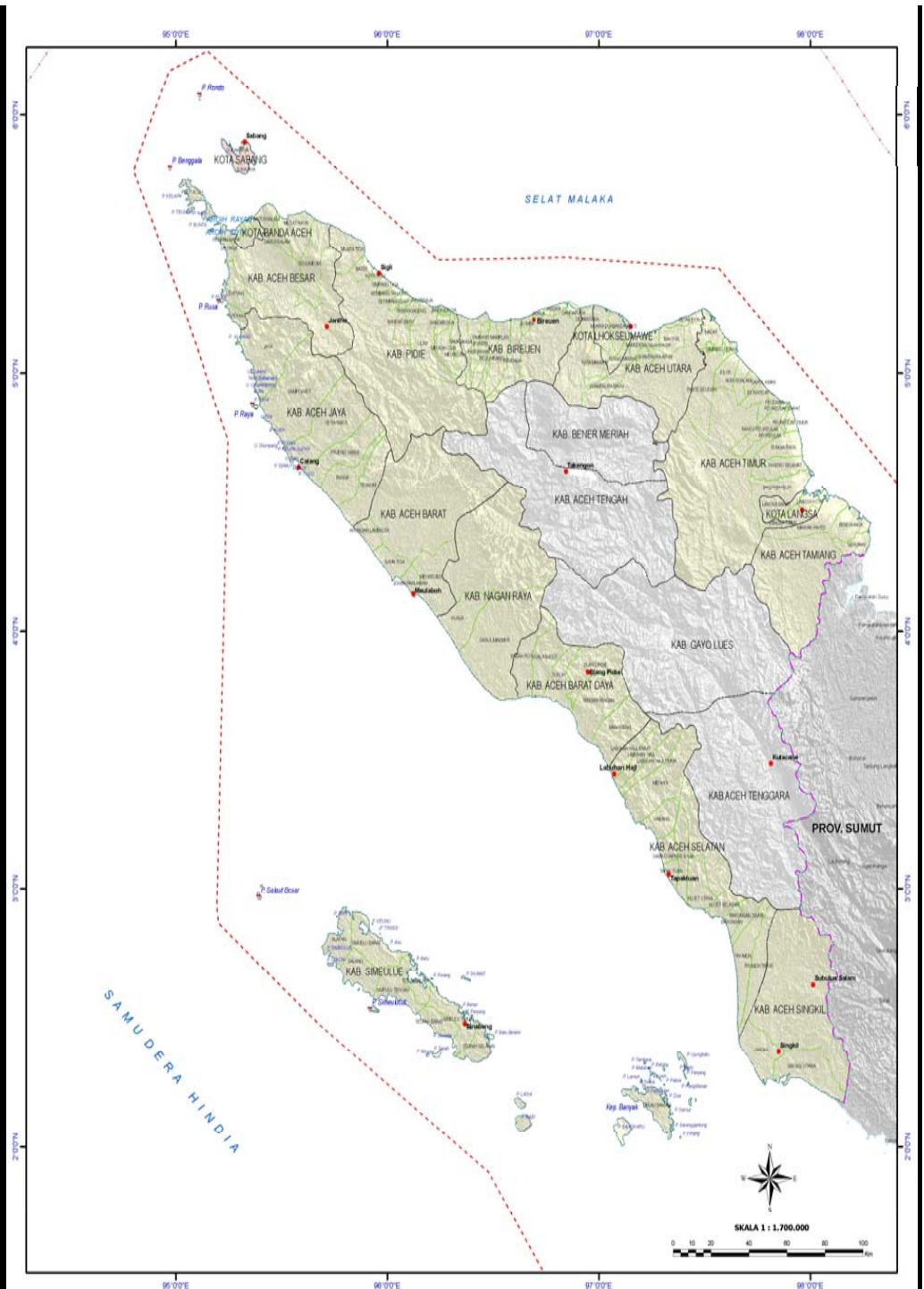
LOKASI KEGIATAN

Wilayah analisis dari kegiatan ini mencakup dua batasan, yaitu:

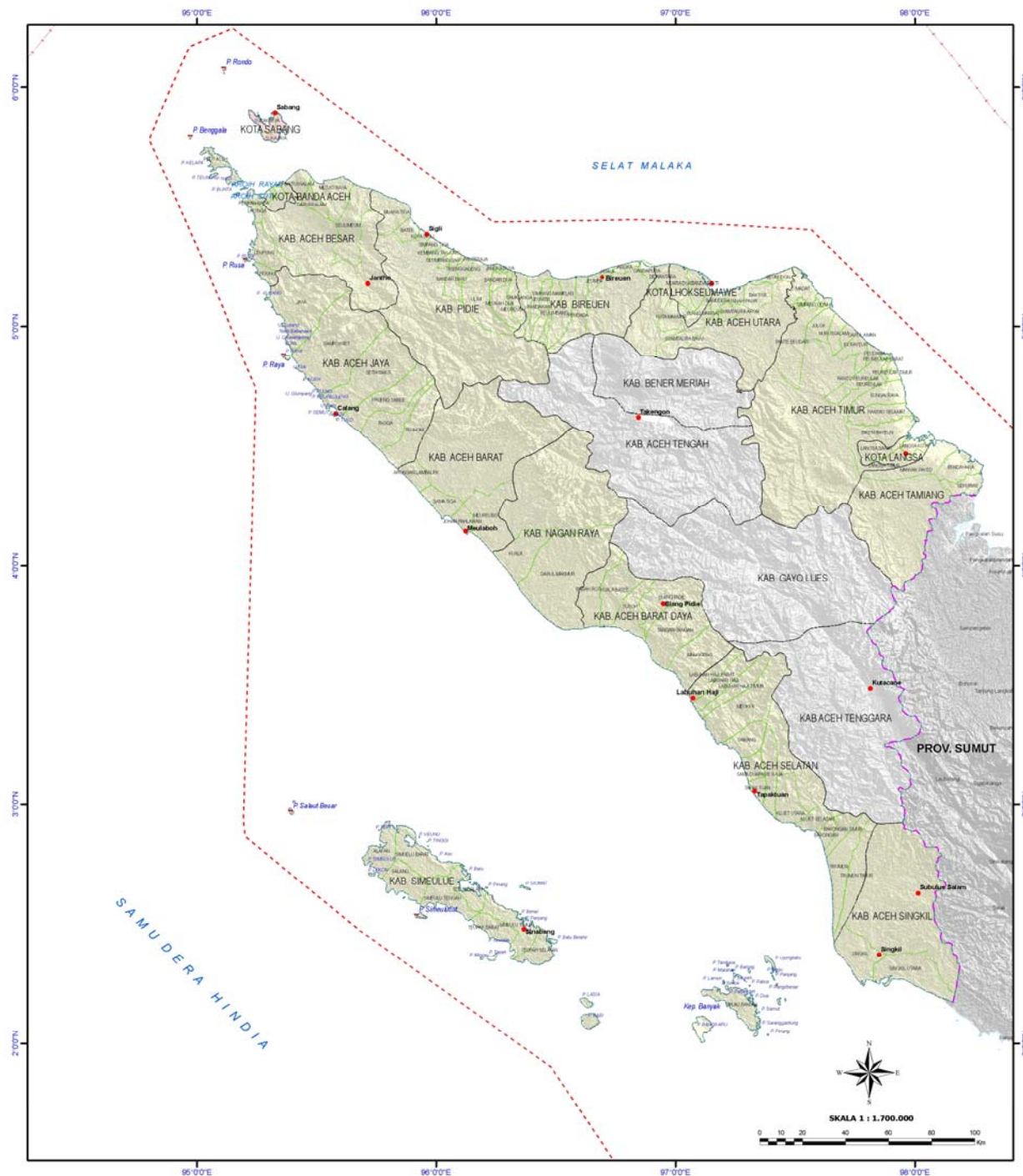
1. Wilayah daratan yang berupa wilayah pesisir yang berada dalam batas administrasi Pemerintah Prov. NAD, yaitu desa atau kecamatan-kecamatan (dalam lingkup Kab/Kota) yang berada di sepanjang garis pantai yang termasuk dalam 17 kabupaten/kota di Prov. NAD;
2. Wilayah lautan yang mencakup wilayah sepanjang 12 mil laut dari garis pantai, sebagaimana diatur dalam UU 32/2004.

LINGKUP LOKASI

1. Kota Banda Aceh
2. Kabupaten Aceh Jaya
3. Kabupaten Aceh Barat
4. Kabupaten Nagan Raya
5. Kabupaten Aceh Barat Daya
6. Kabupaten Aceh Selatan
7. Kabupaten Aceh Singkil
8. Kabupaten Aceh Besar
9. Kabupaten Aceh Tamiang
10. Kota Sabang
11. Kabupaten Simeulue
12. Kabupaten Pidie
13. Kabupaten Bireuen
14. Kabupaten Aceh Utara
15. Kota Lhokseumawe
16. Kabupaten Aceh Timur
17. Kota Langsa



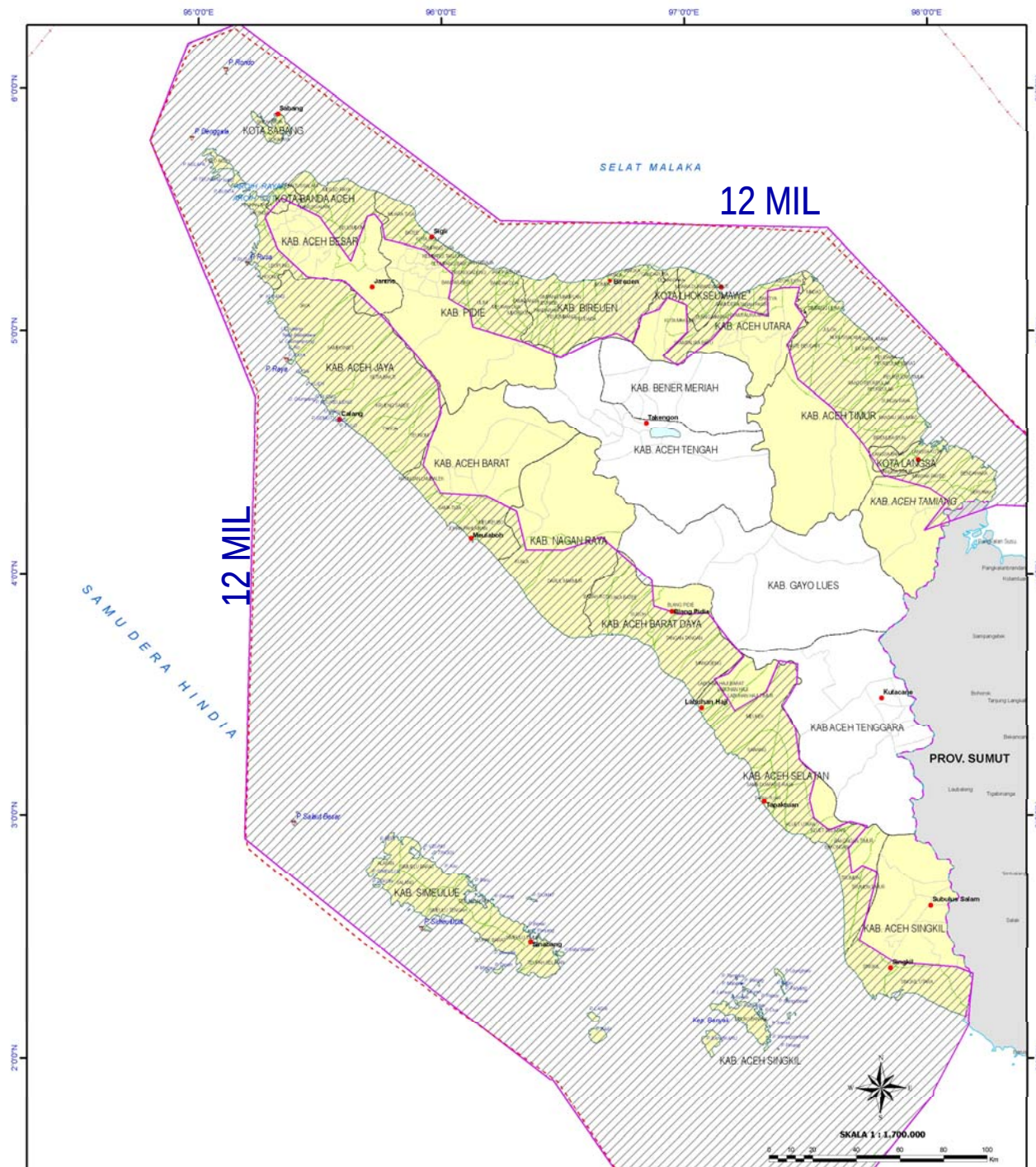
Batas Administrasi

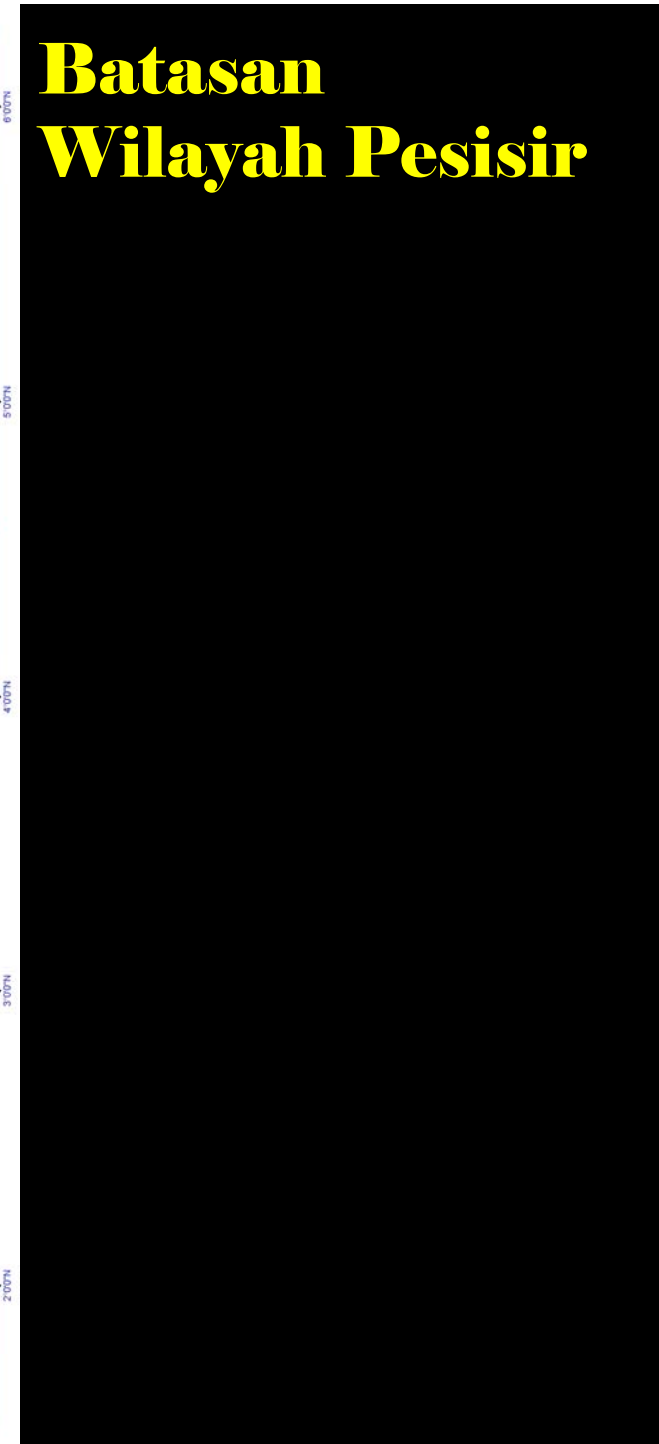
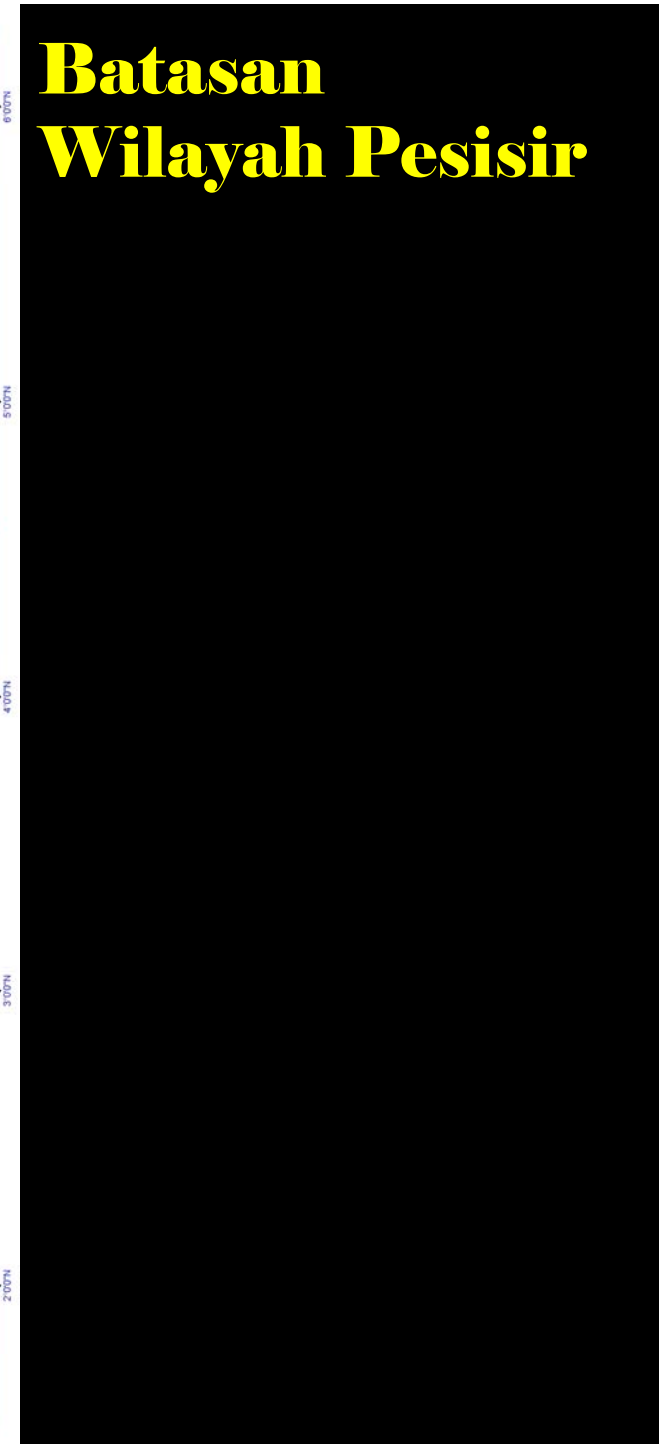


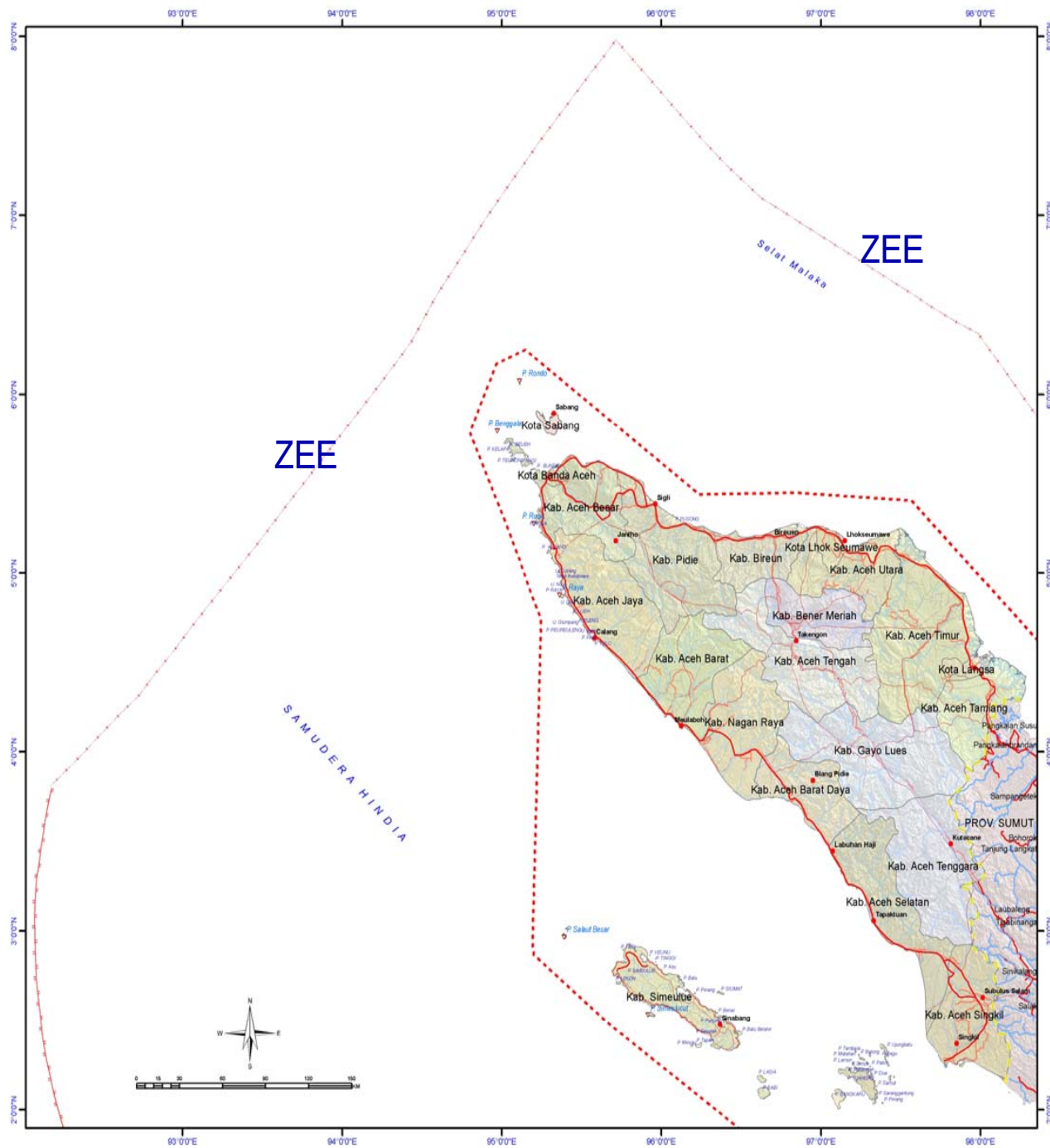
Panjang Garis Pantai Prov. NAD Pasca Tsunami dari Interpretasi Citra Satelit Landsat ETM 2005

No	Kabupaten	Panjang garis Pantai (km)
1	Sabang (Kota)	78,9
2	Simeulue	561,8
3	Langsa (Kota)	50,7
4	Aceh Tamiang	77,7
5	Aceh Timur	136,9
6	Lhokseumawe (Kota)	48,4
7	Aceh Utara	49,1
8	Bireuen	74,6
9	Pidie	86,1
10	Banda Aceh (Kota)	26,2
11	Aaceh Besar	255,4
12	Aceh Jaya	145,1
13	Aceh Barat	65,4
14	Aceh Barat Daya	68,8
15	Aceh Selatan	157,3
16	Nagan raya	60,2
17	Aceh Singkil	373,9
	Total NAD	2.316,5

Batas Wilayah Perencanaan

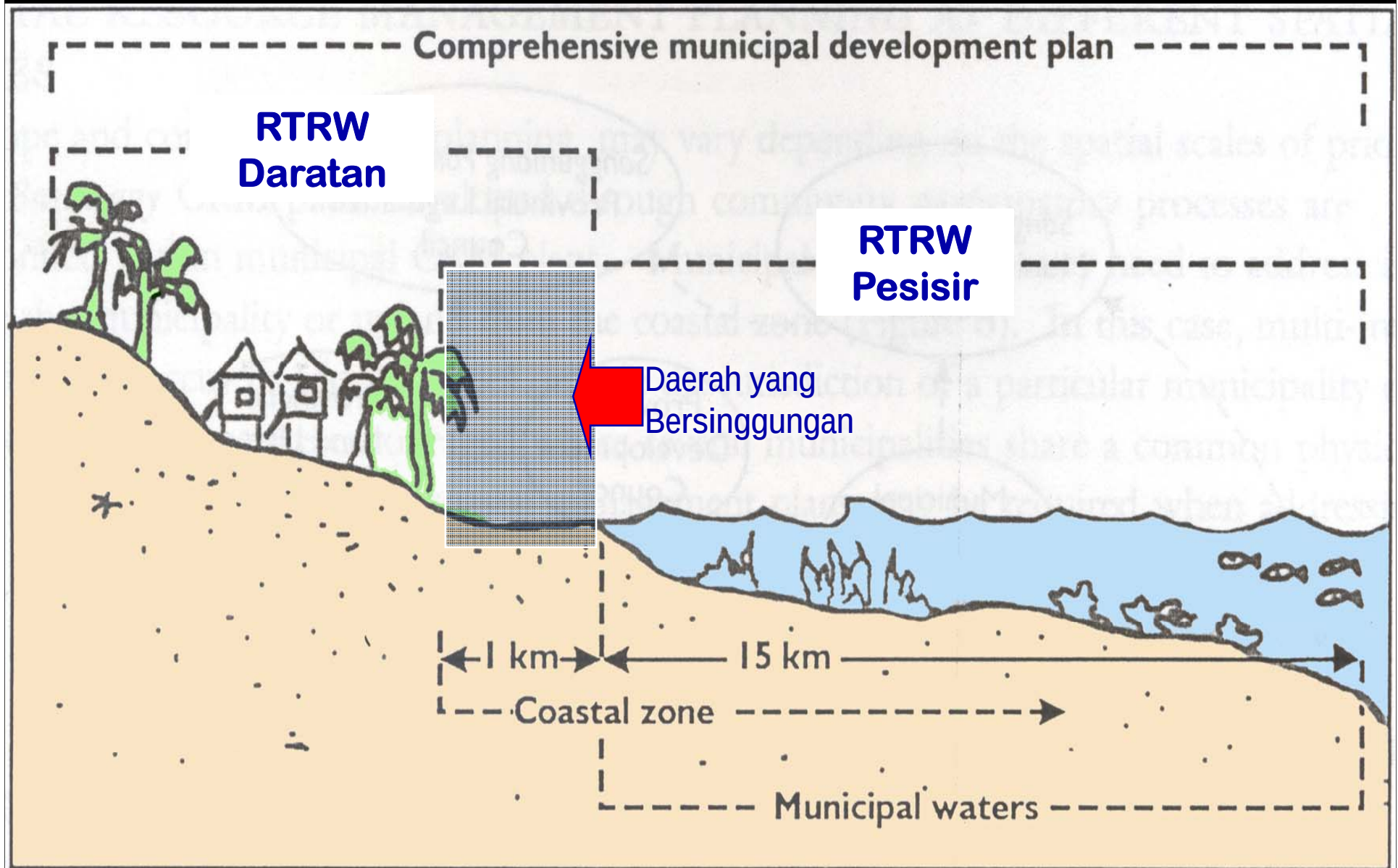




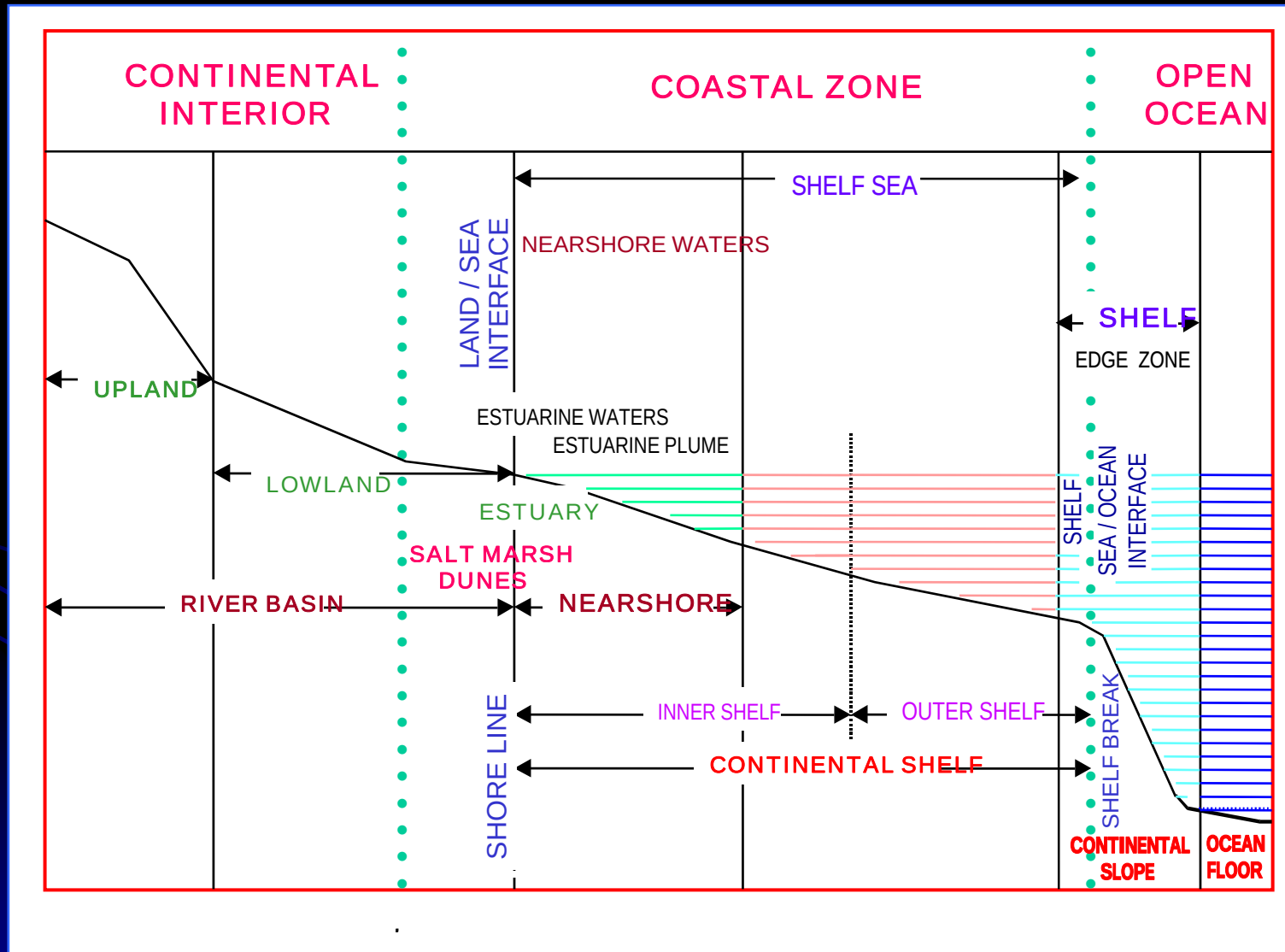


Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

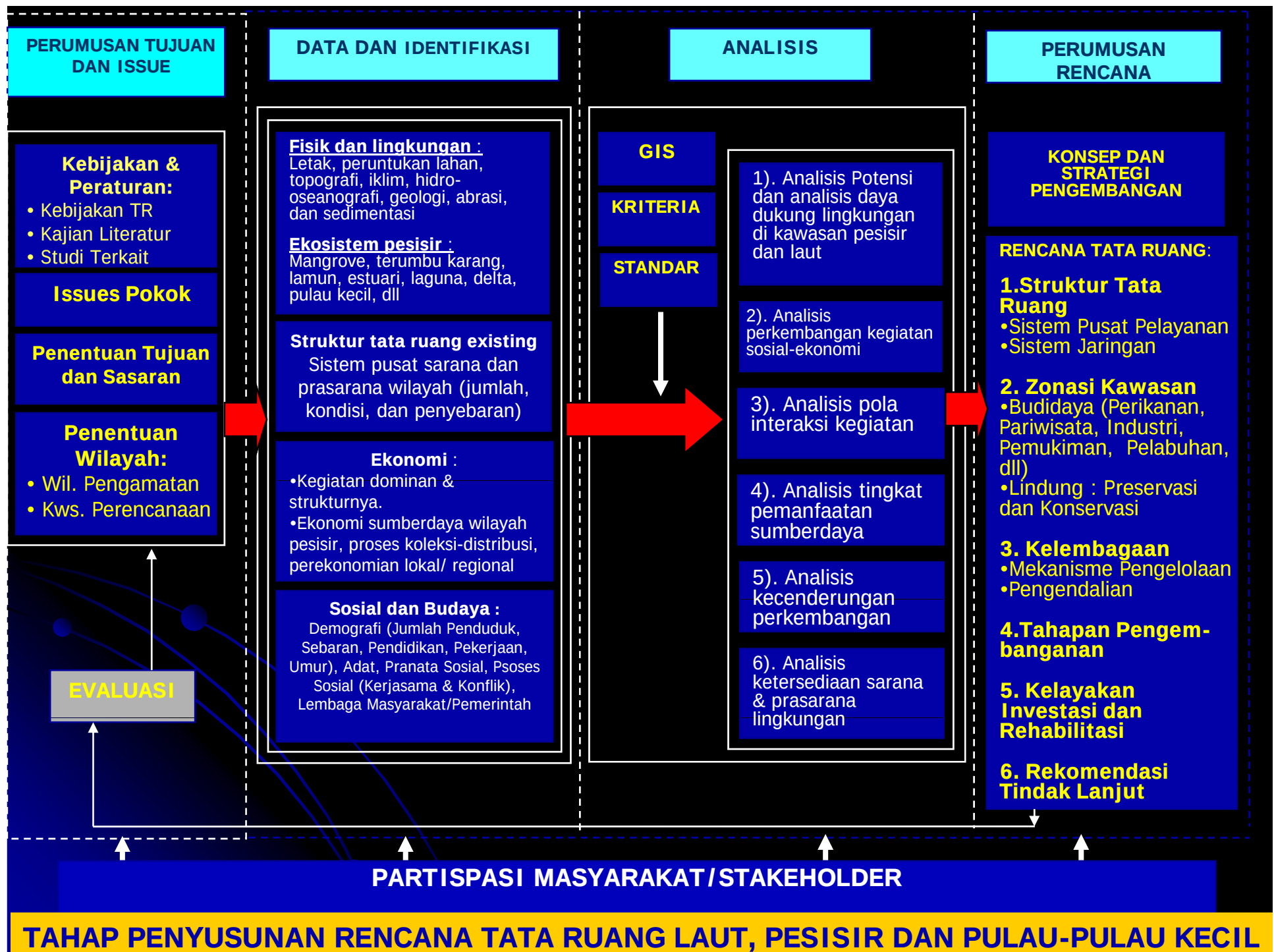
SINKRONISASI WILAYAH



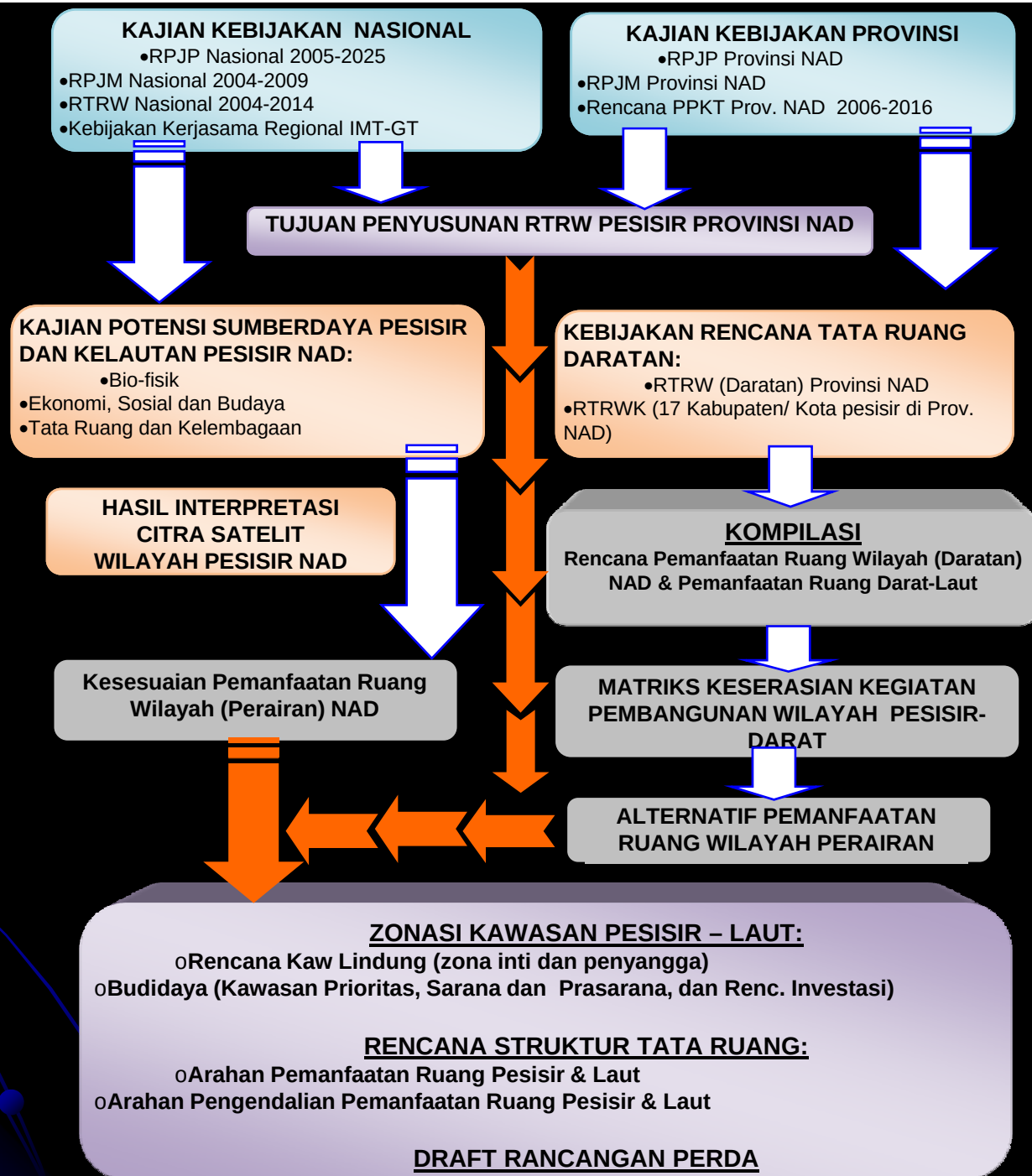
BATASAN WILAYAH PESISIR



Gambar Batasan Wilayah Pesisir (Pernetta dan Milliman, 1995)



PROSES INTEGRASI RENCANA PEMANFAATAN RUANG DARAT-LAUT



DASAR HUKUM DAN KEWENANGAN

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran Indonesia
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Nanggroe Aceh Darussalam
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

DASAR HUKUM DAN KEWENANGAN

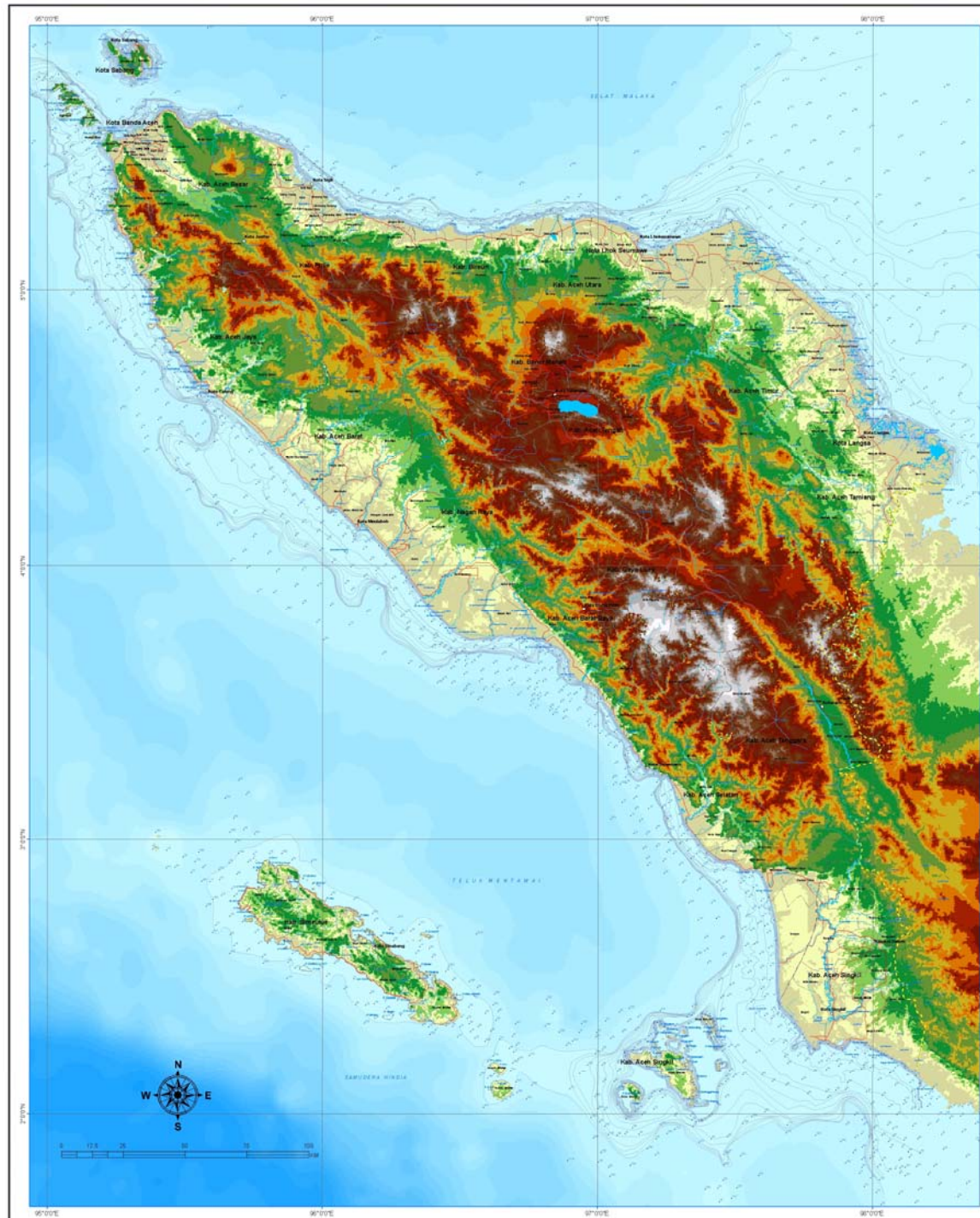
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Pelabuhan
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik – Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2004-2009)
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau – Pulau Kecil Terluar
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Investasi Pulau-Pulau Kecil.
- Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang.
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat Beserta Lembaga Adat di Propinsi Istimewa Aceh
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Isu-Isu Pokok Pasca Gempa dan Tsunami

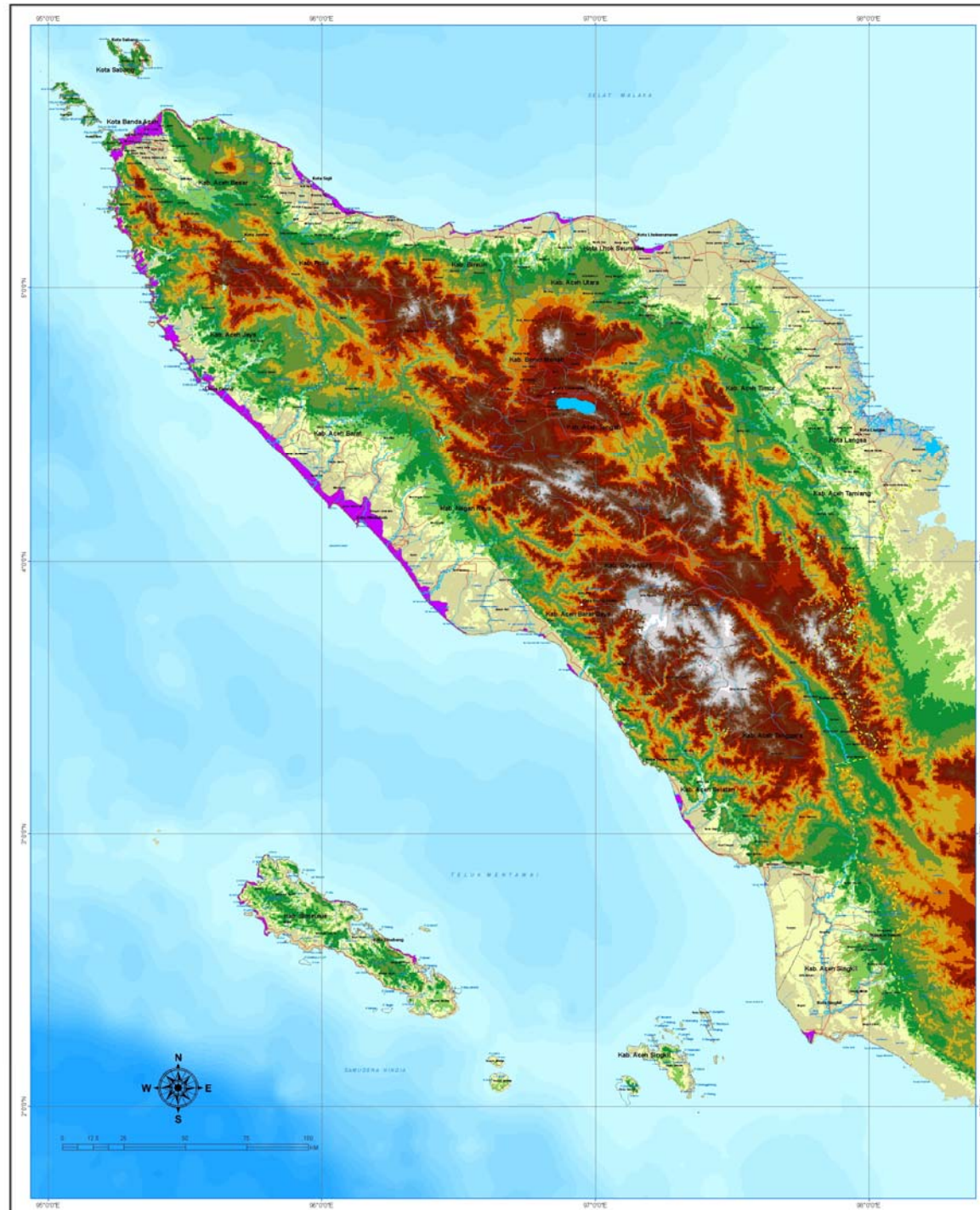
- Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat
- Gangguan/Degradasi Lingkungan
- Deplesi SDA
- Perubahan Bentang Alam dan Garis Pantai
- Perubahan Fungsi Ekosistem
- Rusaknya Infrastruktur
- Konflik Pemanfaatan
- Keamanan

GEOMORFOLOGI

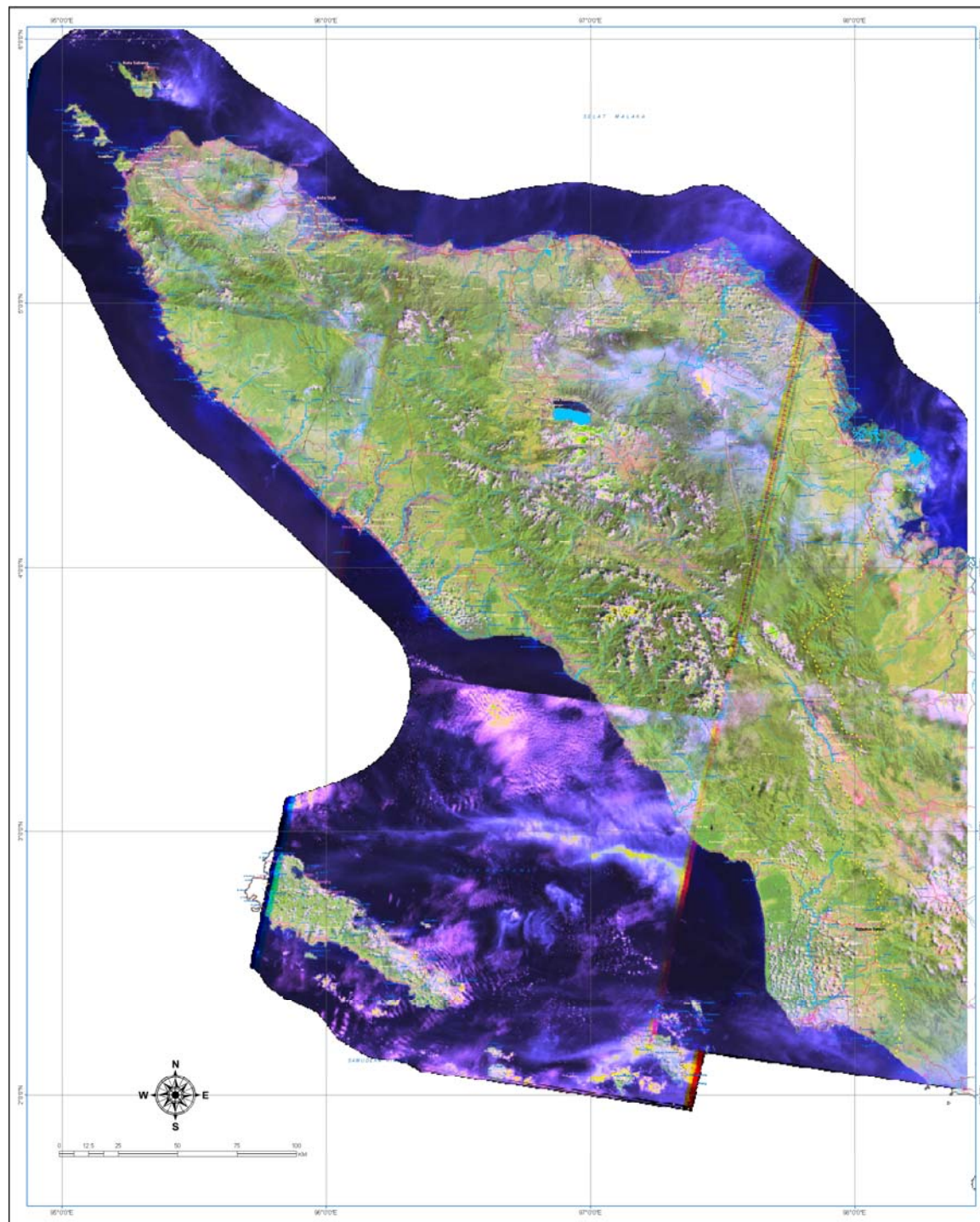
Parameter	Pantai Barat	Pantai Timur
gelombang	➢ Dari Samudera Hindia; cukup besar dan frekwensi yang tinggi ➢ Arah gelombang dominan; selatan, barat laut	➢ Berada di selat Malaka; relatif lebih kecil dibandingkan Pantai Barat ➢ Arah dominan ; utara, timur laut
Pasang Surut	Relatif lebih kecil. Selisih maksimal pasut 1,20 m	Relatif besar dibanding pantai Barat
sedimen	➢ Pasir, gravel ➢ Longshore transport menuju ke arah barat laut.	➢ Pasir, lempung (dari sungai) ➢ Longshore transport menuju ke arah tenggara.
Pertahanan alami	Mayoritas Karang laut, cemara laut, Kelapa	Mayoritas mangrove, cemara laut
Sungai	Panjang sungai lebih kecil dan jumlah sungai dengan kemiringan yang curam.	Lebih banyak dengan kemiringan yang relatif lebih landai.
Kerusakan pantai	➢ Perubahan struktur geologi pantai sehingga mengalami penurunan/ kenaikan. Perubahan ini mengakibatkan pantai mencari kestabilan baru ➢ Hilang/rusaknya karang laut dan mangrove akibat tsunami. ➢ Penutupan muara sungai di musim kemarau. ➢ Maju/Mundurnya garis pantai akibat serangan gelombang, terutama pasca gempa dengan adanya kenaikan/penurunan struktur geologi (<i>subsidence</i>) mengakibatkan perubahan pola hidrodinamik di perairan pantai yang dapat menimbulkan erosi/abrasi pesisir pantai.	➢ Didominasi penutupan muara akibat proses longshore transport dan banyaknya lidah pasir (<i>sand spit</i>) yang menutupi muara, sehingga banyak mulut muara yang berpindah menghambat kapal-kapal nelayan yang berlabuh di sungai. Akibatnya terjadi backwater yang menimbulkan banjir di daerah hulu. ➢ Hilangnya mangrove akibat terkena tsunami ataupun ditebang oleh penduduk. ➢ Abrasi/erosi pantai.
		➢ Sebagian pantai timur (dari ujung utara Provinsi NAD sampai Lhoksoumawe) terkena gelombang tsunami walau intensitasnya lebih kecil.



BATHIMETRI

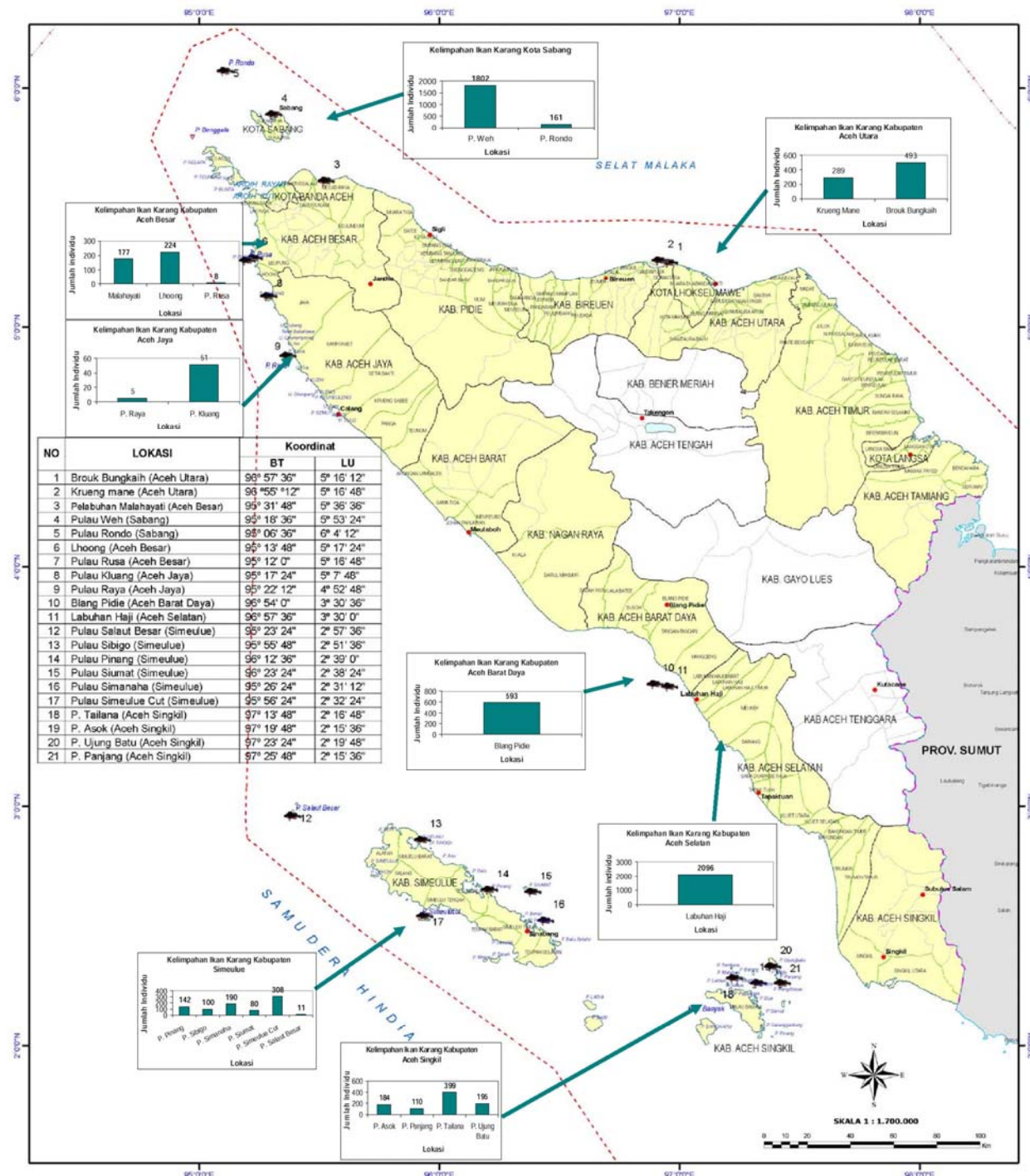


PETA KERUSAKAN PANTAI AKIBAT TSUNAMI



PETA CITRA SATELIT TH 2005

Kondisi Perikanan





Gambar disamping menunjukkan potensi perikanan tangkap dipantai barat sangat besar

No	Kabupaten/Kota	Produksi Tahun 2005	
		Ton	Nilai (Rp. 000)
Jumlah Total		78033.2	630,441,664.2
Pantai Barat		33161.6	244,548,748.8
1	Kab. Aceh Selatan	10148.7	62,983,053.0
2	Kab. Aceh Singkil	3641.8	24,395,830.0
3	Kab. Aceh Barat	2096.4	19,755,350.0
4	Kab. Simeulue	843.2	4,510,473.4
5	Kab. Aceh Besar	4031.4	29,994,750.0
6	Kab. Aceh Jaya	724	5,266,209.4
7	Kab. Nagan Raya	1245	13,738,860.0
8	Kab. Aceh Barat Daya	4804	37,482,873.0
9	Kota Banda Aceh	3165.9	26,255,400.0
10	Kota Sabang	2461.2	20,165,950.0
Pantai Timur		44871.6	385,892,915.4
11	Kab. Pidie	9078.5	85,526,760.0
12	Kab. Bireuen	12698.6	113,692,700.0
13	Kota Lhokseumawe	3779.6	37,261,890.0
14	Kab. Aceh Utara	7663.4	54,925,220.0
15	Kab. Aceh Timur	1910.9	16,770,740.4
16	Kota Langsa	3476.3	34,353,325.0
17	Kab. Aceh Tamiang	6264.3	43,362,280.0

Potensi Sumberdaya Perikanan Tangkap



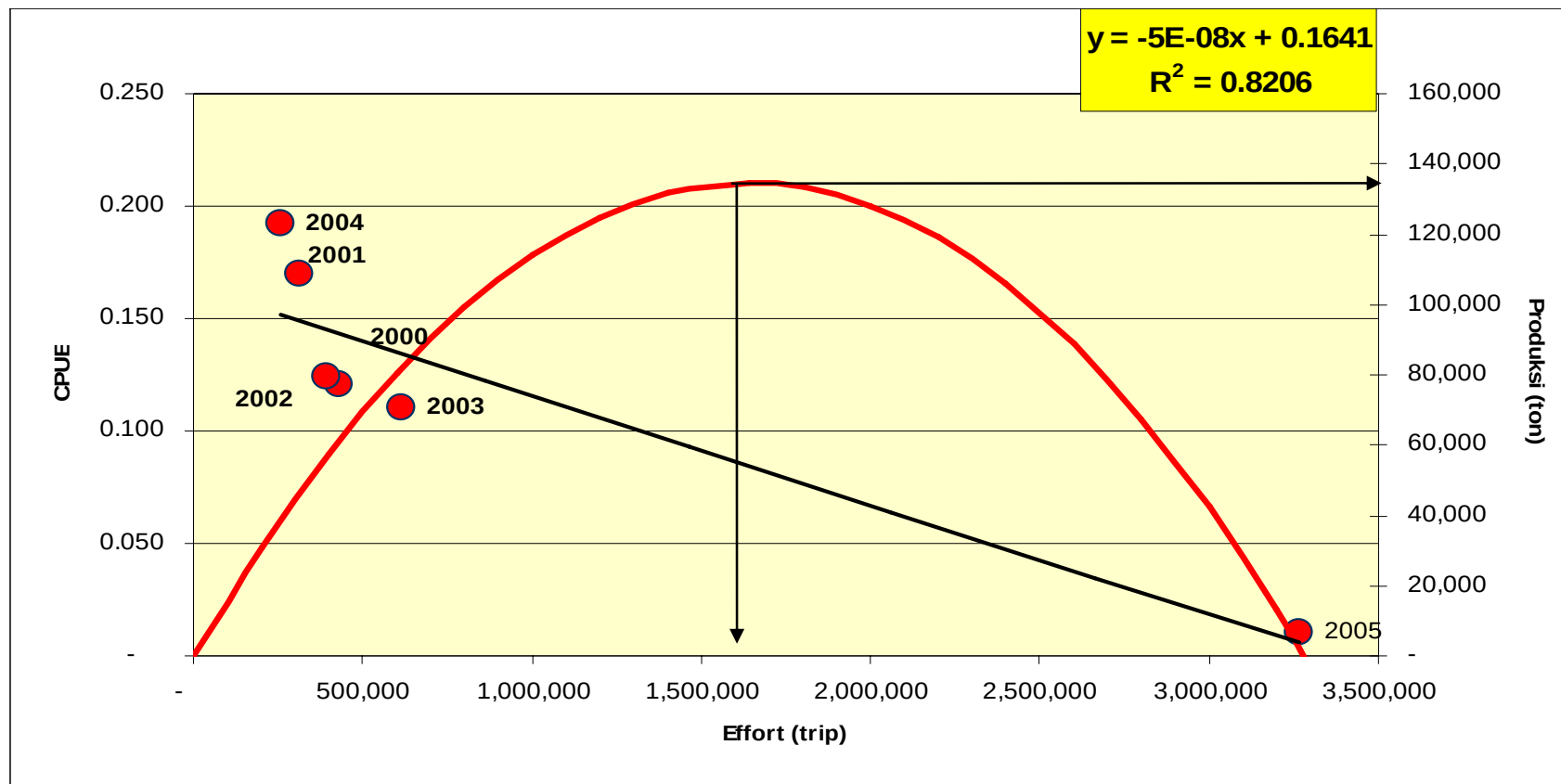
No	Kabupaten/Kota	2002	2003	2004	2005
Jumlah Total		130429.1	125973.2	91447.1	78033.4
Pantai Barat		59119.2	65617.1	48443.3	33161.8
1	Kabupaten Aceh Selatan	14880	13735.2	14886.6	10148.7
2	Kabupaten Aceh Singkil	-	10846	1273.3	3641.8
3	Kabupaten Aceh Barat	11720	10748.9	5394.1	2096.4
4	Kabupaten Simeulue	4356.3	4658.4	1138.8	843.2
5	Kabupaten Aceh Besar	11760	10892.9	11509.1	4031.4
6	Kabupaten Aceh Jaya	-	-	1354.9	724
7	Kabupaten Nagan Raya	-	-	259.7	1245
8	Kabupaten Aceh Barat Daya	5382.3	6268.8	2857	4804.3
9	Kota Banda Aceh	9086.9	6417.9	6585.6	3165.9
10	Kota Sabang	1933.7	2049	3184.2	2461.2
Pantai Timur		71309.9	60356.1	43003.8	44871.6
11	Kabupaten Pidie	11796.3	11805.7	12923.2	9078.5
12	Kabupaten Bireuen	18644.7	16561.5	15944.5	12698.6
13	Kota Lhokseumawe	-	-	3967.4	3779.6
14	Kabupaten Aceh Utara	21157.5	8386.2	5838.2	7663.4
15	Kabupaten Aceh Timur	17645.6	14916	1465	1910.9
16	Kota Langsa	-	-	2001.1	3476.3
17	Kabupaten Aceh Tamiang	2065.8	8641.7	867.4	6264.3

Perkembangan Nilai CPUE di Pantai Barat Tahun 2000 – 2005

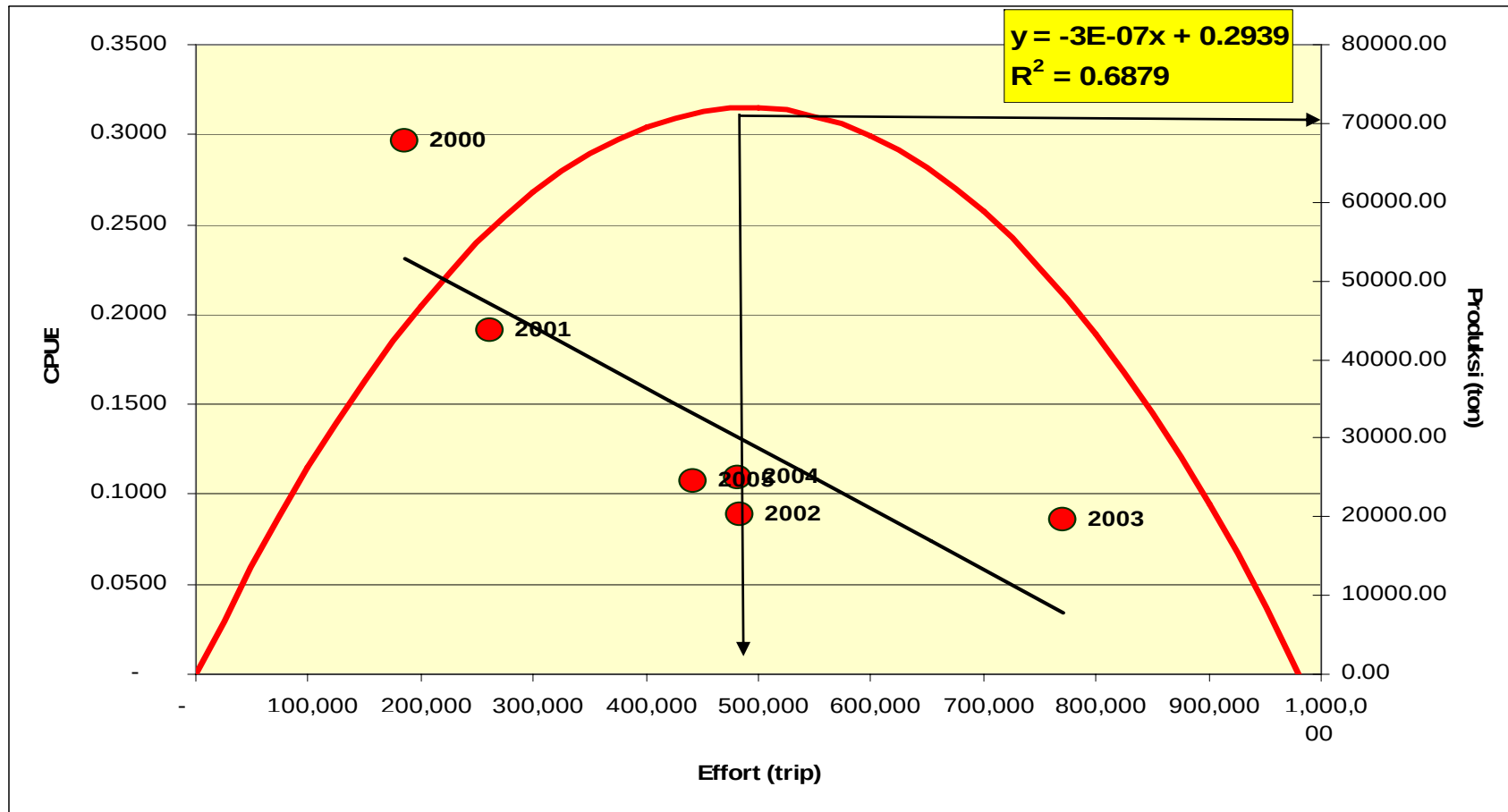
TAHUN	PRODUKSI (ton)	UPAYA (trip)	CPUE (ton/trip)
2000	52,321,30	432,843	0,1209
2001	52,815,00	310,996	0,1698
2002	49,380,60	396,551	0,1245
2003	68,322,70	617,008	0,1107
2004	49,958,90	260,234	0,1920
2005	33,550,00	3,265,145	0,0103
Rata-rata	51,058	403,526	0,1436

Perkembangan Nilai CPUE di Pantai Timur Tahun 2000 – 2005

TAHUN	PRODUKSI (ton)	UPAYA (trip)	CPUE (ton/trip)
2000	55.341,60	186.619	0,2965
2001	50.009,00	261.534	0,1912
2002	42.843,10	483.422	0,0886
2003	65.753,70	770.698	0,0853
2004	52.762,50	482.805	0,1093
2005	47,612,70	441.972	0,1077
Rata-rata	52.387	437.016	0,1465



Upaya penangkapan (effort dalam trip) dengan produksi di Pantai Barat yang menunjukkan posisi upaya (trip) optimum (fopt=garis panah) pada 1.641.000 trip. dengan MSY pada tingkat produksi 134.644 ton per tahun, sehingga perairan Pantai Barat mengalami under fishing

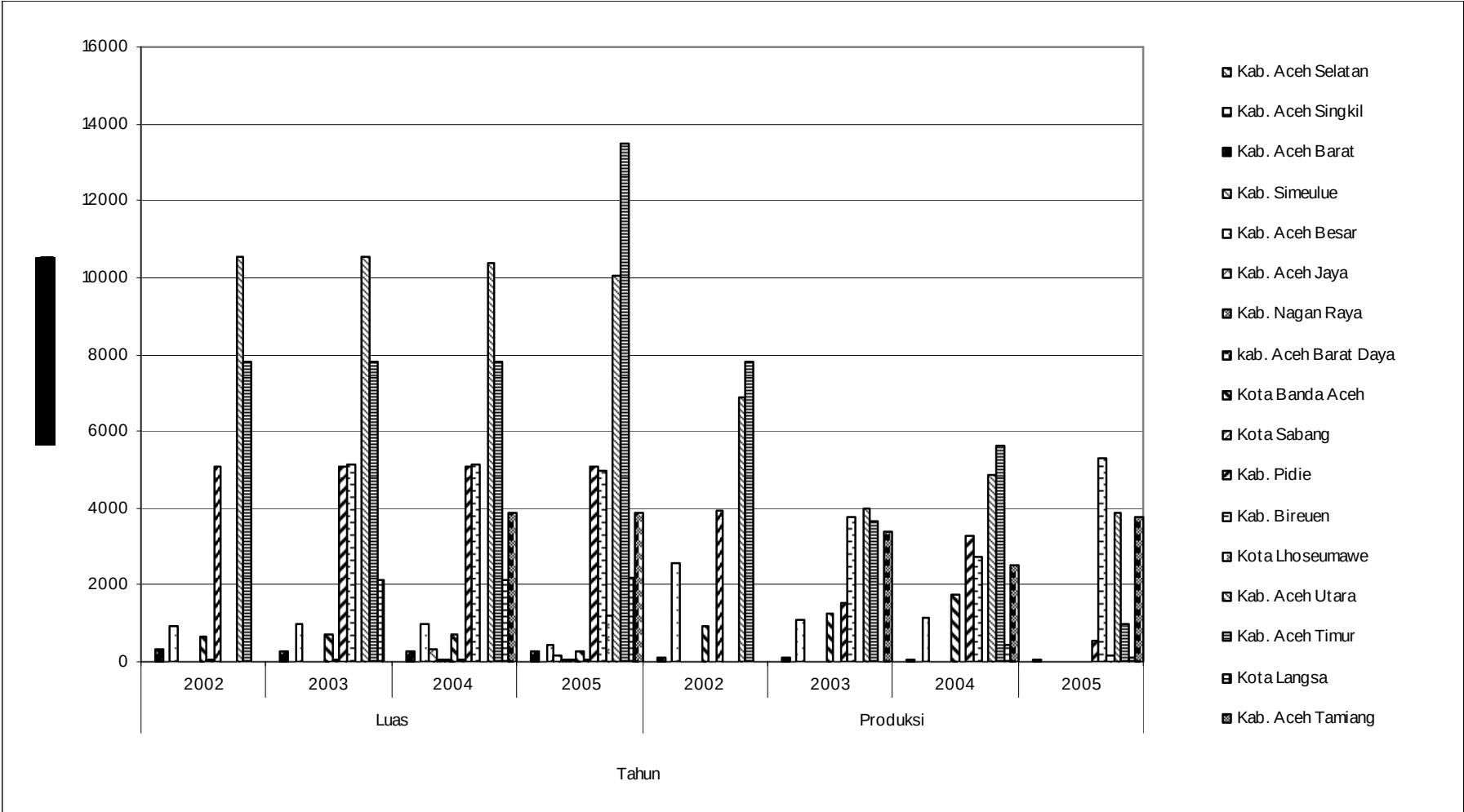


Upaya penangkapan (effort dalam trip) dengan produksi di Pantai Timur yang menunjukkan posisi upaya (trip) optimum (fopt=garis panah) pada 489.833 trip dengan MSY pada tingkat produksi 71.981 ton per tahun sehingga perairan Pantai Timur telah mengalami over fishing

Perkembangan luas dan produksi tambak selama tahun 2002 – 2005

No	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)				Produksi (ton)			
		2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005
Jumlah Total		25.357	32.739	36.916,9	42.153,6	22.292,9	18.779,3	22.374,6	14.848,6
Pantai Barat		1.959	2.072,3	2.523,6	1.338,2	3.665,6	2.485,3	2.982	72,5
1.	Kabupaten Aceh Selatan	25	25	25	25	25,4	10,9	19,6	16,7
2.	Kabupaten Aceh Singkil	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kabupaten Aceh Barat	337	289	289	289	133,8	110,3	33	36,2
4.	Kabupaten Simeulue	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kabupaten Aceh Besar	902	1.006	1.005	427	2.573,1	1.116,1	1.152,6	-
6.	Kabupaten Aceh Jaya	-	-	342	150,2	-	-	-	-
7.	Kabupaten Nagan Raya	-	-	53,3	53,3	-	-	-	-
8.	Kabupaten Aceh Barat Daya	-	-	57	57	-	-	-	9,1
9.	Kota Banda Aceh	667	724,3	724,3	289,7	920,8	1.234	1.759	-
10.	Kota Sabang	28	28	28	47	12,5	14	17,8	10,5
Pantai Timur		23.398	30.666,7	34.393,3	40.815,4	18.627,3	16.294	19.392,6	14.776,1
11.	Kabupaten Pidie	5.056	5.056	5.056	5.056	3.936,7	1.551	3.269,5	522
12.	Kabupaten Bireuen	-	5.146,7	5.159,7	4.945,7	-	3.757,1	2.705,4	5.291,2
13.	Kota Lhokseumawe	-	-	-	1.209	-	-	-	163,6
14.	Kabupaten Aceh Utara	10.520	10.520	10.375,6	10.063,7	6.872,2	3.960,2	4.866,3	3.895,9
15.	Kabupaten Aceh Timur	7.822	7.822	7.822	13.480	7.818,4	3.658	5.645	1.005,3
16.	Kota Langsa	-	2.122	2.122	2.203	-	-	413,4	124,1
17.	Kabupaten Aceh Tamiang	-	-	3.858	3.858	-	3.367,7	2.493	3.774

Grafik luas dan produksi tambak



Komoditi unggulan Budidaya tambak

No	Jenis Ikan	Tahun			
		2002	2003	2004	2005
1	Sidat	542		1.5	
2	Bandeng	7014.4	6131.4	8844.2	6379
3	Belanak	469.7	335.8	140.3	14.9
4	Kakap	440.5	464.2	995.9	602.4
5	Mujair	1508.3	404.7	2059.9	1648.1
6	Tawes	38.2			70.8
7	Udang windu	5379.3	7983.7	5733.5	3988.8
8	Udang putih	2984	1066.7	1429.4	290.6
9	Udang Api-api	1635.3	584.5	401	297.6
10	Rebon	207.1	257.1	144.1	131.8
11	Kepiting	295	565.9	1359.9	735.4
12	Rajungan		0.9	1.8	1
Jumlah		20513.8	17794.9	21111.5	14160.4



Potensi Budidaya laut

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kultivan	Keterangan
1.	Aceh Utara	Kerapu	
2.	Aceh Timur	Kerapu	
3.	Bireuen	Kerapu	Samalanga
4.	Sigli	Kerapu	
5.	Simeuleu Cut	Lobster	
6.	Aceh Besar	Lobster	
7.	Aceh Singkil	Lobster	Pulau Banyak
8.	Aceh Singkil	Rumput Laut	Pulau Banyak
9.	Aceh Singkil	Rumput Laut	Pulau Banyak
10.	Aceh Besar	Rumput Laut	



Habitat Vital Ekosistem Pesisir

- Terumbu Karang
- Mangrove
- Padang Lamun
- Rawa Payau
- Estuari
- Laguna
- Spawning Ground Udang

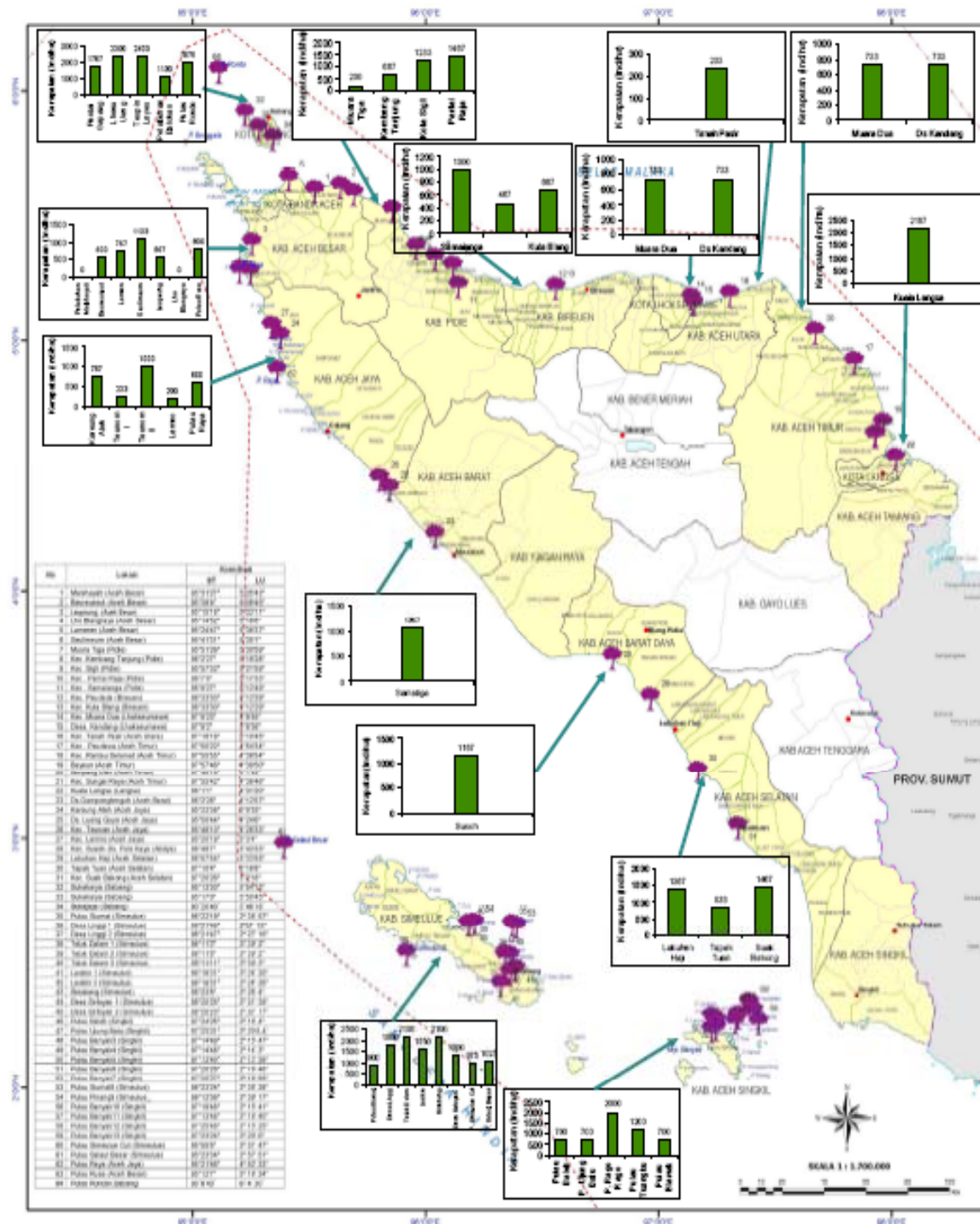
Biota Dilindungi

- Penyu Hijau | P. Salaut Besar, P. Banyak, P. Aceh
- Penyu Belimbing
- Ikan Napoleon (P. Simeulue
- Kima (P. Banyak, P. Simeulue, P. Weh, P. Aceh)
- Dugong/Duyung/Lumba-Lumba (P. Banyak, P. Simeulue, P. Aceh, P. Bangkaru)
- Buaya Rawa (Singkil)

Vegetasi Pesisir

61 spesies flora terdiri dari 10 spesies komponen mayor mangrove, 5 komponen minor mangrove dan 46 komponen mangrove asosiasi (vegetasi pesisir pantai)

Kerapatan rata-rata vegetasi pesisir yang termasuk dalam kategori pohon di Provinsi NAD berkisar antara 233 – 2167 ind/ha



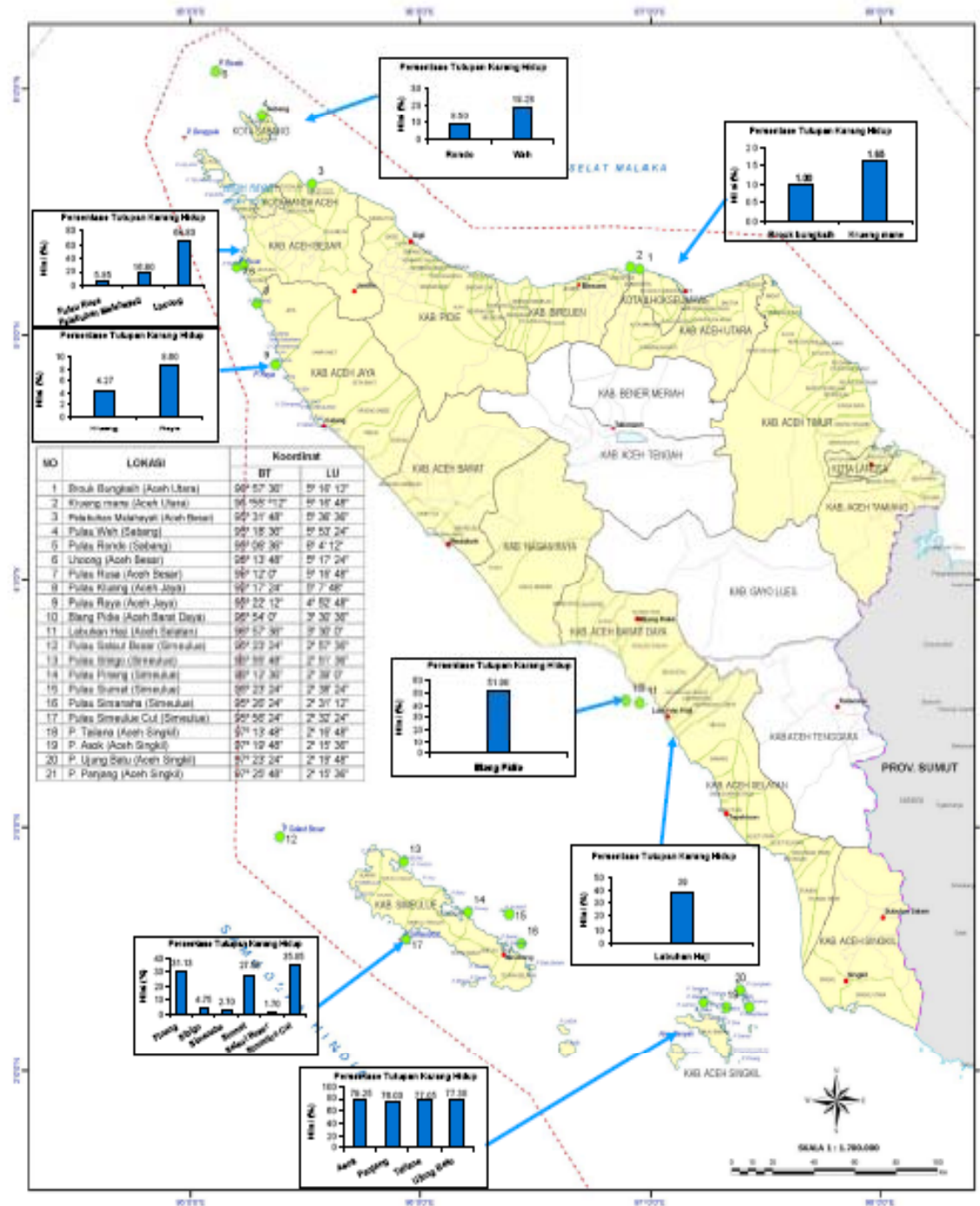
Lokasi Survey



Lokasi Survey Mangrove

Terumbu Karang

Sebagian besar karang dalam kondisi rusak. Karang dalam kondisi baik sekali (tutupan karang hidup 76%-100%) dapat ditemukan di perairan Kepulauan Banyak (Kab. Aceh Singkil), sedangkan karang dengan kondisi baik (tutupan karang hidup 51%-75%) dapat ditemukan di perairan Lhoong (Kab. Aceh Besar), Blang Pidie (Kab. Aceh Barat Daya) dan Pulau Siumat (Kab. Simeulue).



Lokasi Survey



Lokasi Survey Terumbu Karang

Ekosistem Terumbu Karang

- Sebaran terumbu karang sebagian besar terdapat di pantai barat dan sebagian kecil di pantai timur.
- Terumbu karang di pantai barat ditemukan sebagai terumbu tepi, gosong dan pulau-pulau kecil a.l. di Lhok Nga, Lhoong, Kreung Sabee (P. Kluang), Blang Pidie, Labuhan Haji dan Pulau Banyak.
- Terumbu karang di pantai timur sebagian besar terdapat di Sabang, sekitar Pelabuhan Malahayati (Ujung Arahmanyang) dan Karang Bungkaih (Muara Baru).

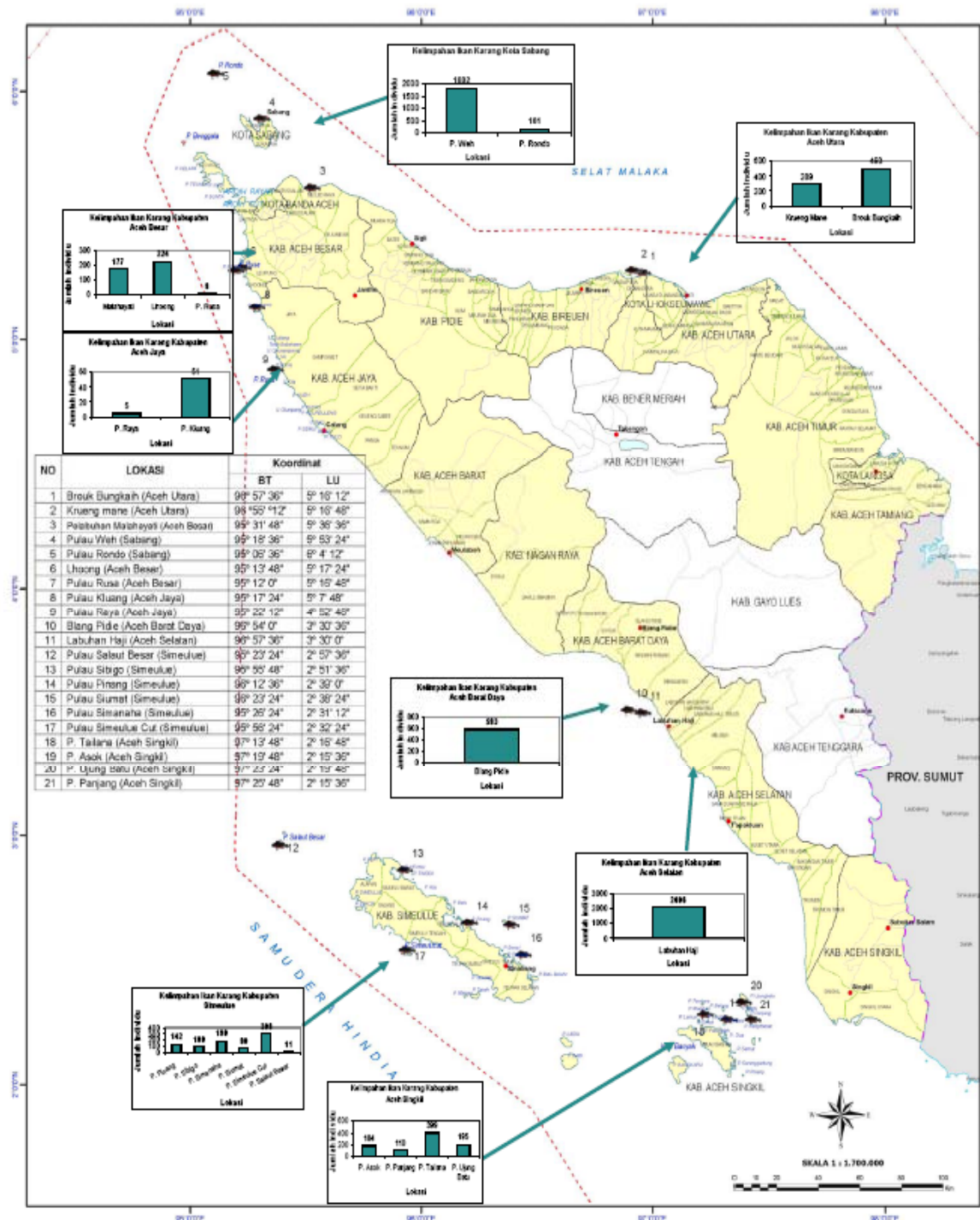


Kondisi terumbu karang di Prov. NAD

Ikan Karang

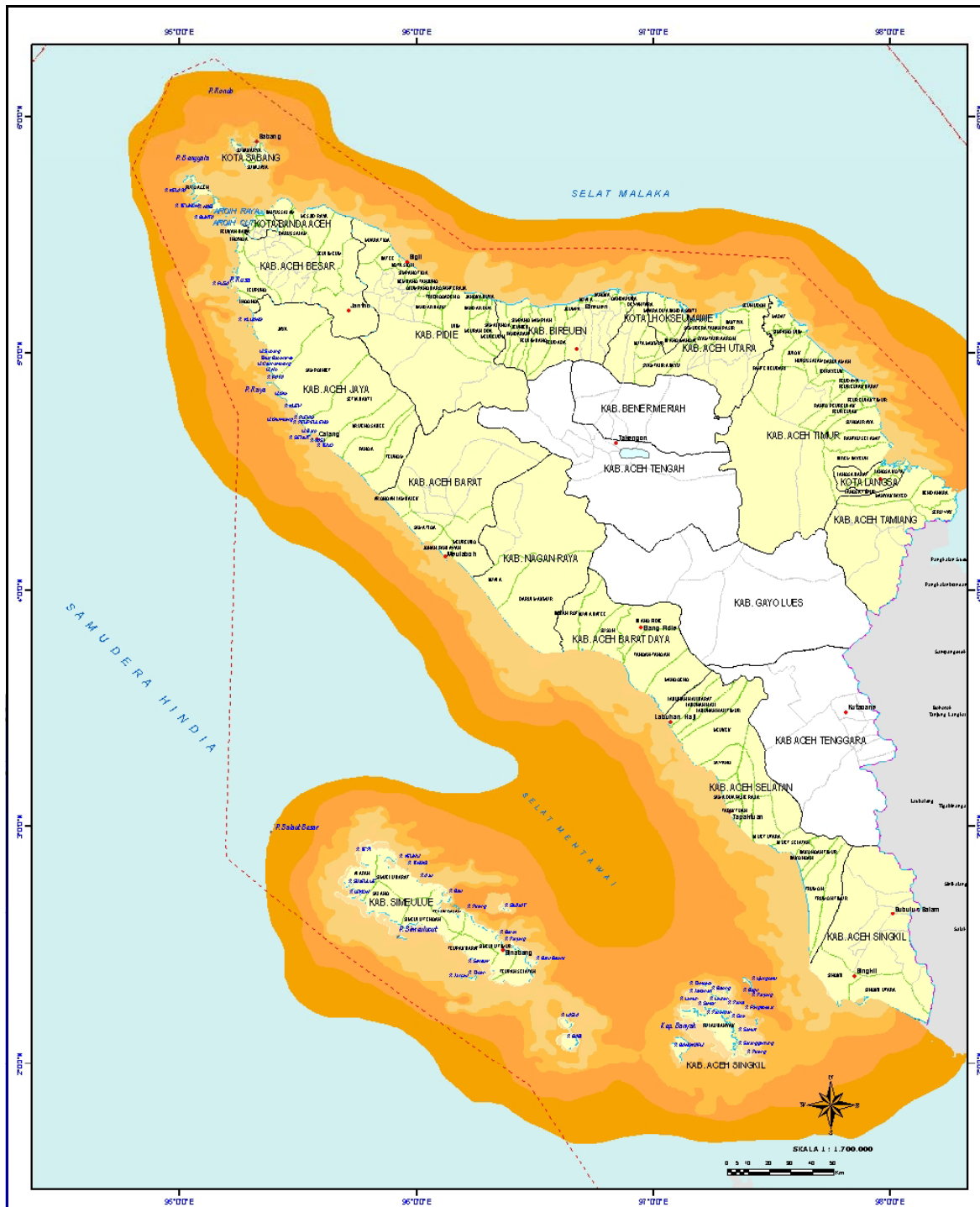
Rata-rata kelimpahan tertinggi ditemukan di lokasi sampling Kab. Aceh Selatan, yaitu 2096 ind/100 m², sementara rata-rata kelimpahan individu terkecil dimiliki oleh Kab. Aceh Jaya dengan hanya 28 individu/100 m²

Paling sering dijumpai (di 18 dari 21 lokasi sampling) adalah dari Famili Pomacentridae/ ikan *betok* dengan rata-rata kelimpahan sebesar 117,81 ind/100 m²



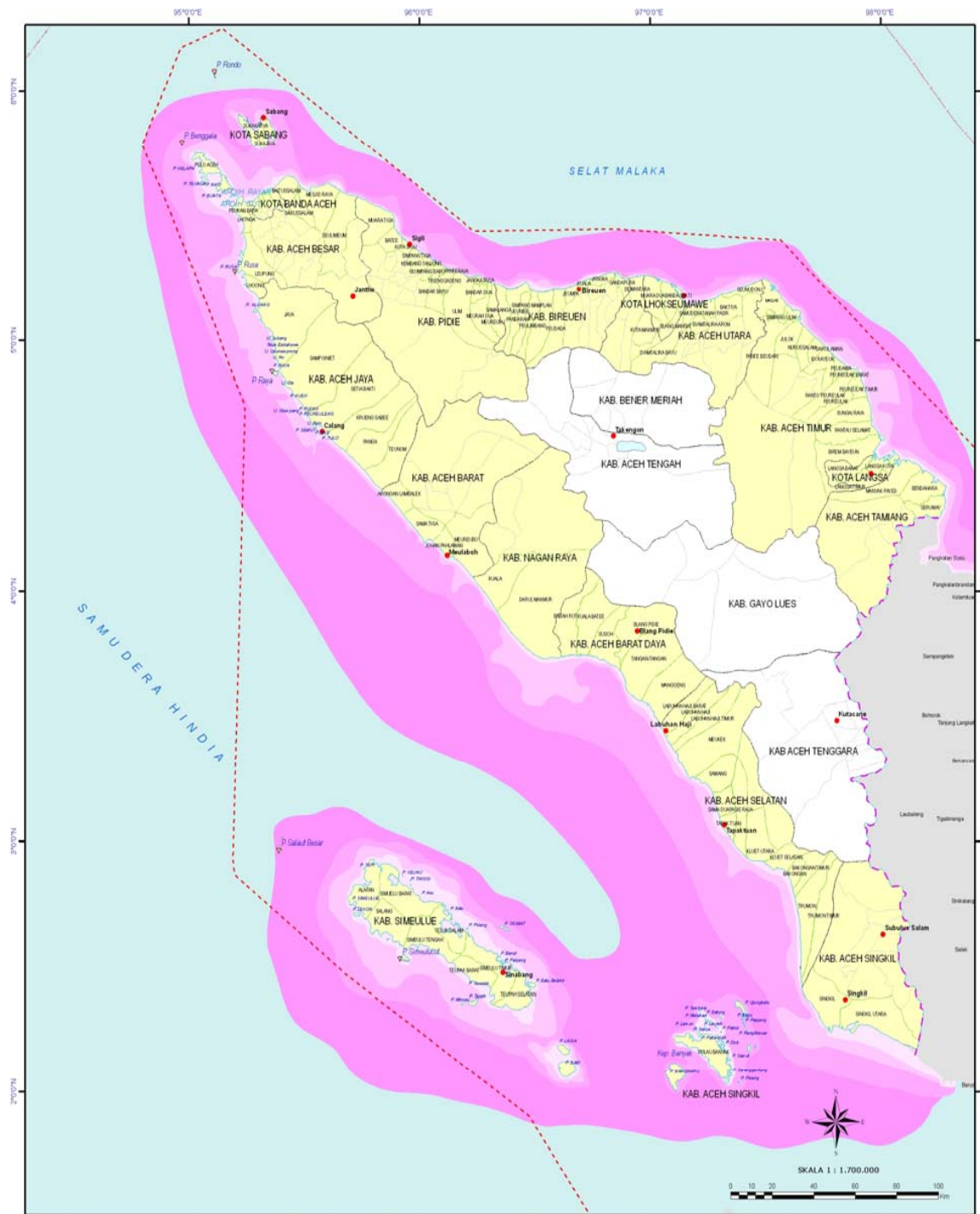
Kualitas Perairan

Sebaran DO



Oksigen Terlarut (DO)

	5.75 - 6.00
	6.00 - 6.25
	6.25 - 6.5
	6.50 - 6.75
	6.75 - 7.00
	7.00 - 7.25
	7.25 - 7.50



Kualitas Perairan

Sebaran Kecerahan

Kecerahan (Meter)

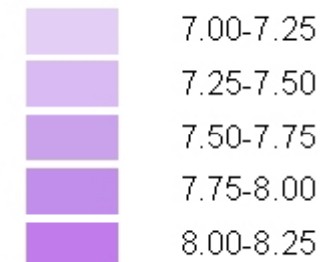
	0 - 4
	4 - 8
	8 - 12
	12 - 16

Kualitas Perairan

Sebaran pH



pH



Kualitas Perairan

Sebaran Salinitas



Kualitas Perairan

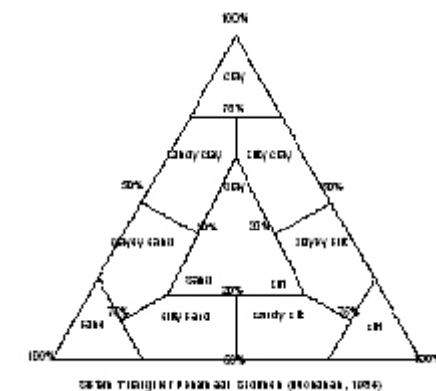
Sebaran Sedimen



SEDIMEN PERMUKAAN DASAR PERAIRAN

CSZ	Lanau Pasiran Lempungan (Clayey Sandy Silty)	CS	Pasir Lempungan (Clayey Sand)
SZ	Lanau Pasiran (Sandy Silty)	ZS	Pasir Lanau (Silty Sand)
CSZ	Pasir Lanau Lempungan (Clayey Silty Sand)	G	Kerikil (Gravel)
S	Pasir (Sand)		

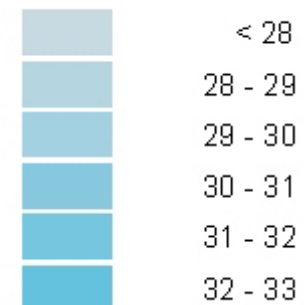
DARA PENENTUAN JENIS SEDIMEN PERMUKAAN
DASAR PERAIRAN MENURUT BUCHANAN, 1964



Kualitas Perairan

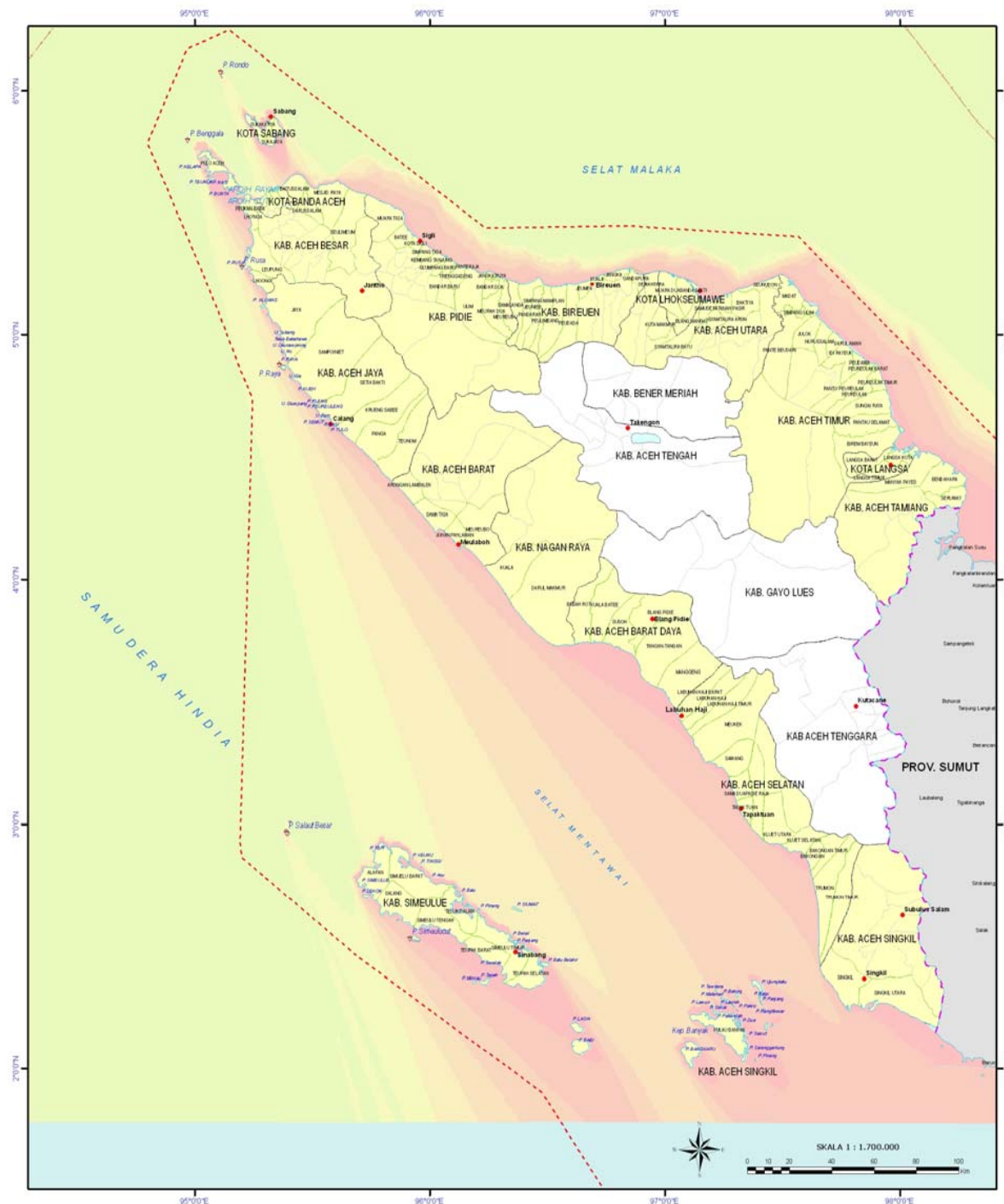
Sebaran Temperatur

Temperatur (° C)



Hidro-Oceanografi

Model Gelombang



Legenda :

Gelombang (Meter)

	0.0 - 0.3
	0.3 - 0.6
	0.6 - 0.9
	0.9 - 1.2
	1.2 - 1.5
	1.5 - 1.8
	1.8 - 2.1
	2.1 - 2.4

Arah Gelombang (°)



KONDISI PASUT



PASANG PRELUIS SURUT

Kondisi Hidro-oseanografi

1. Arus

Sirkulasi arus perairan Prov. NAD mengikuti sistem Sirkulasi Arus Equatorial Selatan. Pergerakan arus terbesar terjadi pada bulan Agustus, ketika arus ini membentuk Arus Monsun di bagian equatorial Samudera Hindia. Pada bulan ini, arus khatulistiwa bergerak dari dekat dari Pantai Jawa sebelah selatan menuju hingga ke barat perairan NAD, tetapi melemah pada saat mencapai barat daya, ketika bertemu dengan massa air dari arus monsun yang datang dari utara (Teluk Benggala).

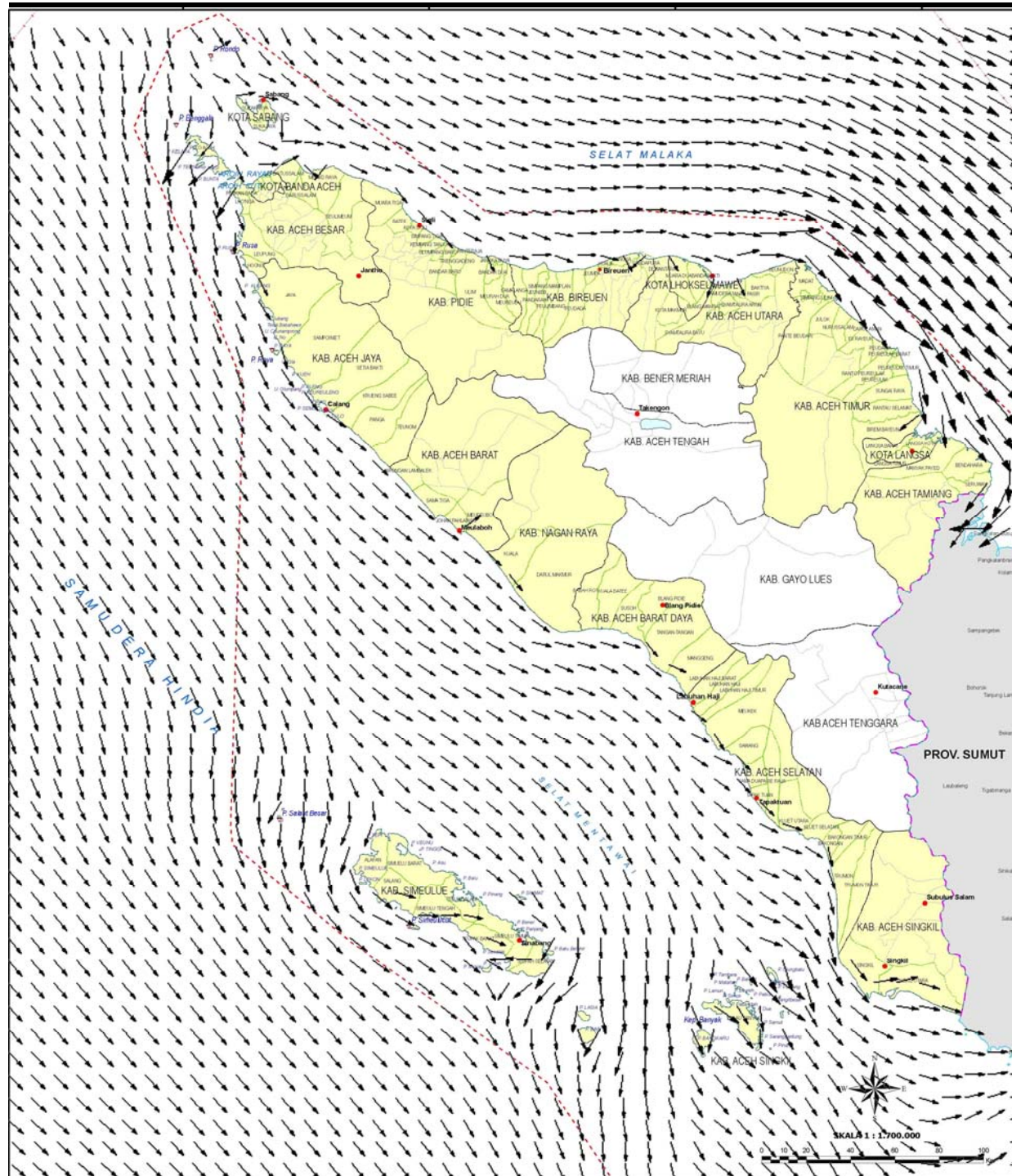
2. Gelombang

- Termasuk dalam gelombang laut transisi.
- Periode gelombang memiliki nilai berkisar antara 1 - 8 detik.
- Tinggi gelombang harian perairan bagian barat lebih tinggi dibanding perairan bagian timur NAD, hal ini disebabkan karena perairan bagian barat NAD terletak di perairan terbuka, sedangkan perairan bagian timur NAD terletak pada daerah perairan yang lebih terlindung (terletak di daerah selat).

Hidro-Oceanografi

Model Arus :

Keadaan Arus saat
spring, menuju
pasang.



PETA ARUS

KONDISI ARUS SAAT SURUT MENUJU PASANG
TIME STEP : 140 400

KONDISI PASUT



SURUT MENUJU PASANG
(SPRING TIDE)

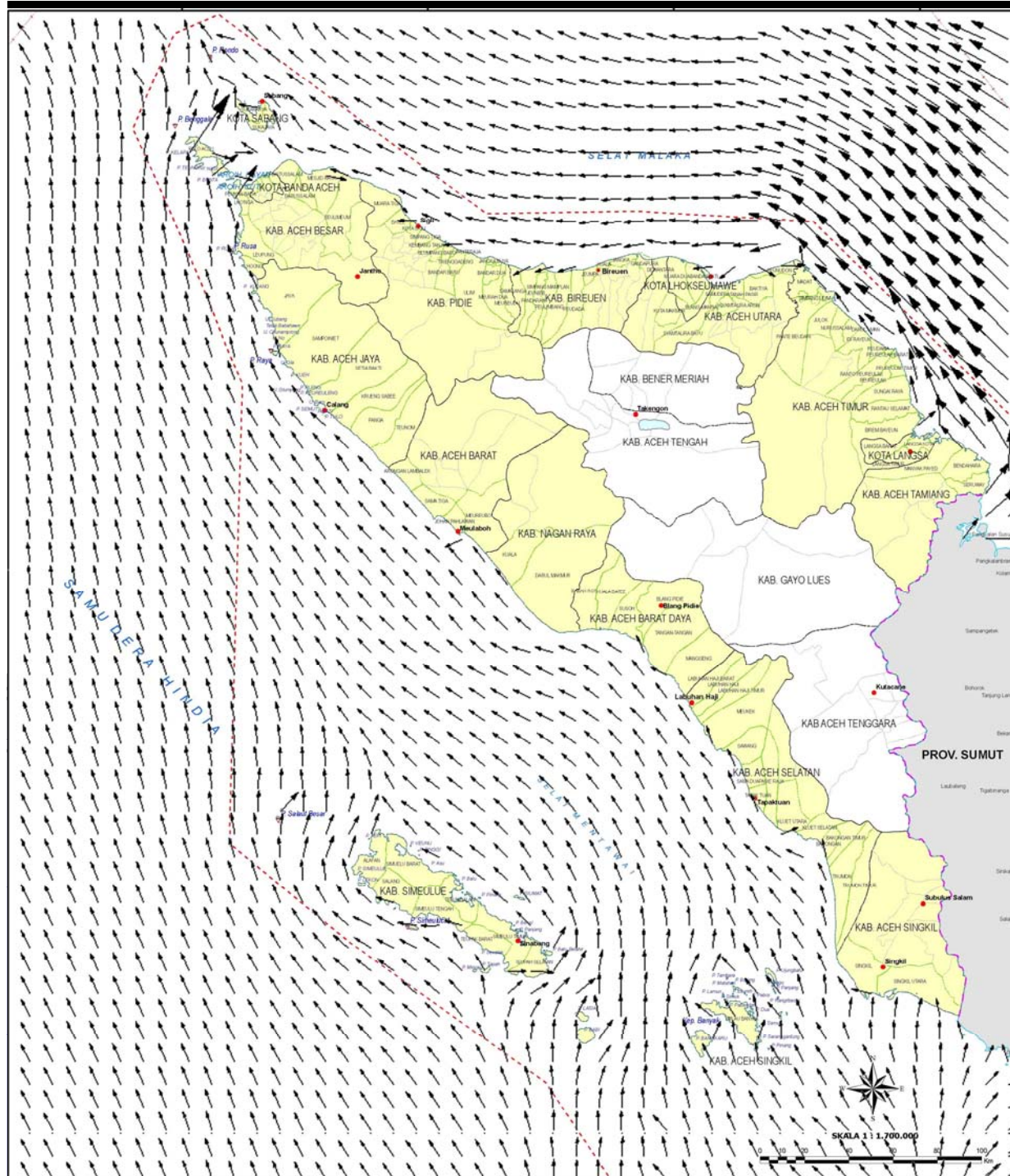
Skala Vektor

→ : 0.1 m/s

Hidro-Oceanografi

Model Arus :

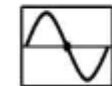
Keadaan Arus saat
spring, menuju
surut



PETA ARUS

KONDISI ARUS SAAT PASANG MENUJU SURUT
TIME STEP : 162 000

KONDISI PASUT

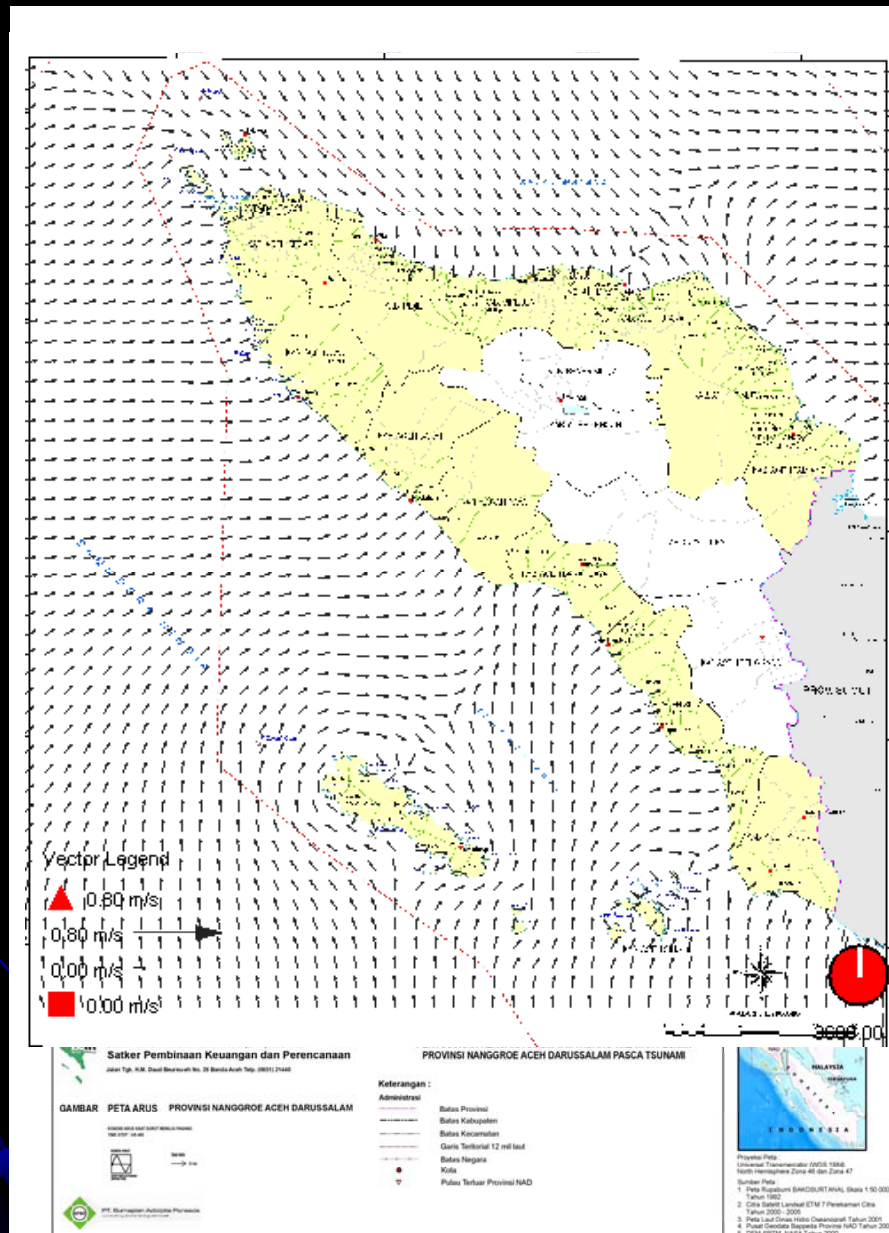


PASANG MELEKAI SURUT
(SPRING TIDE)

Skala Vektor

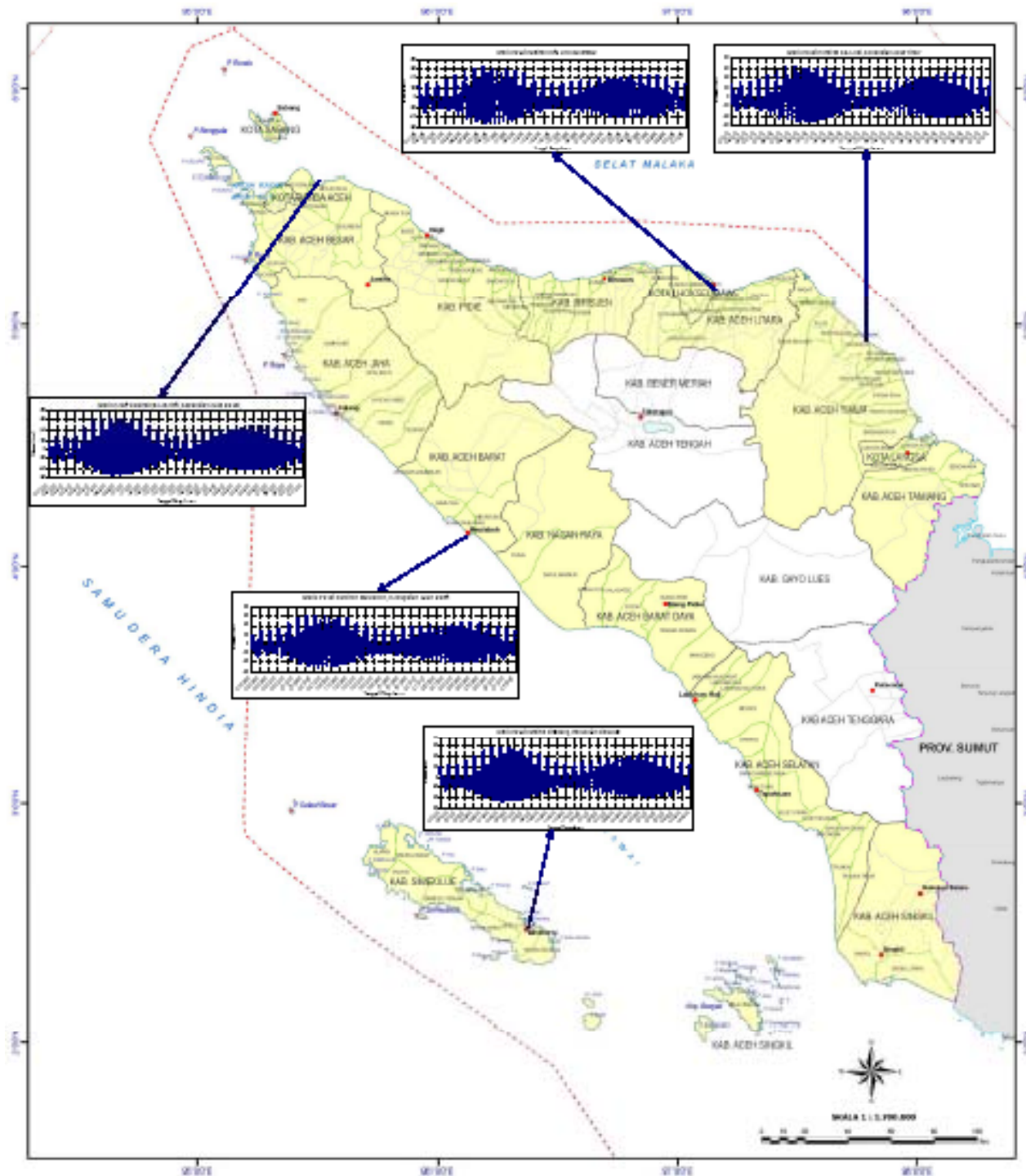
→ : 0.1 m/s

Hasil Simulasi Model Arus Selama 30 Hari

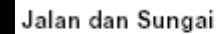


Pasang Surut

Tipe Pasut :
Campuran,
condong ke
harian ganda



Kabel dan Pipa Bawah Laut



- | | |
|---|----------------|
| | Jalan Nasional |
| | Sungai Kecil |
| | Sungai Besar |

Kabel dan Pipa

-  Pipa Bawah Laut
-  Kabel Bawah Laut

Angin

Stasiun Malikussaleh, Lhokseumawe :

Kecepatan Angin : 1-3
m/det

Arah Terbanyak : Timur

Stasiun Meulaboh, Aceh Barat:

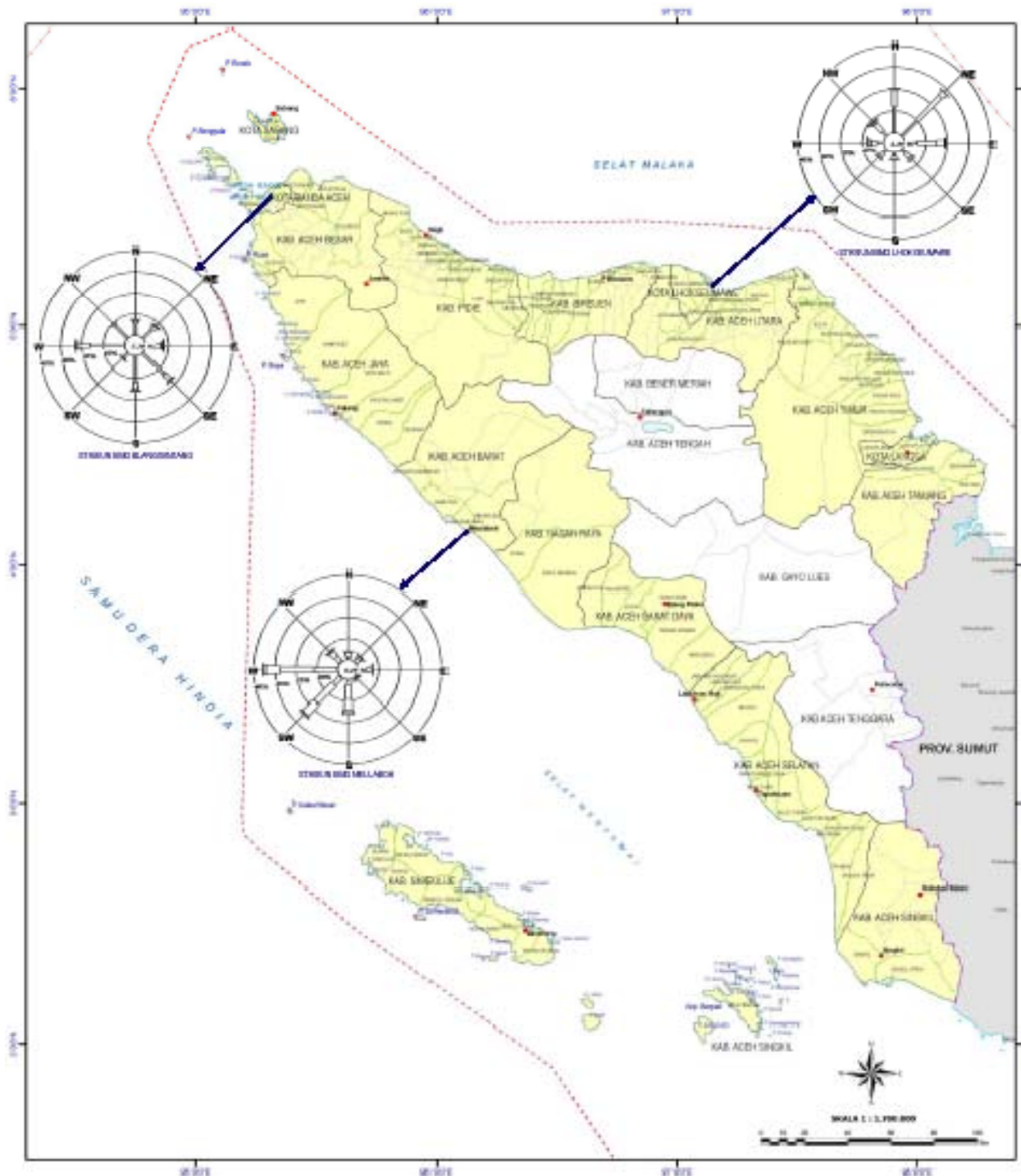
Kecepatan Angin : 5-7
m/det

Arah Terbanyak : Barat

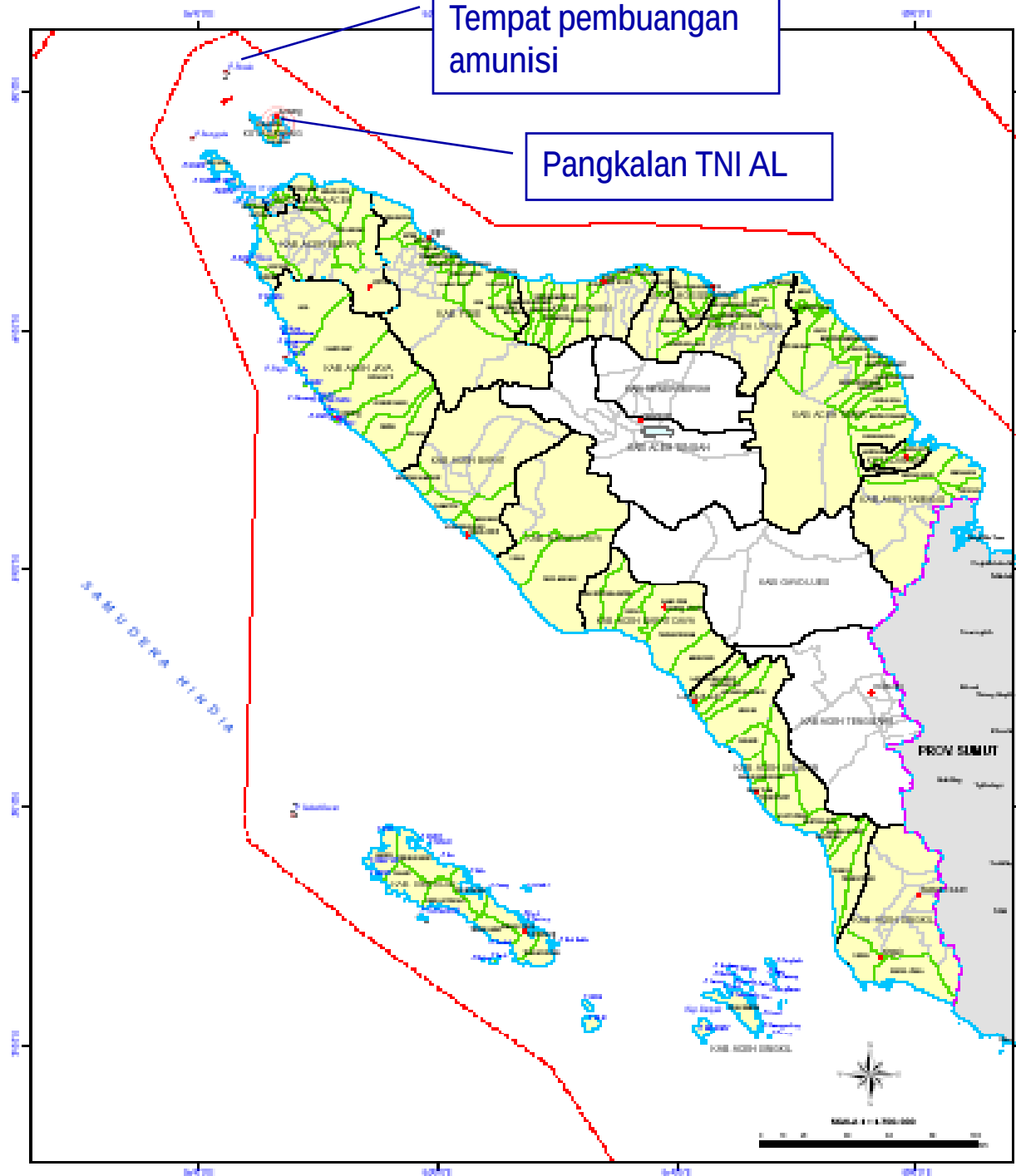
Stasiun Blang Bintang, Aceh Besar

Kecepatan Angin : 1-3
m/det

Arah Trebanyak : Barat



Sarana dan Prasarana Khusus

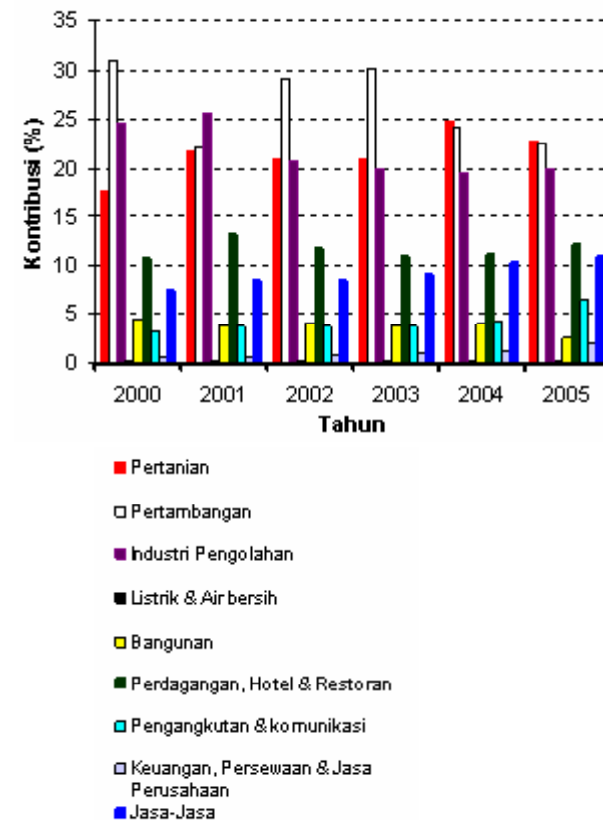


ANALISIS KECENDERUNGAN PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN

Struktur Perekonomian NAD 2000-2005

Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1. Pertanian	17.68	21.8	20.86	20.95	24.76	22.83
2. Pertambangan	30.95	22.2	29.08	30.03	24.28	22.56
a. Minyak dan Gas Bumi	30.53	21.7	28.58	29.54	23.72	21.87
b. Penggalian dan penggaraman	0.42	0.5	0.5	0.49	0.56	0.69
3. Industri Pengolahan	24.7	25.68	20.82	19.93	19.46	20.04
a. Industri Migas	19.79	21.92	15.39	14.9	16.41	17
b. Industri Tanpa Migas	4.92	3.76	5.44	5.03	3.05	3.04
4. Listrik & Air bersih	0.11	0.14	0.16	0.21	0.24	0.22
5. Bangunan	4.43	3.88	4.01	3.85	4.16	2.59
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	10.86	13.2	11.89	11.08	11.22	12.22
7. Pengangkutan & komunikasi	3.21	3.77	3.82	3.83	4.3	6.57
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0.59	0.71	0.88	1.01	1.15	2.04
9. Jasa-Jasa	7.48	8.61	8.47	9.12	10.43	10.92
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase PDRB Tanpa Migas	49.69	56.38	56.03	55.56	59.87	61.14

Peranan sektor non migas pada tahun 2000 sekitar 49,69% meningkat menjadi 61,14% tahun 2005. Hal ini disebabkan oleh penurunan kontribusi sektor migas dari 30,53% pada tahun 2000 menjadi 21,87% di tahun 2005, sedangkan sektor pertanian cenderung meningkat dari 17,68% pada tahun 2000 menjadi 22,83% di tahun 2005

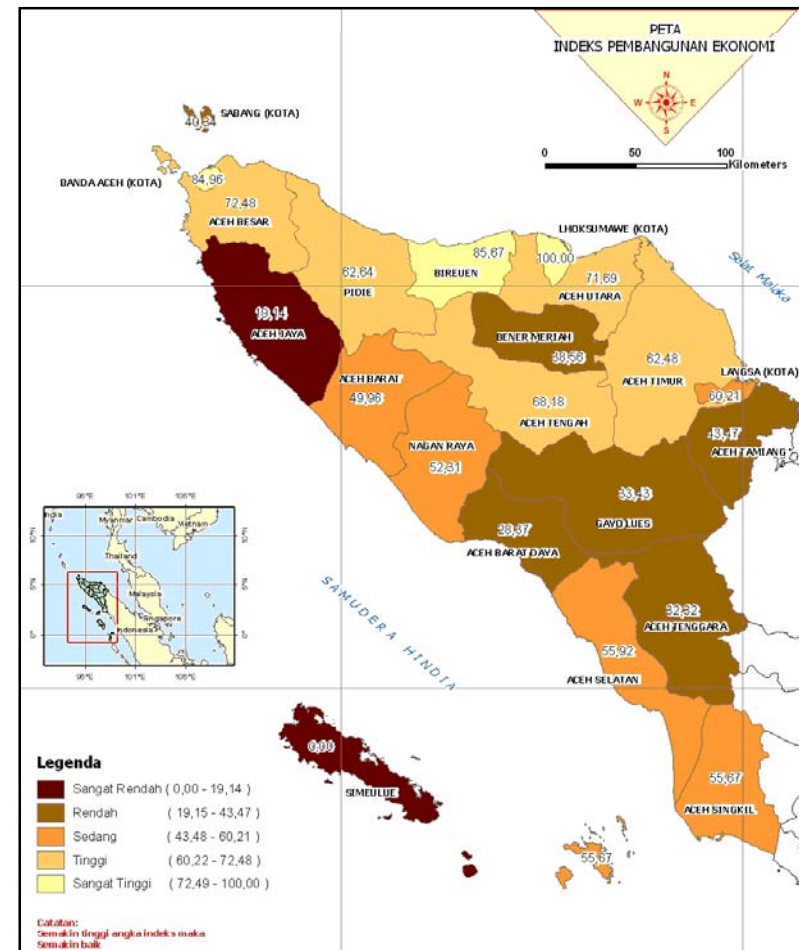


Indeks Pembangunan Ekonomi

Kota Banda Aceh, Sigli, Bireun, Lhoksumawe, Langsa dan Kuala Simpang pertumbuhannya relatif lebih cepat dibandingkan wilayah pesisir barat seperti: Calang, Meulaboh, Tapaktuan, dan Singkil yang relatif lebih lambat.

Pertumbuhan paling lambat: Aceh Jaya dan Simeulue

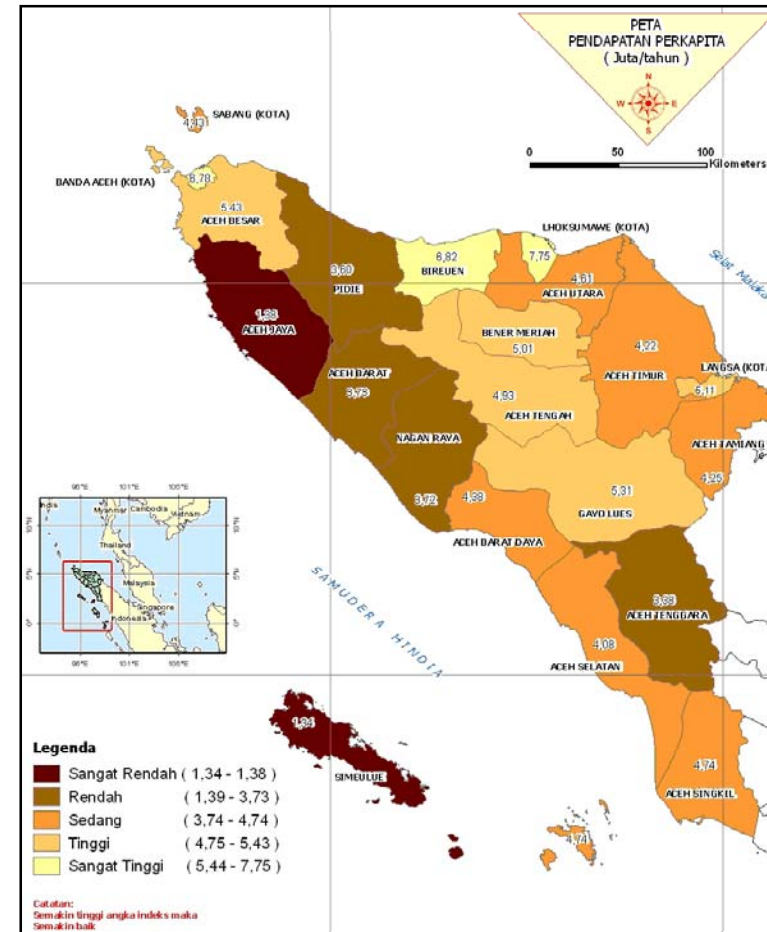
Pertumbuhan paling cepat: Banda Aceh, Bireuen dan Lhokseumawe



Indeks Pendapatan Per kapita

Daerah dengan pendapatan per kapita tertinggi: Kota Lhoksumawe (Rp. 7,75 juta), Kabupaten Bireun (Rp. 6,82 juta) dan Kota Banda Aceh (Rp. 6,78 juta).

Daerah dengan pendapatan per kapita sangat rendah (daerah tertinggal): Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Jaya. Masing-masing pendapatan per kapita hanya sebesar Rp. 1,34 juta dan Rp. 3,72 juta per tahun.

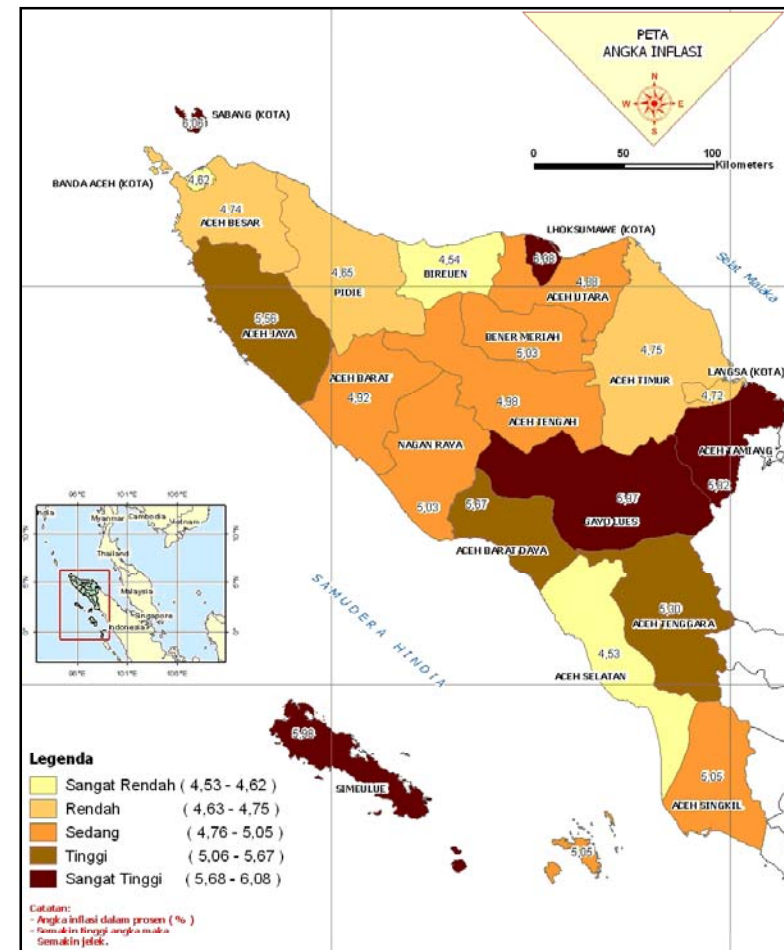


Laju Inflasi

Laju inflasi Provinsi NAD sebesar 5,18%.

Kabupaten/Kota yang memiliki laju inflasi di atas laju inflasi NAD: Kota Lhoksumawe (6,08%), Sabang (6,06%) Simeulue (5,98%) dan Gayo Lues sebesar 5,97%. Merupakan daerah yang kurang stabil perekonomiannya.

Kabupaten/Kota yang laju inflasinya lebih rendah dari laju inflasi provinsi antara lain: Aceh Selatan (4,53%) dan Bireuen (4,54%).

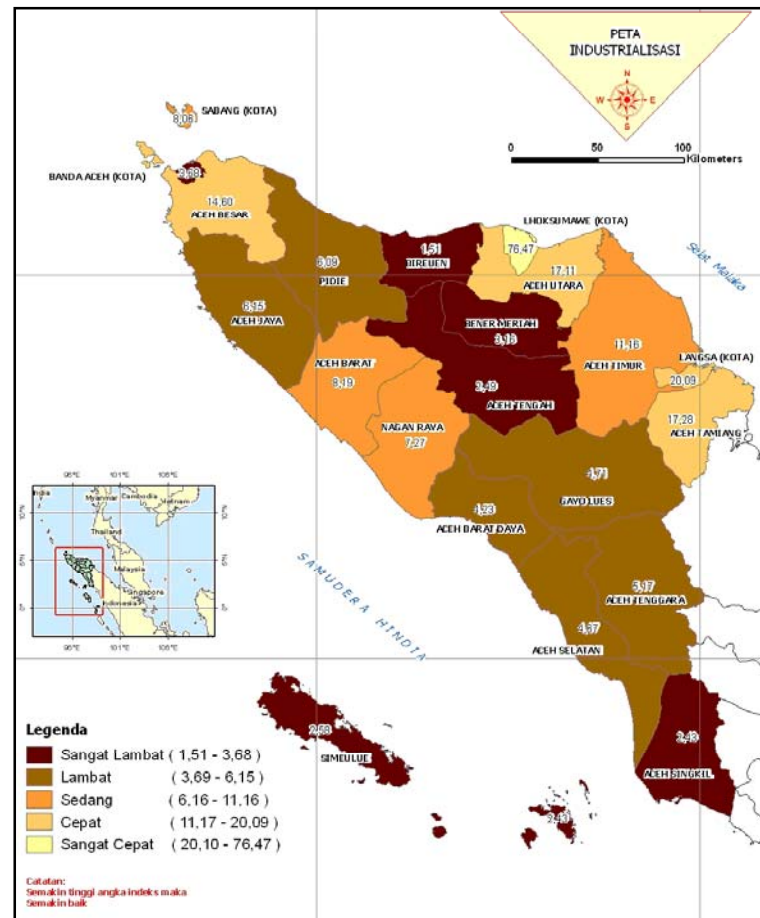


Analisis Industrialisasi

Nilai tambah industri pengolahan di Provinsi NAD sebagian besar berasal dari pengolahan gas.

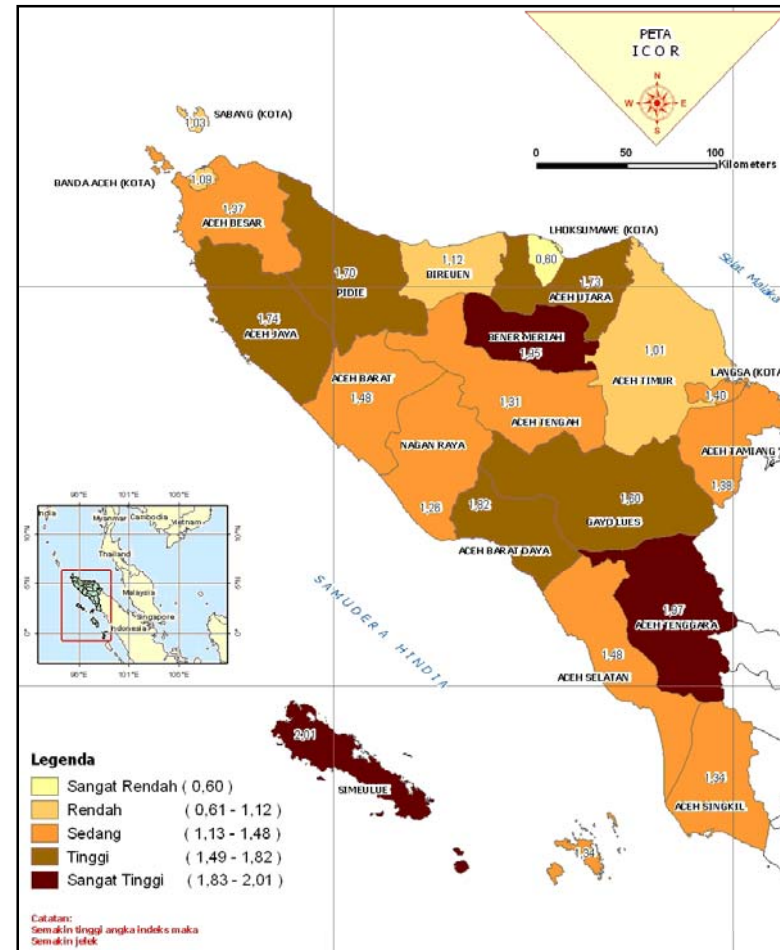
Kontribusi industri pengolahan di Provinsi NAD dari tahun 2000 sebesar 24,7% menurun pada tahun 2005 menjadi 20,04%. Menurunnya peranan industri pengolahan ini tidak terlepas dari semakin menurunnya peranan sub sektor industri gas alam cair dan sektor non migas.

Indeks industrialisasi di NAD tertinggi di Kabupaten Lhokseumawe dan terendah (perkembangan industri sangat lambat) adalah di Singkil dan Simeulue.



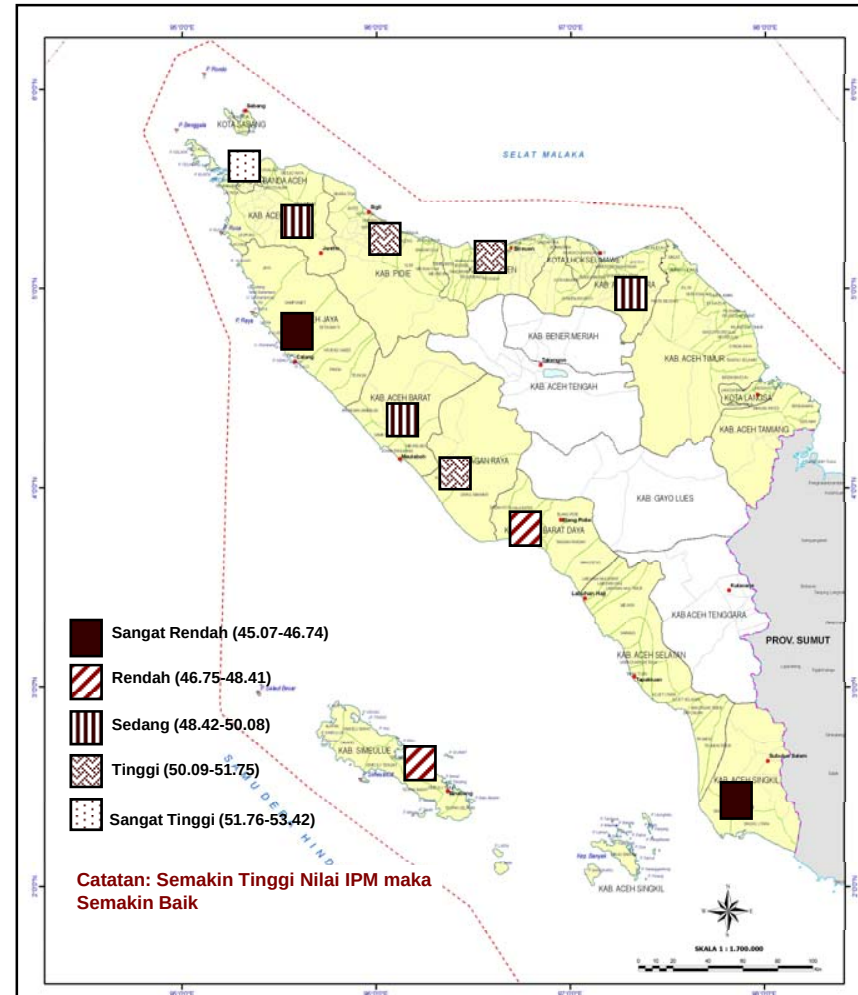
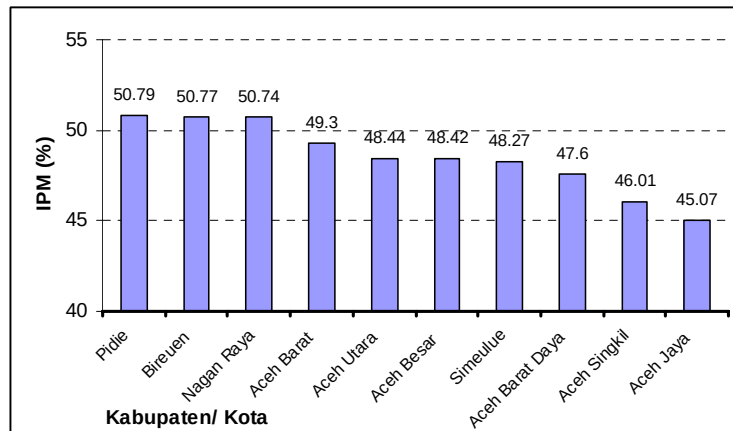
Analisis Efisiensi (ICOR)

Tingkat efisiensi investasi di seluruh NAD relatif sama, kecuali Kota Lhoksumawe yang investasinya jauh lebih efisien dibandingkan daerah lain (nilai ICOR=0.6). Sedangkan investasi yang tidak efisien adalah di Kabupaten Simeulue yang ditunjukkan dengan nilai ICOR 2,0, Bener Meriah dan Aceh Tenggara



Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nilai IPM tiap Kabupaten/Kota jika dibandingkan rata-rata IPM Wilayah Pesisir menunjukkan nilai di atas rata-rata (lebih dari 44.1) namun jika dibanding dengan nilai IPM rata-rata untuk Provinsi NAD tahun 2004 yaitu sebesar 62,0 maka dapat dikatakan bahwa IPM di wilayah pesisir secara keseluruhan masih di bawah rata-rata.



Gambar Indeks Pembangunan Manusia

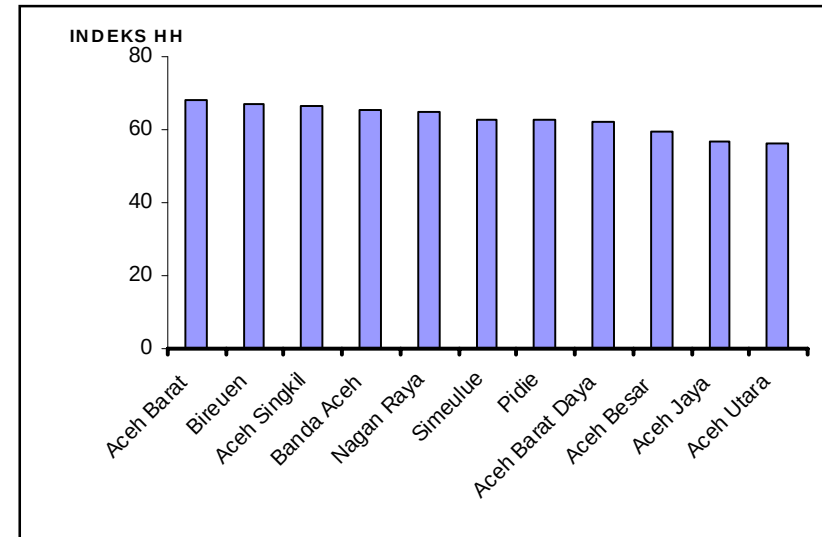
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di NAD Tahun 2051

No	Kabupaten/Kota	Indeks HH (%)	Indeks MH (%)	Indeks LS (%)	Indeks TP (%)	Indeks P (%)	IPM (%)	Keterangan
1	Banda Aceh	65,19	99,92	82,59	94,05	1,03	53,42	Sangat Tinggi
2	Pidie	62,44	96,52	74,89	89,22	0,71	50,79	Tinggi
3	Bireuen	67,13	96,5	59,81	84,19	1	50,77	Tinggi
4	Nagan Raya	64,67	94,44	72	86,87	0,69	50,74	Tinggi
5	Aceh Barat	68,23	86,85	63,33	78,93	0,74	49,3	Sedang
6	Aceh Utara	56,47	98,6	67,69	88,21	0,63	48,44	Sedang
7	Aceh Besar	59,44	97,14	61,11	85,04	0,76	48,42	Rendah
8	Simeulue	62,5	98,91	47,5	81,69	0,63	48,27	Rendah
9	Aceh Barat Daya	61,94	95,31	50	80,12	0,73	47,6	Rendah
10	Aceh Singkil	66,67	94,43	23,33	70,66	0,7	46,01	Sangat Rendah
11	Aceh Jaya	56,94	93,11	45,56	77,18	1,08	45,07	Sangat Rendah
	Rata-Rata	62,90	95,60	59,30	83,30	0,80	44.1	

INDEKS HARAPAN HIDUP

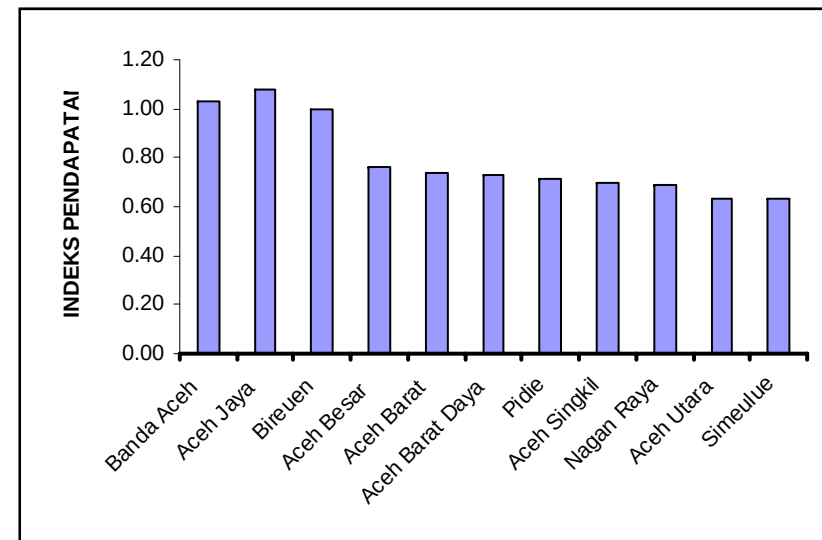
Indikator harapan hidup (HH) bawah rata-rata 62.90.

Kabupaten Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Pidie, dan Simeulue.



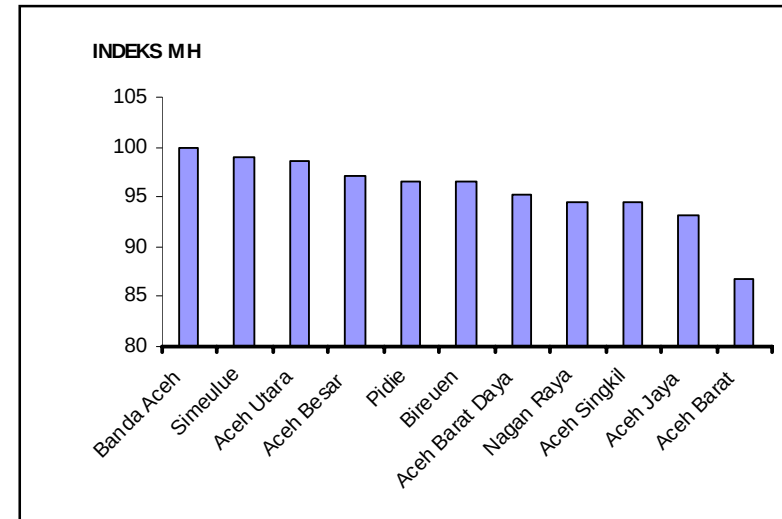
INDEKS PENDAPATAN

Indeks pendapatannya masih di bawah rata-rata, yaitu: Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Singkil, dan Simeulue.



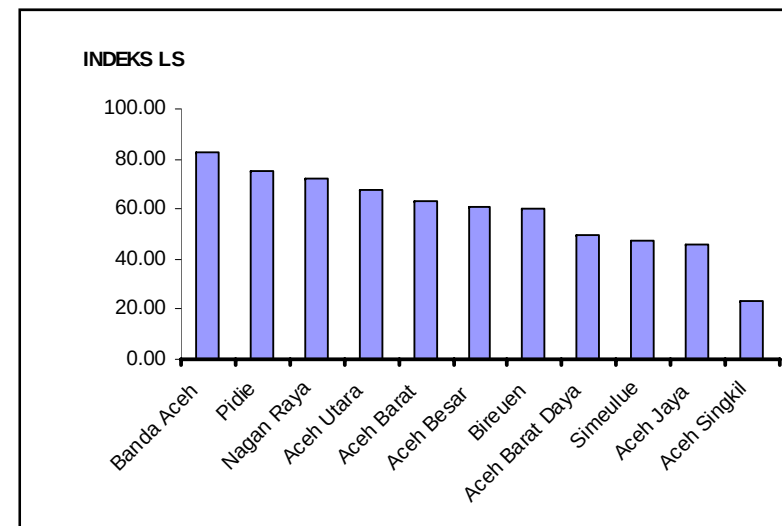
INDEKS MELEK HURUF

Indeks melek huruf (MH) di bawah rata-rata: Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya.



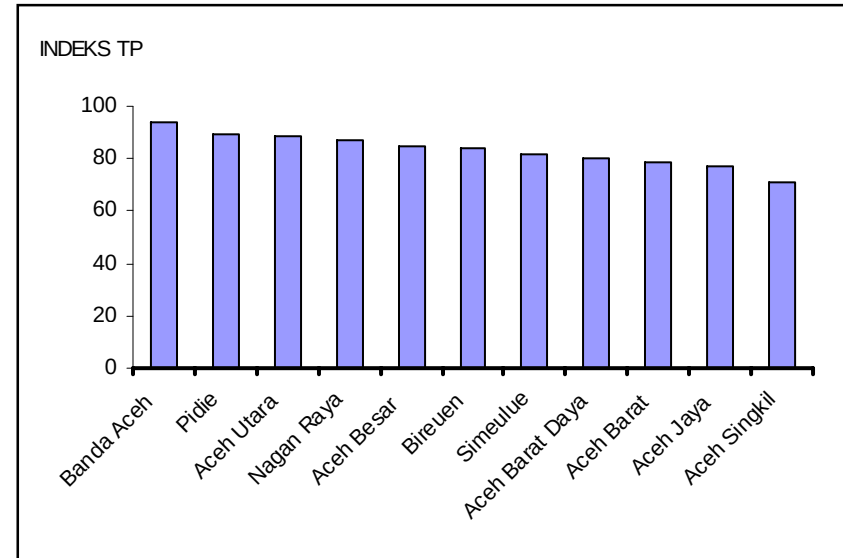
INDEKS LAMA SEKOLAH

Nilai indeks tingkat pendidikan di bawah nilai rata-rata Aceh Singkil, Aceh Jaya, Simeulue, dan Aceh Barat Daya.



INDEKS TINGKAT PENDIDIKAN

Nilai indeks tingkat pendidikan di bawah nilai rata-rata (di bawah 83,30): Aceh Singkil, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan Simeulue,



Temuan:

- Secara keseluruhan terjadi ketimpangan dalam pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir Provinsi NAD baik dalam hal kesehatan, akses terhadap pendidikan dan lapangan pekerjaan.
- Tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah pantai barat lebih rendah daripada masyarakat di wilayah pantai timur.

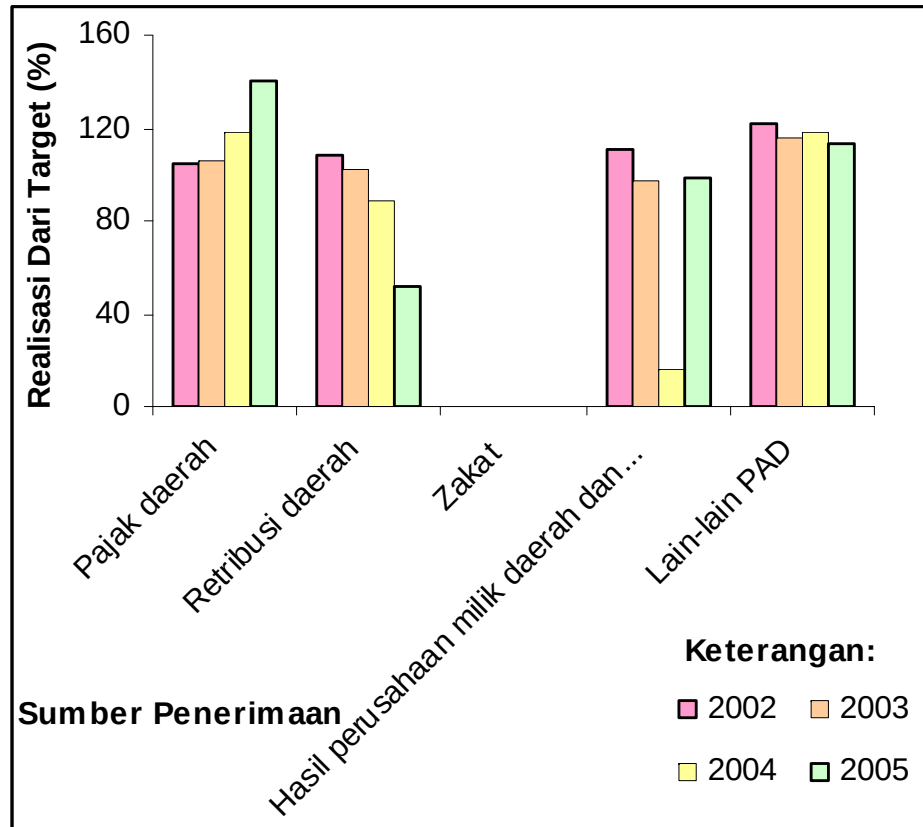
Pendapatan Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha 2002-2005

No	Lapangan Usaha	2001	2002	2003	2004	2005
1	Pertanian	3,31	2,13	3,27	6,04	8,88
2	Pertambangan dan Penggalian	-27,91	66,79	9,86	24,06	33,57
	a, Pertambangan migas	-28,30	68,01	9,93	24,41	34,11
	b, Penggalian dan penggaraman	0,00	3,56	3,65	7,28	0,78
3	Industri Pengolahan	-13,88	5,45	1,68	17,8	20,53
	a, Industri Migas	-9,46	-5,09	1,72	11,57	26,19
	b, Industri Tanpa Migas	-31,68	61,64	1,58	37,32	4,5
4	Listrik dan Air Minum	2,18	-3,16	16,98	19,53	1,83
5	Bangunan dan kontruksi	-24,95	13,28	0,95	0,92	23,96
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	11,33	2,18	2,46	2,68	12,23
7	Pengangkutan & Komunikasi	6,58	4,17	3,87	3,67	45,32
8	Bank dan Lembaga Keuangan	8,48	23,95	30,99	19,45	6,34
9	Jasa-Jasa	4,86	5,95	6,31	20,14	0,65
	PDRB	-10,73	20,07	5,52	-9,63	-13,45
	PDRB tanpa Migas	-0,44	7,96	3,70	1,76	1,20

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NAD dipengaruhi perkembangan sektor migas, industri pengolahan dan pengangkutan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

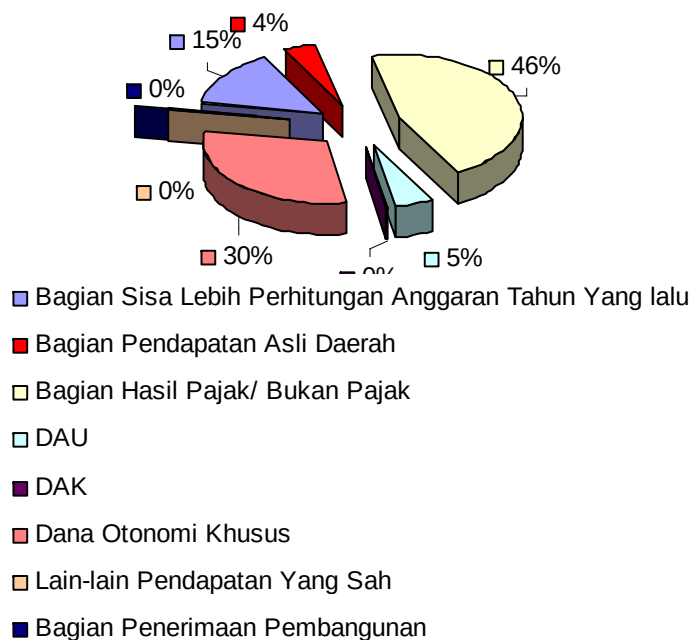


INDEKS TINGKAT PENDIDIKAN

Selama kurun waktu 2002 -2005 realisasi PAD Povinsi NAD lebih besar dari target PAD yang telah ditetapkan, terutama dari sektor Pajak Daerah dan Lain-lain PAD.

Sumber PAD yang belum dapat dioptimalkan adalah retribusi daerah yang cenderung mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang ditetapkan.

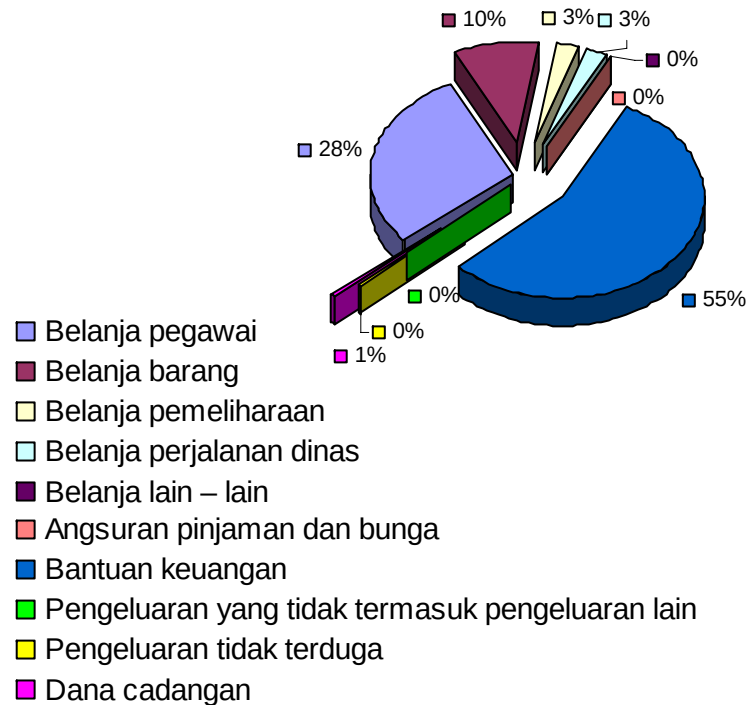
Sumber-sumber Penerimaan Daerah



NO	Uraian	Jumlah
1	Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang lalu	733,18
2	Bagian Pendapatan Asli Daerah	211,19
3	Bagian Hasil Pajak/ Bukan Pajak	2.300,16
4	Bagian Sumbangan dan Bantuan	
	a. DAU	271,15
	b. DAK	6,05
	C. Dana Otonomi Khusus	1.523,99
5	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	9,43
6	Bagian Penerimaan Pembangunan	0
Jumlah		5.055,15

Penerimaan daerah yang berasal dari PAD hanya sebesar Rp. 211,19 milyar rupiah dari penerimaan keseluruhan (4% dari total penerimaan). Penerimaan daerah paling banyak berasal dari Bagian hasil pajak/ bukan pajak (46% dari total penerimaan).

Realisasi Pengeluaran Keuangan



No	Jenis Pengeluaran	Jumlah (rp.)
1	Belanja pegawai	467.478.858.706,00
2	Belanja barang	155.682.385.202,00
3	Belanja pemeliharaan	40.323.465.171,00
4	Belanja perjalanan dinas	40.541.739.906,00
5	Belanja lain – lain	-
6	Angsuran pinjaman dan bunga	-
7	Bantuan keuangan	894.626.974.058,00
8	Pengeluaran yang tidak termasuk pengeluaran lain	-
9	Pengeluaran tidak terduga	1.850.000.000,00
10	Dana cadangan	10.039.216.700,00
Jumlah		1.610.542.639.743,00

Realisasi pengeluaran keuangan daerah paling banyak digunakan untuk bantuan keuangan (55%) dan belanja pegawai (26%).

Posisi Fiskal

Kemampuan desentralisasi fiskal baik di tingkat provinsi maupun pada level kabupaten/kota masih sangat kurang atau dapat dikatakan bahwa kemampuan keuangan daerah sangat rendah.

No	Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005	Rata-Rata
1	Simeulue	4.17	4.17	2.19	1.42	0.91	2.57
2	Aceh Singkil	2.15	3.14	2.13	1.98	1.54	2.19
3	Aceh Selatan	1.18	1.73	1.46	1.62	2.26	1.65
4	Aceh Tenggara	1.56	1.65	2.83	2.30	2.29	2.13
5	Aceh Timur	1.37	1.34	2.24	1.43	1.57	1.59
6	Aceh Tengah	1.87	1.65	2.30	2.17	2.91	2.18
7	Aceh Barat	1.82	1.82	3.64	2.09	1.99	2.28
8	Aceh Besar	1.25	1.81	1.61	2.58	2.37	1.92
9	Pidie	1.14	1.14	1.19	1.03	1.01	1.10
10	Bireuen	2.08	1.06	1.22	1.52	1.78	1.53
11	Aceh Utara	1.96	2.48	4.11	5.11	4.56	3.64
12	Aceh Barat Daya	-	-	0.60	1.27	0.98	0.95
13	Gayo Lues	-	-	0.37	0.28	0.80	0.48
14	Aceh Tamiang	-	-	2.71	1.69	1.56	1.99
15	Nagan Raya	-	-	0.89	1.97	1.77	1.54
16	Aceh Jaya	-	-	1.54	1.29	1.00	1.28
17	Bener Meriah	-	-	3.20	3.09	0.60	2.30
18	Banda Aceh	2.81	2.95	2.67	4.15	4.15	3.35
19	Sabang	1.01	2.14	6.27	4.03	2.19	3.13
20	Langsa	-	-	1.71	1.60	3.52	2.28
21	Lhokseumawe	-	-	4.07	4.92	5.81	4.93
Jumlah		24.37	27.07	48.96	47.57	45.57	
Rata-Rata		1.87	2.08	2.33	2.27	2.17	2.14

Potensi Pengembangan Daerah

No	Sektor	Potensi Ekonomi
1	Pertambangan	- Potensi pertambangan: Migas - Perkembangan: Penurunan kontribusi terhadap PDRB dari tahun 2000 samapi 2005 (30,95% menjadi 23%) - Sub sektor penggalian memberikan kontribusi pada kisaran 0.5% terhadap PDRB. - Material (bahan galian Golongan C), yaitu: Marmer, Bentonit, Batuapung batu, pasir dan Pasir Besi. - Bahan galian bijih besi dan emas
2	Pariwisata	- Kontribusi sub sektor rumah makan/restoran adalah 0,05% (2000) dan meningkat menjadi 0,08% di tahun 2005. Kontribusi sub sektor perhotelan dari 0,23% pada tahun 2000 menjadi 0,44% pada tahun 2005. - Potensi pengembangan obyek wisata bahari di pesisir pantai barat NAD serta wisata budaya dan pantai di pantai timur NAD.
3	Perikanan	- Budidaya tambak berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara dan Aceh Tengah. - Perikanan laut sebagian berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Utara, Bireun dan Banda Aceh

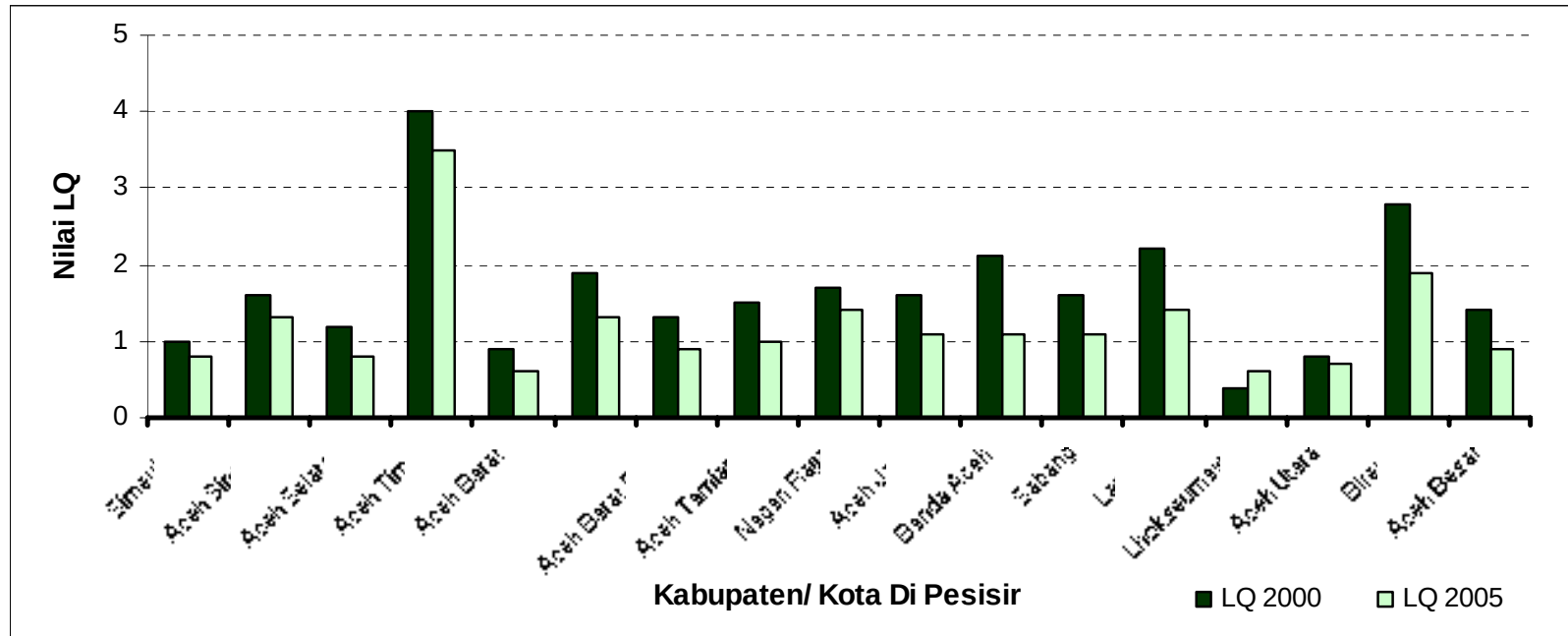
Sektor Basis NAD

No.	Kabupaten/ Kota	Sektor Basis
1	Simeulue	Pertanian; listrik dan air minum; pengangkutan dan komunikasi; keuangan,persewaan dan jasa perusahaan; jasa-jasa.
2	Aceh Singkil	Pertanian; listrik dan air minum; bangunan dan konstruksi; perdagangan,hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan,persewaan dan jasa perusahaan.
3	Aceh Selatan	Pertanian; listrik dan air minum; bangunan dan konstruksi; perdagangan,hotel dan restoran; keuangan,persewaan dan jasa perusahaan; jasa-jasa.
4	Aceh Timur	Pertanian; listrik dan air minum; keuangan,persewaan dan jasa perusahaan
5	Aceh Barat	Pertanian; listrik dan air minum; bangunan dan konstruksi; perdagangan,hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan,persewaan dan jasa perusahaan; jasa-jasa.
6	Aceh Besar	Pertanian; listrik dan air minum; bangunan dan konstruksi; perdagangan,hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; jasa-jasa.
7	Banda Aceh	Listrik dan air minum; bangunan dan konstruksi; perdagangan,hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan,persewaan dan jasa perusahaan; jasa-jasa.
8	Sabang	Listrik dan air minum; bangunan dan konstruksi; perdagangan,hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; euangan,persewaan dan jasa perusahaan; jasa-jasa.
9	Pidie	Pertanian; listrik dan air minum; bangunan dan konstruksi; pengangkutan dan komunikasi; keuangan,persewaan dan jasa perusahaan;
10	Bireuen	Pertanian; listrik dan air minum; bangunan dan konstruksi; perdagangan,hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan,persewaan dan jasa perusahaan.
11	Aceh Utara	Pertambangan dan penggalian
12	Aceh Barat Daya	Pertanian; listrik dan air minum; bangunan dan konstruksi; perdagangan,hotel dan restoran; keuangan; jasa-jasa
13	Aceh Tamiang	Pertanian; listrik dan air minum; bangunan dan konstruksi; pengangkutan dan komunikasi; keuangan,persewaan dan jasa perusahaan; jasa-jasa
14	Nagan Raya	Pertanian; listrik dan air minum; bangunan dan konstruksi; pengangkutan dan komunikasi; keuangan,persewaan dan jasa perusahaan; jasa-jasa
15	Aceh Jaya	Pertanian; pengangkutan dan komunikasi; keuangan,persewaan dan jasa perusahaan.
16	Langsa	Industri pengolahan; Listrik dan air minum; bangunan dan konstruksi; perdagangan,hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan,persewaan dan jasa perusahaan; jasa-jasa.
17	Lhokseumawe	Industri pengolahan

Sektor Unggulan

No	Kabupaten/Kota	Sektor Unggulan (Komoditas)
1	Lhokseumawe	Industri pengolahan (PT Arun NGL, PT. Exxon Mobil Oil Indonesia (EMOI)).
2	Banda Aceh	- Perdagangan, Perangkutan dan Telekomunikasi , Perikanan (tambak ikan)
3	Sabang	- Perdagangan, Pariwisata (pantai, hutan wisata alam), Perikanan (ikan pelagis)
4	Kab. Aceh Utara	- Pertambangan dan galian (migas), Industri (Pabrik Kertas Kraft Aceh, pabrik Pupuk AAF (Aceh Asean Fertilizer) dan pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM)), Pertanian (padi), Perkebunan (kelapa sawit, kakao, pinang), Peternakan (sapi, kambing, domba, unggas) , Perikanan (tambak ikan, perikanan laut)
5	Kab. Bireuen	- Perkebunan (kedele, kakao, kelapa, pinang, kapok randu), Perdagangan , Perikanan (tambak ikan, perikanan laut)
6	Aceh Barat	- Perkebunan (kelapa sawit, karet, kakao), Perdagangan, Peternakan (unggas)
7	Aceh Barat Daya	- Perkebunan (kelapa sawit, pala) , Peternakan (kambing, domba), Perikanan (perikanan laut)
8	Aceh Besar	- Pertanian (padi), Perkebunan (cengkeh, lada), Industri pengolahan, Peternakan (sapi, kerbau, domba) , Perikanan (tambak ikan)
9	Aceh Jaya	- Perkebunan (kelapa sawit), Kehutanan
10.	Aceh Selatan	- Perkebunan (kelapa sawit, pala), Perdagangan, Perikanan (perikanan laut)
11.	Aceh Singkil	- Perkebunan (kelapa sawit, karet), Kehutanan, Perdagangan
12.	Aceh Tamiang	- Perkebunan (kelapa sawit, karet, ubi kayu), Pertambangan (migas), Perikanan (tambak)
13.	Aceh Timur	- Perkebunan (kelapa sawit, karet, kakao), Perikanan (tambak ikan), Pertambangan dan galian (bahan galian C), Peternakan (sapi, kerbau, kambing)
14.	Langsa	- Perdagangan, Perkebunan (kelapa sawit, pinang)
15.	Nagan Raya	- Perkebunan (kelapa sawit), Peternakan (kambing)
16.	Pidie	- Pertanian (padi), Perkebunan (kelapa sawit, lada, pinang, kakao), Perikanan (tambak ikan), Peternakan (sapi, kerbau, kambing)
17.	Simeulue	- Perkebunan (cengkeh) - Peternakan (kerbau) - Perikanan (budidaya ikan dan rumput laut) - Pariwisata

Nilai LQ Sektor Perikanan di Pesisir NAD



Nilai LQ Tahun 2000

Sub sektor perikanan menjadi salah satu sektor basis perekonomian di setiap Kabupaten/Kota, meliputi: Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Timur, Pidie, Abdaya, Tamiang, Nagan Raya, aceh Jaya, Banda aceh, Sabang, Langsa, Bireuen dan Aceh Besar.

Nilai LQ Tahun 2005

Sub sektor perikanan masih tetap menjadi salah satu sektor basis di setiap kabupaten/kota, namun mengalami pergeseran yang cenderung turun dari posisi semula. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa sub sektor perikanan dalam 5 tahun terakhir (terutama setelah terjadi tsunami) kemungkinan mengalami penurunan daya saing dengan sektor-sektor lain dalam pembentukan PDRB daerah yang bersangkutan di wilayah pesisir Provinsi NAD.

Profil Pengembangan Investasi

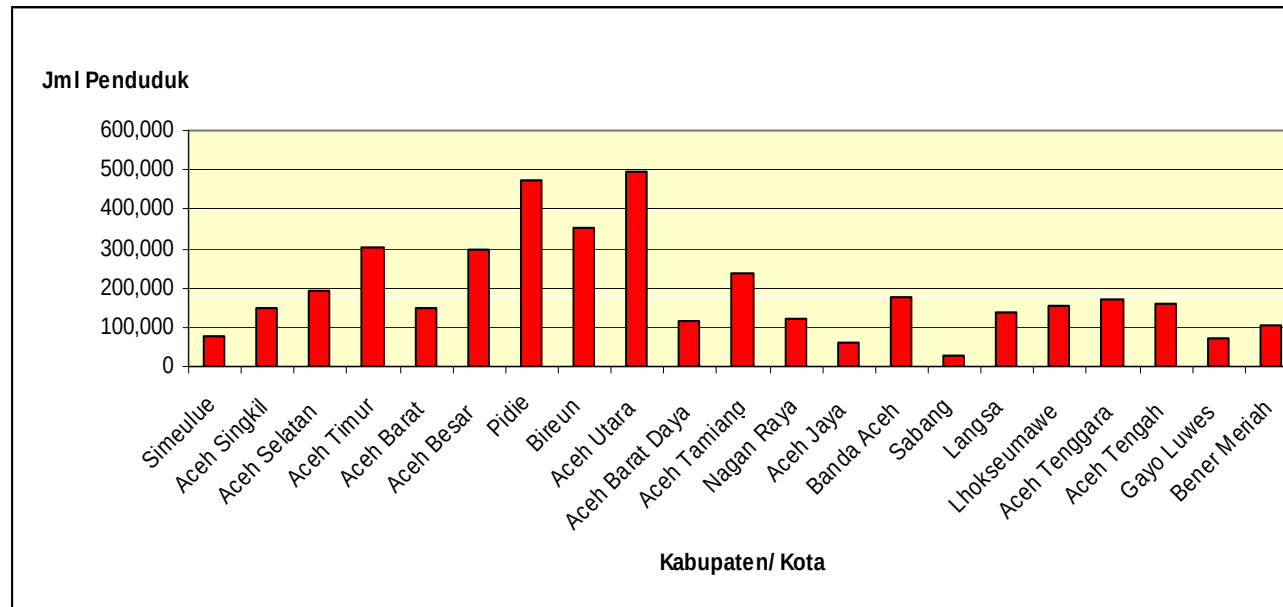
Perkembangan Investasi PMDN dan PMA (Juta US\$)

Investasi	2001		2002		2003		Sektor Utama
	Jml	% Nas	Jml	% Nas	Jml	% Nas	
PMDN	64.40	0.11	1.20	0.00	98.90	0.20	Perkebunan
PMA	6.00	0.04	0.00	0.00	82.50	0.62	Perkebunan

- Investasi cenderung ditanamkan pada sektor perkebunan

Penduduk

Jumlah Penduduk Provinsi NAD Dirinci Per Kabupaten/Kota Tahun 2005



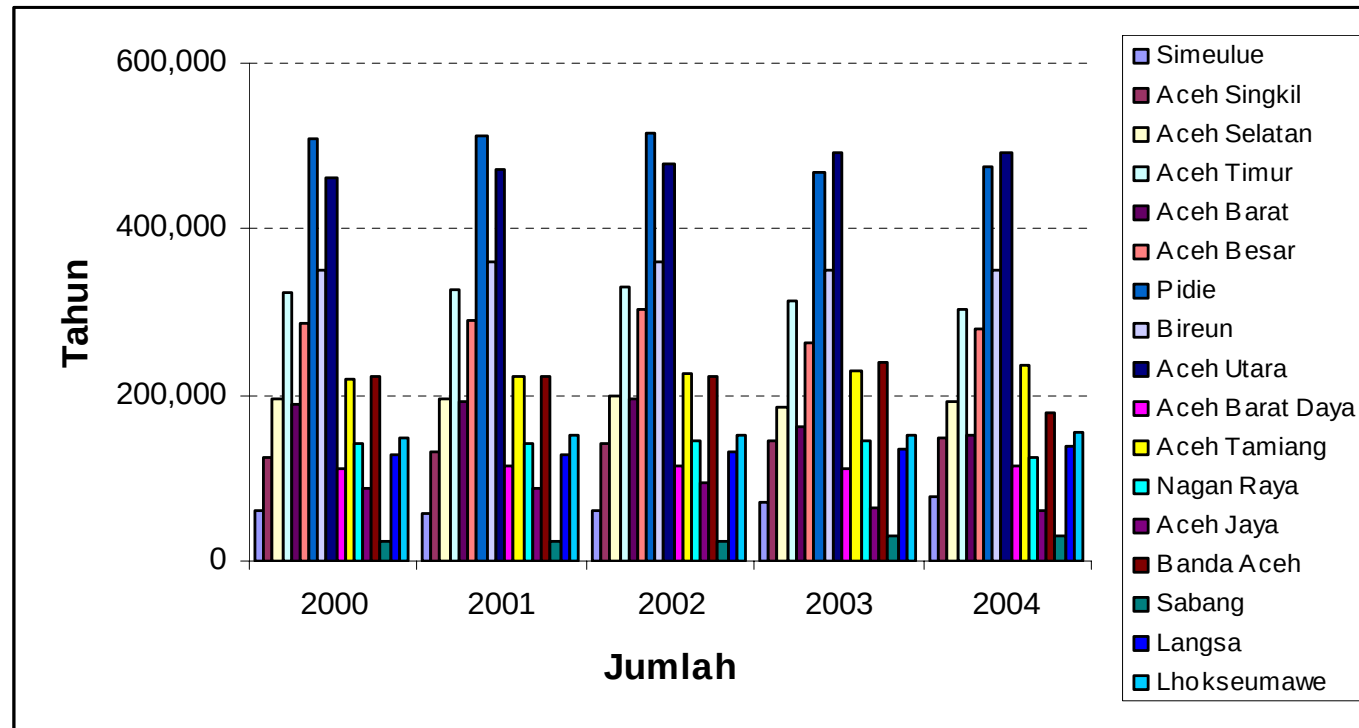
**Jumlah penduduk terbanyak ada di Kabupaten
Pidie, Kab. Bireun dan Kab. Aceh Utara**

Kabupaten Aceh utara 493.670

Kabupaten Pidie 474.359

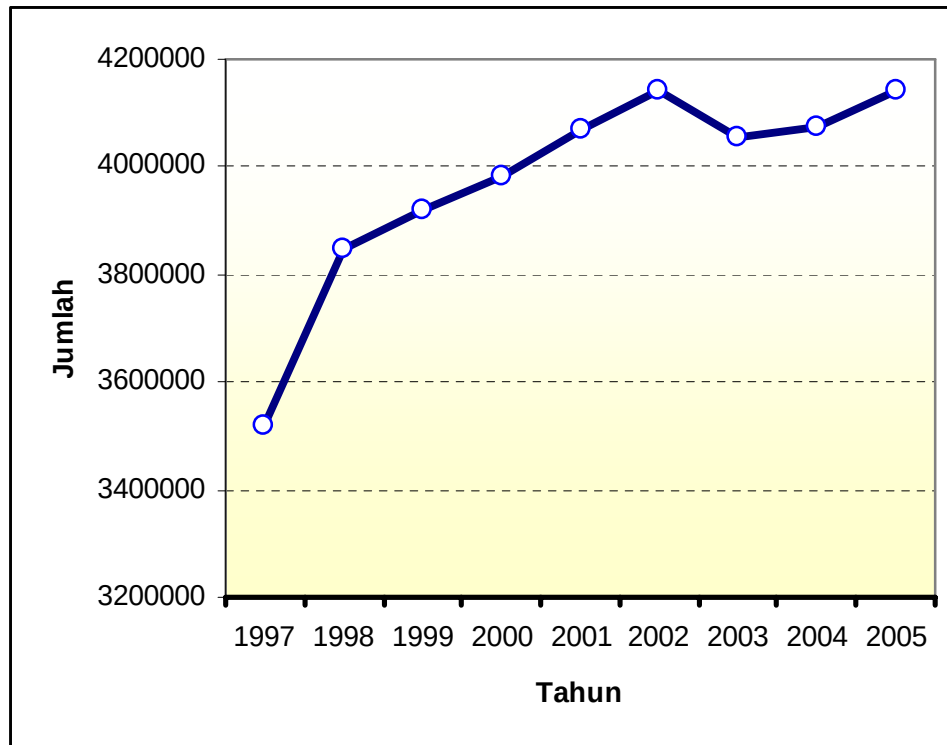
Kabupaten Bireuen 351.835

Distribusi Penduduk Wilayah Pesisir Prov. NAD



Jumlah penduduk terbesar dijumpai di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 493.261 jiwa dan terendah pada Kabupaten Sabang dengan jumlah 31.449 jiwa.

Laju Pertumbuhan Penduduk



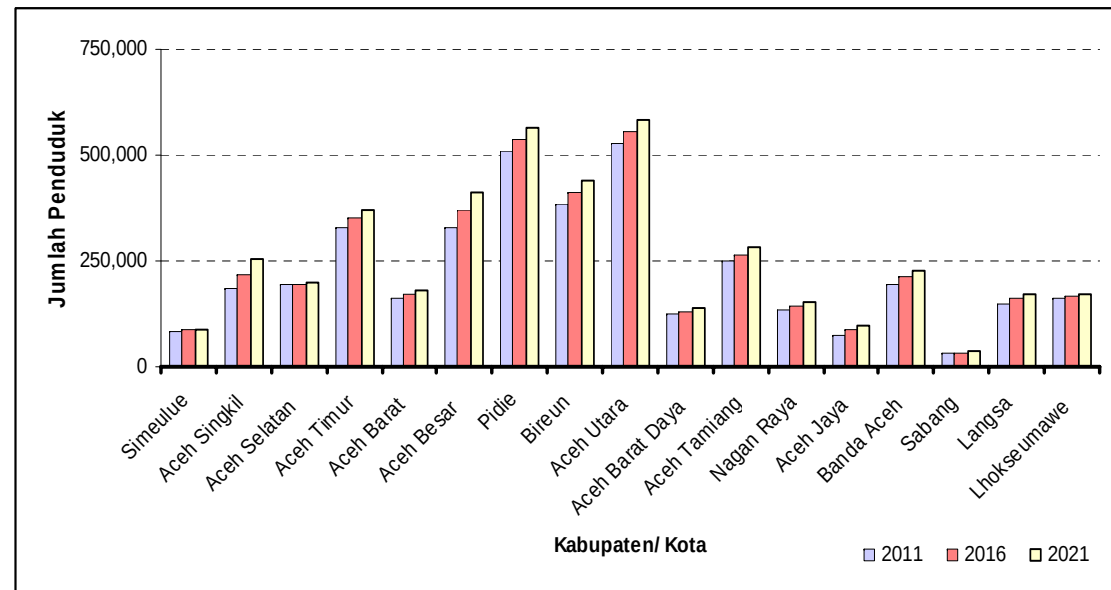
Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi antara tahun 1997 dan 1998 sebesar 9,34% sedangkan penurunan penduduk terjadi antara tahun 2002 dan 2003 dengan penurunan sebesar 2,12%.

Pertumbuhan Rata-Rata Penduduk Di Wilayah Pesisir NAD

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Penduduk/ Th	Persentase pertumbuhan	Tingkat Pertumbuhan
1	Simeulue	684	1.19	Sangat Rendah
2	Aceh Singkil	6504	5.40	Tinggi
3	Aceh Selatan	432	0.22	Sangat Rendah
4	Aceh Timur	4108	1.27	Sedang
5	Aceh Barat	1940	1.02	Rendah
6	Aceh Besar	8124	2.85	Sangat Tinggi
7	Pidie	5547	1.11	Tinggi
8	Bireuen	5552	1.59	Tinggi
9	Aceh Utara	5647	1.23	Tinggi
10	Aceh Barat Daya	1429	1.27	Sangat Rendah
11	Aceh Tamiang	2806	1.28	Rendah
12	Nagan Raya	1778	1.27	Sangat Rendah
13	Aceh Jaya	2421	2.80	Rendah
14	Banda Aceh	3036	1.41	Rendah
15	Sabang	266	1.12	Sangat Rendah
16	Langsa	2070	1.67	Rendah
17	Lhokseumawe	1042	0.70	Sangat Rendah
	Jumlah	53386	27.39	

Pertumbuhan penduduk tertinggi ada di Kab. Aceh Besar sebesar 8124 jiwa/tahun. Sedangkan pertumbuhan penduduk terendah ada di Kota Sabang, yaitu 266 jiwa/tahun.

Perkiraan Jumlah Penduduk Wilayah Pesisir NAD Tahun 2011, 2016 dan 2021



Diperkirakan sampai akhir tahun perencanaan, jumlah penduduk tertinggi ada di Kab. Aceh Utara, Kab. Pidie dan Kab. Bireuen dengan jumlah 583.618, 563.061 dan 440.667 jiwa sedangkan terendah di Kota Sabang, Kab. Simeulue dan Kab. Aceh Jaya dengan jumlah 35.705, 89.330 dan 99.396 jiwa.

KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH

1. Listrik

Tahun 2011: 798,97 Kwatt

Tahun 2016: 854,38 Kwatt

Tahun 2021: 910,30 Kwatt

2. Telepon

Tahun 2011: 191.531SST, 148 STO

Tahun 2016: 204.877 SST, 158 STO

Tahun 2021: 218.224 SST, 169 STO

3. Fasilitas Kesehatan

Tahun 2011: 9.314 unit

Tahun 2016: 9.968 unit

Tahun 2021: 10.616 unit

4. Pendidikan

Tahun 2011: 7824 unit

Tahun 2016: 8364 unit

Tahun 2021: 8913 unit

5. Perdagangan

Tahun 2011: 18514 unit

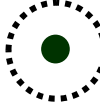
Tahun 2016: 19805 unit

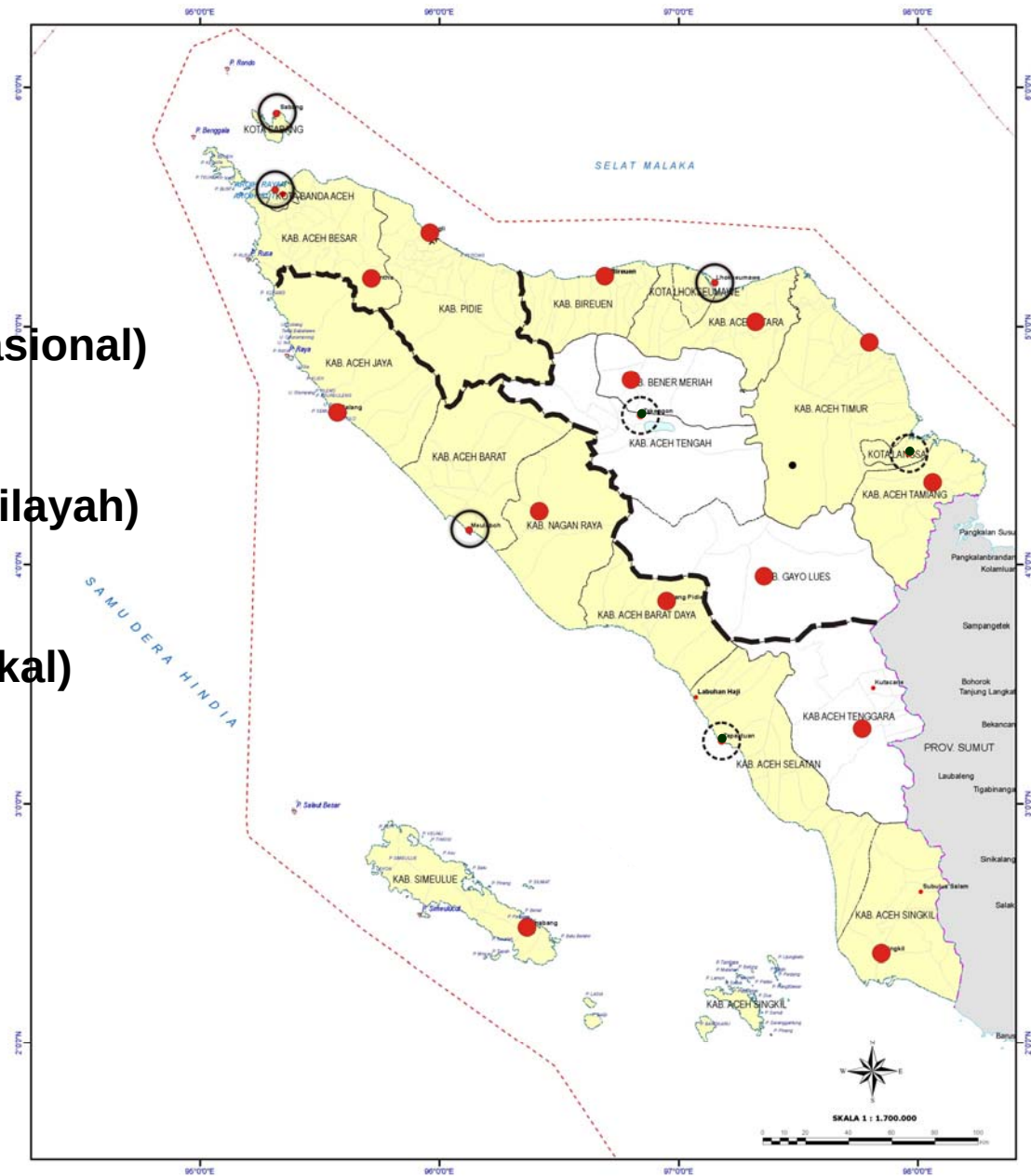
Tahun 2021: 21095

ANALISIS STRUKTUR RUANG WILAYAH (DARATAN) NAD

KAWASAN	KOTA DALAM KAWASAN		
	PKN	PKW	PKL
Kaw. Banda Aceh, dsk.	Banda Aceh - Sabang		Jantho
			Sigli
Kaw. Lhokseumawe, dsk.	Lhokseumawe	Langsa	Idi Rayeuk Bireuen Lhoksukon Karang Baru
		Takengon	Simpang Tiga Blangkejeran Redelong
Kaw. Meulaboh, dsk.	Meulaboh	Tapaktuan	Blang Pidie Jeuram Calang Kutacane Subulussalam Sinabang Singkil

STRUKTUR RUANG WILAYAH (DARATAN) PROV. NAD

-  PKN (Pusat Kegiatan Nasional)
-  PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)
-  PKL (Pusat Kegiatan Lokal)
-  Batas Wilayah PKN

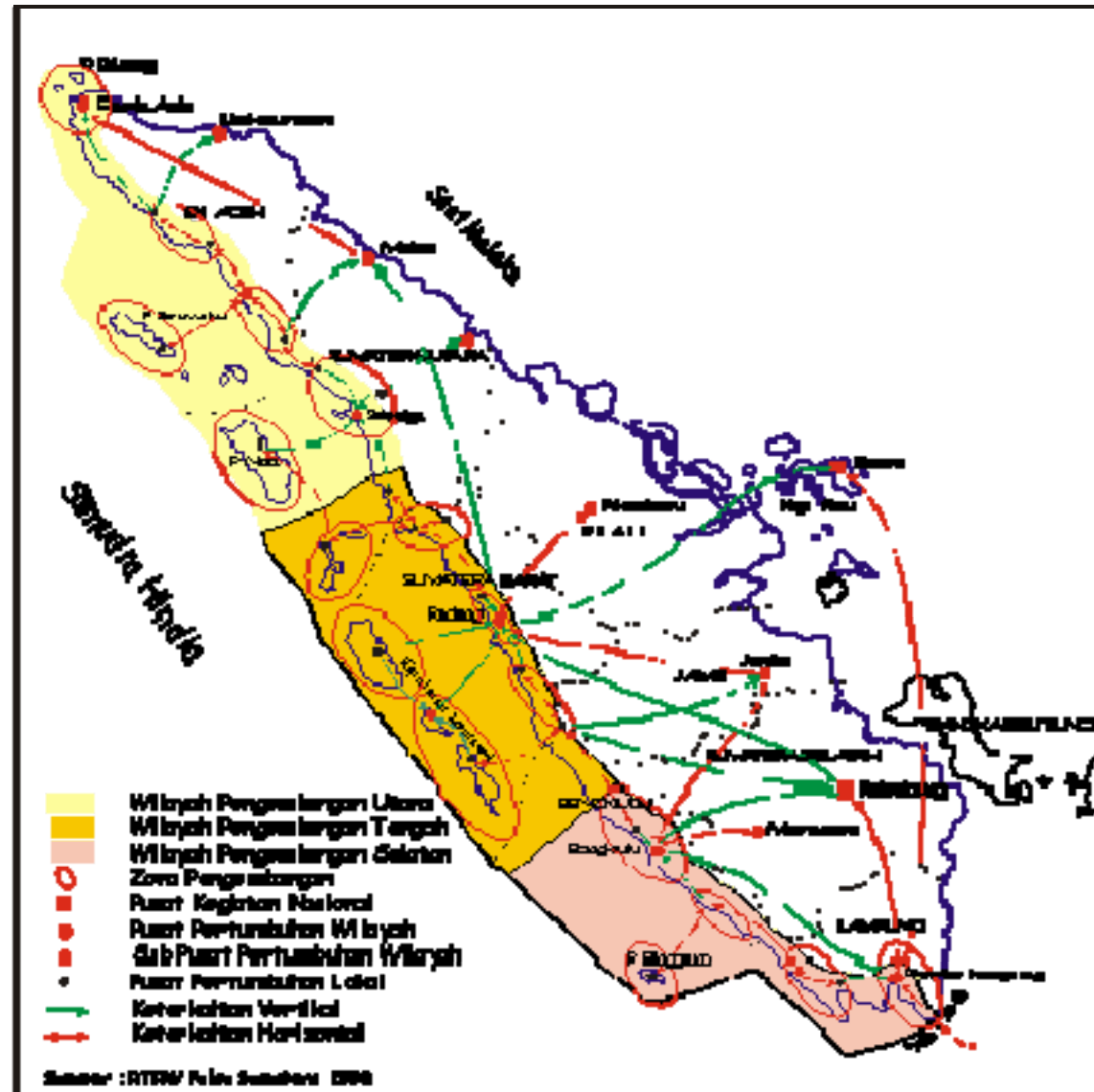


Struktur Tata Ruang Kelautan Nasional

- **Pusat Ruang Kelautan Primer, Sekunder, dan Tersier**
- **Di Indonesia: 13 Zona → Prov. NAD Zona Pengembangan Sumatra Bagian Barat**
- **Banda Aceh dan Sabang ditetapkan sbg Pusat Ruang Kelautan Tersier (orde III) dlm skala nasional**
- **Lhokseumawe sbg Pusat Ruang kelautan Sekunder (orde II) dlm skala nasional**

4 Zona Pengembangan Wilayah Kelautan Prov. NAD

- Sabang-Banda Aceh
- Meulaboh
- Tapaktuan
- Sinabang



Pergeseran Pusat Aktivitas Pesisir dan Kelautan

- **Bencana tsunami pada akhir tahun 2004 →
Disfungsi prasarana perikanan dan kelautan
spt brakewater, pelabuhan perikanan,
pelabuhan niaga - industri**
- **Overfishing di perairan pantai timur NAD**
- **Pertumbuhan aktivitas-aktivitas baru
(embrio pertumbuhan) yang tidak pernah
direncanakan**

Kota-kota potensial bagi pengembangan wilayah pesisir Provinsi NAD

- Sabang
- Banda Aceh
- Sigli
- Bireun
- Lhokseumawe
- Idi Rayeuk
- Langsa
- Lamno
- Calang
- Meulaboh
- Blang Pidie
- Labuhan Haji
- Sawang
- Singkil
- Sinabang
- P. Banyak

Penetapan Pusat Pengembangan Wilayah Pesisir NAD

- **Kriteria:**
 - Nilai LQ sektor perikanan (0.2)
 - Orientasi landing kapal (0.25)
 - Jenis dan jumlah prasarana pelabuhan perikanan dan kelautan (0.25)
 - Dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi NAD (0.3)

Parameter Penetapan

- **LQ Perikanan**
 - $LQ > 2$ ditetapkan sebagai pusat pengembangan primer.
 - $LQ 1-2$ ditetapkan sebagai pusat pengembangan sekunder.
 - $LQ < 1$ ditetapkan sebagai pusat pengembangan tersier.
- **Orientasi Pendaratan**
 - Pendaratan > 250 trip/ tahun ditetapkan sebagai pusat pengembangan primer.
 - Pendaratan $100-250$ trip/ tahun ditetapkan sebagai pusat pengembangan sekunder.
 - Pendaratan < 100 trip/ tahun ditetapkan sebagai pusat pengembangan tersier.
- **Jenis dan Jumlah Prasarana**
 - PPS, PPN dan/ Pelabuhan Niaga ditetapkan sebagai pusat pengembangan primer.
 - PPP ditetapkan sebagai pusat pengembangan sekunder.
 - TPI dan/ PPI ditetapkan sebagai pusat pengembangan tersier
- **Dukungan Kebijakan (ada/ tidak)**

Pengukuran Parameter

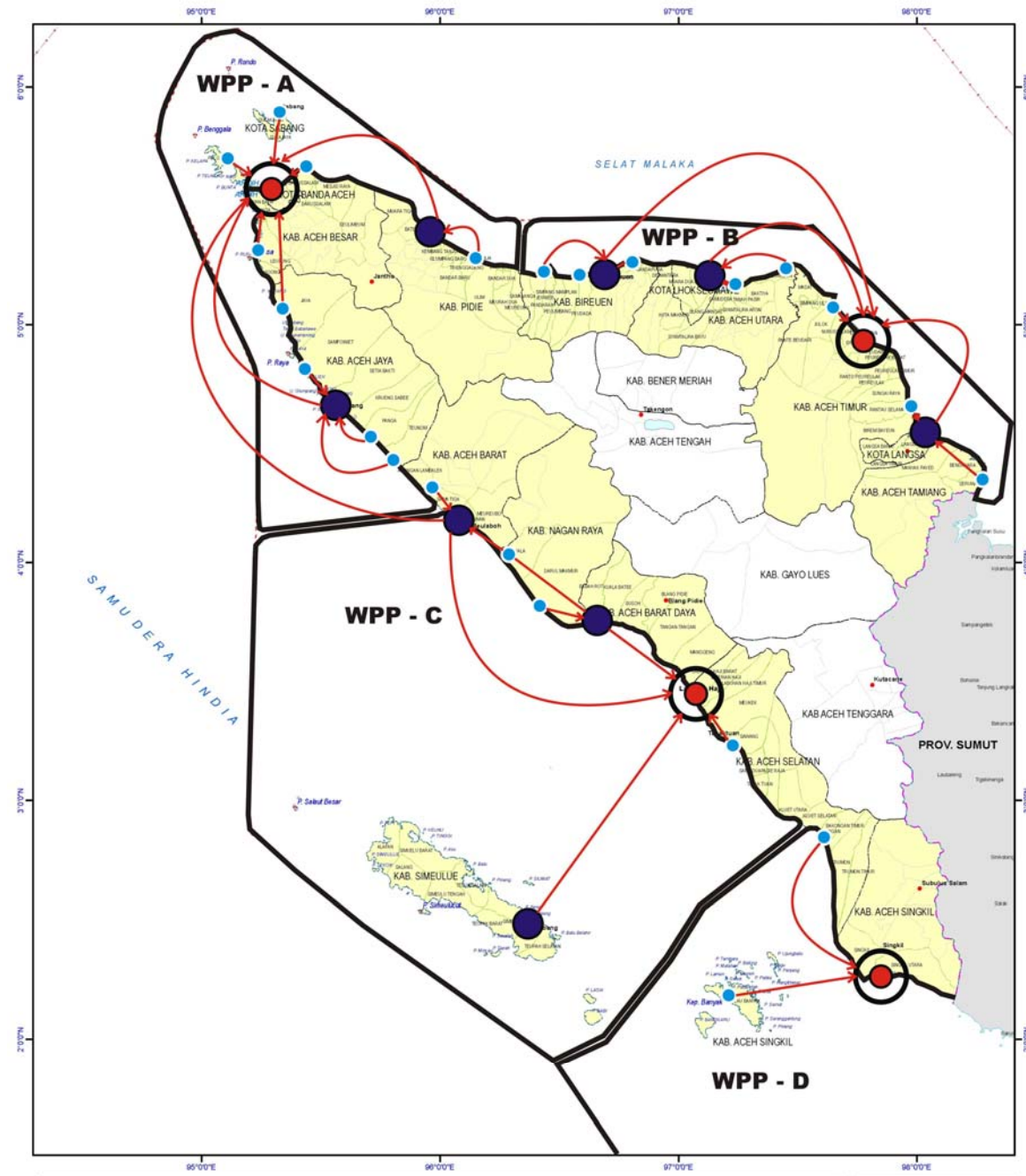
NO	KOTA	KABUPATEN ADMINISTRATIF	KRITERIA				
			LQ	Orientasi Landing (Trip)	Jenis Pras. Pelabuhan		Dukungan Kebijakan
					Perikanan	Niaga	
1	Sabang	Kota Sabang	1.1	92,744	1	1	Ada
2	Banda Aceh	Kota Banda Aceh	1.1	81,972	1	1	Ada
3	Sigli	Pidie	1.3	196,794	2	0	Tidak
4	Bireuen	Bireuen	1.9	194,850	1	0	Tidak
5	Lhokseumawe	Kota Lhoksumawe	0.6	58,428	1	1	Ada
6	Idi Rayeuk	Aceh Timur	3.5	137,172	3	0	Ada
7	Langsa	Kota Langsa	1.4	155,250	0	0	Tidak
8	Lamno	Aceh Besar	0.9	8,701	1	0	Tidak
9	Calang	Aceh Jaya	1.1	14,472	0	0	Tidak
10	Meulaboh	Aceh Barat	0.6	107,292	1	0	Tidak
11	Blang Pidie	Aceh Barat Daya	0.9	357,390	0	0	Tidak
12	Labuhan Haji	Aceh Barat Daya	0.9	357,390	0	1	Ada
13	Sawang	Aceh Selatan	0.8	1,007,688	2	0	Tidak
14	Singkil	Aceh Singkil	1.3	250,128	1	0	Ada
15	Sinabang	Simeuleu	0.8	654,192	0	0	Tidak
16	Pulau Banyak	Aceh Singkil	1.3	250,128	1	0	Tidak

Hasil Perhitungan

No	KOTA	KABUPATEN ADMINISTRATIF	LQ	Orientasi Landing	Jenis Prasarana	Kebijakan	TOTAL	Penetapan HIRARKI
			0.2	0.25	0.25	0.3		
1	Sabang	Kota Sabang	2	1	2	1	1.45	Hirarki I
2	Banda Aceh	Kota Banda Aceh	2	1	2	1	1.45	Hirarki I
3	Sigli	Pidie	2	2	1	0	1.15	Hirarki II
4	Bireun	Bireun	2	2	1	0	1.15	Hirarki II
5	Lhokseumawe	Kota Lhoksumawe	1	1	2	1	1.25	Hirarki II
6	Idi Rayeuk	Aceh Timur	3	2	3	1	2.15	Hirarki I
7	Langsa	Kota Langsa	2	2	0	0	0.90	Hirarki II
8	Lamno	Aceh Besar	1	1	1	0	0.70	Hirarki III
9	Calang	Aceh Jaya	2	1	0	0	0.65	Hirarki II
10	Meulaboh	Aceh Barat	1	2	1	0	0.95	Hirarki III
11	Blang Pidie	Aceh Barat Daya	1	3	0	0	0.95	Hirarki II
12	Labuhan Haji	Aceh Barat Daya	1	3	1	1	1.50	Hirarki I
13	Sawang	Aceh Selatan	1	3	2	0	1.45	Hirarki II
14	Singkil	Aceh Singkil	2	3	1	1	1.70	Hirarki I
15	Sinabang	Simeuleu	1	3	0	0	0.95	Hirarki II
16	Pulau Banyak	Aceh Singkil	2	3	1	0	1.40	Hirarki III

Struktur Pengembangan Wilayah Pesisir Prov. NAD 2001

- Banda Aceh –Sabang
- Lhokseumawe
- Labuhan Haji
- Singkil



Matrik Keserasian Antar Kegiatan Di Wilayah Pesisir

No	Kegiatan	Kegiatan																							
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	Perikanan Tangkap (A)		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	K	K	S	S
2	Perikanan Tambak (B)	S		S	S	S	S	K	K	K	S	S	S	S	S	S	K	S	S	S	K	K	K	S	K
3	Marikultur (C)	S	S		S	S	K	S	S	S	S	S	S	S	S	S	K	S	S	S	K	K	K	S	K
4	Pertanian (D)	K	K	K		S	S	K	K	K	S	S	S	S	S	S	K	S	S	S	S	K	S	S	S
5	Kehutanan (E)	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	K	S	S	S	S	S	S
6	Perhubungan (F)	S	K	K	S	K		K	K	K	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	K	K	K	K
7	Pariwisata Pantai Diving (G)	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	S	K	K	S	S	S	K	S	S	S
8	Pariwisata Pantai Berpasir (H)	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	S	S	S	K	K	S	S	S	K	S	S	S
9	Pariwisata renang dan Selancar (I)	S	S	S	S	S	K	S	S		S	S	S	S	S	S	K	K	S	S	S	K	S	S	S
10	Pertambangan Migas (J)	K	K	K	K	K	K	K	K	K		K	S	S	S	K	S	K	K	K	S	K	K	K	K
11	Pertambangan Mineral (K)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K		S	S	S	K	S	K	K	K	S	K	K	K	K
12	Pelabuhan (L)	S	K	K	S	K	S	K	K	K	S	S		S	S	K	S	K	K	K	S	K	K	K	K
13	Galangan Kapal (M)	S	S	S	S	K	S	S	S	S	S	S		S	K	S	K	K	K	K	S	K	K	S	K
14	Pemerintahan (N)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	K	K	S	K		S	K	S	S	S	S	K	S	S	S
15	Pendidikan (o)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	K	K	K	K	S		K	S	S	S	S	K	S	S	S
16	Industri (P)	S	K	K	K	S	S	K	K	K	S	S	S	S	S	K		S	S	K	K	K	K	K	K
17	Permukiman nelayan (Q)	S	S	S	S	S	K	K	S	K	K	K	S	K	S	K	S		S	S	S	K	K	K	K
18	Perdagangan dan jasa (R)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	K	K	S	K	S	S	S	S		S	S	K	K	S	S
19	Tsunami heritage (S)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	K	K	K	K	S	S	S	S	S		S	K	S	S	S
20	Zona Penahan Hijau (Buffer Zone) (T)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S
21	Kawasan suaka margasatwa (U)	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K		S	S	S
22	Kawasan Lindung (V)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	K	K	S	S	S	S	K	S	S	S	S	S		S	S
23	Kawasan resapan air (W)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		S
24	Ekosistem Padang lamun (X)	S	K	K	S	S	S	K	S	S	S	K	K	K	K	K	K	K	K	K	S	S	S	S	

Contoh : Alternatif Keserasian Kegiatan Kearah Laut Kota Sabang

Rencana Pemanfaatan Ruang Pesisir kearah Darat			Alternatif Keserasian Kegiatan kearah Laut
NO	Kecamatan	Kegiatan	
1	Sukajaya	a. Kawasan Hutan lindung	Perikanan tangkap, tambak, marikultur, pertanian, perhubungan, pariwisata pantai diving, pariwisata pantai berpasir, pariwisata renang dan selancar, pertambangan migas, pertambangan mineral, pelabuhan, galangan kapal, Pemerintahan, pendidikan, industri, permukiman nelayan, tsunami heritage, zona penahanan hijau, kawasan lindung, kawasan resapan air, ekosistem padang lamun
		b. Ladang	Kehutanan, perhubungan, pertambangan migas, pertambangan mineral, pelabuhan, galangan kapal, pemerintah, pendidikan, permukiman nelayan, perdagangan dan jada, tsunami heritage, zona penahan hijau, kawasan lindung, kawasan resapan air, ekosistem padang lamun
		c. Semak belukar	Perikanan tangkap, tambak, marikultur, pertanian, perhubungan, pariwisata pantai diving, pariwisata pantai berpasir, pariwisata renang dan selancar, pertambangan migas, pertambangan mineral, pelabuhan, galangan kapal, Pemerintahan, pendidikan industri, permukiman nelayan, tsunami heritage, zona penahanan hijau, kawasan lindung, kawasan resapan air, ekosistem padang lamun
		d. Perkebunan	Kehutanan, perhubungan, pertambangan migas, pertambangan mineral, pelabuhan, galangan kapal, pemerintah, pendidikan, permukiman nelayan, perdagangan dan jada, tsunami heritage, zona penahan hijau, kawasan lindung, kawasan resapan air, ekosistem padang lamun

Proses pengumpulan data-data di instansi-instansi



Diskusi dengan Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang



Diskusi dengan Kepala Bappeda Kota Langsa



Diskusi dengan Kepala Bappeda kota Lhokseumawe



Diskusi dengan Kepala Bappeda kabupaten Bireuen

TEURIMONG GEUNASEH

